



# LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH KOTA SERANG  
TAHUN 2022



H. SYAFIQUL A. SIDIQ, S.S., M.S.  
WALIKOTA SERANG

H. RIZKIARDI PRADILLOHMAN  
WAKIL WALIKOTA SERANG





# PEMERINTAH KOTA SERANG INSPEKTORAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Serang - Banten Telp. (0274) 281138, Fax. (0274) 281138

## PERNYATAAN REVIEWS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN BUDJARAN 2022

Kami telah membaca Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Peraturan Walikota Serang dan Laporan Kinerja Substansi tersebut yang diuraikan dalam Laporan Kinerja Instansi yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Serang.

Revisi diperlukan untuk memberikan keyakinan bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, jujur dan valid.

Selanjutnya, revisi kami, baik terhadap kondisi atau fakta yang menimbulkan perbedaan dapat menjadi keabsahan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Serang, 24 Maret 2023

INSPEKTORAT  
INSPEKTOR  
  
WACHYU E. KUSUMAWATI  
Kepala Lembaga  
TSP 12741022 180211 1 002



## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur yang milik Allah SWT, Shalawat dan Salam selalu tercurahkan kepada Rosululullah SAW karena berkat limpahan dan rahmatnya, Pemerintah Kota Serang dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2022.

Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat dengan tujuan untuk menginformasikan secara rinci upaya yang telah dilakukan dan capaian yang telah diraih yaitu dengan mengukur hasil pencapaian indikator-indikator sasaran misi pada dokumen RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Serang yang dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Serang Tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Pemerintah Daerah selama tahun 2022, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota Serang.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Serang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Besar harapan kami bahwa penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang ini dapat menjadi cermin dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota selama Tahun 2022, namun kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih terdapat



kekurangan. Untuk itu Pemerintah Kota Serang mengharapkan kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tahun yang akan datang. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Kota Serang Tahun 2022. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Pemerintah Kota Serang.

Serang, 27 Maret 2023

WALIKOTA SERANG


**H. SYAFRUDIN, S.Sos.,M.Si**



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kota Serang telah berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKjIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap OPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2022 merupakan tahun keempat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018 – 2023, dan Keputusan Walikota Serang Nomor 060/Kep.49-Huk/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2018-2023.

Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis meningkatnya derajat pendidikan masyarakat memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 99,80%, dan realisasi anggarannya mencapai 96,47%. Hal ini menunjukkan terdapat efisiensi sebesar 3,21%.
2. Sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat memiliki capaian kinerja sebesar 100,29%, dan realisasi anggarannya mencapai 91,28%. Hal ini menunjukkan terdapat efisiensi sebesar 8,98%.





3. Sasaran strategis meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah memiliki capaian kinerja sebesar 99,29% dan realisasi anggarannya mencapai 95,63%. Hal ini menunjukkan terdapat efisiensi sebesar 3,69%.
4. Sasaran strategis Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan indikator jumlah penanganan timbunan sampah memiliki capaian kinerja sebesar 74,29%, dan realisasi anggarannya mencapai 95,84%. Hal ini menunjukkan terdapat adanya tidak efisiensi sebesar -29,00%.
5. Sasaran strategis meningkatnya pengelolaan persampahan dan ruang terbuka hijau (RTH) dengan indikator ketersediaan RTH memiliki capaian kinerja sebesar 86,60%, dan realisasi anggarannya mencapai 55,46%. Hal ini menunjukkan terdapat adanya tidak efisiensi sebesar 35,96%.
6. Sasaran strategis menurunnya resiko bencana dan meningkatnya ketangguhan terhadap bencana memiliki capaian kinerja sebesar 58,00%, dan realisasi anggarannya mencapai 96,54%. Hal ini menunjukkan terdapat adanya kurang efisiensi sebesar -66,45%.
7. Sasaran strategis meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 78,35%, dan realisasi anggarannya mencapai 98,06%. Hal ini menunjukkan terdapat adanya tidak efisiensi sebesar -25,16%.
8. Sasaran strategis meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan public dan penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 97,37%, dan realisasi anggarannya mencapai 98,19%. Hal ini menunjukkan terdapat adanya efisiensi sebesar 3,22%.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang Tahun 2022 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 atas Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, belanja daerah ditargetkan sebesar Rp.1.539.472.622.207,00,- dengan realisasi sebesar Rp.1.453.444.702.816,- yang terdiri dari Belanja Operasi ditargetkan sebesar Rp.1.315.400.505.424,00,- dengan realisasi sebesar Rp.1.253.609.704.388,00,-, atau 95,30% dan Belanja Modal sebesar



Rp. 214.797.121.573,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 190.996.539.686,00,- atau 88,92% serta Belanja tidak terduga sebesar Rp. 9.274,995,210,00,- dengan realisasi sebesar 8.838.458.742,00 atau 95,29%.

Keberhasilan capaian kinerja Pemerintah Kota Serang dapat terwujud berkat dukungan semua elemen masyarakat Kota Serang, yang akan terus dipelihara dan pencapaian yang masih rendah akan ditingkatkan guna mencapai sasaran kinerja yang lebih baik.

**DAFTAR ISI**

	Hal
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    LATAR BELAKANG .....	1
1.2    MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
1.3    DASAR HUKUM.....	3
1.4    GAMBARAN UMUM KOTA SERANG .....	5
1.5    ISU STRATEGIS KOTA SERANG .....	17
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>21</b>
2.2    RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022.....	27
2.3    PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 .....	30
2.4    PROGRAM DAN RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022 .....	32
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>39</b>
3.1    CAPAIAN KINERJA KOTA SERANG.....	40
3.2    REALISASI ANGGARAN.....	145
3.3    PENGHARGAAN KOTA SERANG.....	150
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>155</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>176</b>



**DAFTAR TABEL**

	Hal
Tabel 1.1 __ Luas Wilayah Kota Serang Berdasarkan Kecamatan .....	9
Tabel 1.2 __ Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Serang Tahun 2018 –2022.....	10
Tabel 1.3 __ Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Serang Tahun 2018– 2022.....	10
Tabel 1.4 __ Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Serang Tahun 2018-2022 .....	10
Tabel 1.5 __ Komposisi Penduduk Kota Serang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018- 2022.....	11
Tabel 1.6 __ Komposisi Penduduk Kota Serang Menurut Kelompok Umur Tahun 2018- 2022.....	11
Tabel 1.7 __ Sebaran Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Di Kota Serang Tahun 2018-2022 .....	12
Tabel 1.8 __ Komposisi Penduduk Pemeluk Agama di Kota Serang Tahun 2018-2022 .....	13
Tabel 1.9 __ Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 ..	13
Tabel 1.10 __ Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022 .....	14
Tabel 2.1 __ Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Serang Tahun 2018-2023 .....	26
Tabel 2.2 __ Penataan Fokus Pembangunan Berdasarkan Prioritas RKPD Kota Serang Tahun 2022.....	29
Tabel 2.3 __ Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	31
Tabel 2.4 __ Rencana Belanja Pemerintah Kota Serang Tahun 2022.....	33
Tabel 2.5 __ Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2022.....	33
Tabel 2.6 __ Rencana Anggaran Per Program Tahun 2022 .....	34
Tabel 3.1 __ Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	39
Tabel 3.2 __ Indikator Kinerja Sasaran Strategis .....	40
Tabel 3.3 __ Capaian Pengukuran Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	41
Tabel 3.4 __ Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Pemerintah Kota Serang Tahun 2022 .....	43
Tabel 3.5 __ Capaian Pengukuran Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2022 .....	45



Tabel 3.6	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2016-2022.....	45
Tabel 3.7	Indeks Pembangunan Manusia dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 ....	46
Tabel 3.8	Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Tahun 2022 .....	49
Tabel 3.9	Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 .....	51
Tabel 3.10	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Tahun 2022 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD .....	51
Tabel 3.11	Faktor Penghambat dan Pendorong Sasaran Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat.....	54
Tabel 3.12	Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2022 .....	56
Tabel 3.13	Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 .....	57
Tabel 3.14	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2022 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD.....	58
Tabel 3.15	Kinerja Mutu Pelayanan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur .....	65
Tabel 3.16	Capaian Pengukuran Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah Tahun 2022 .....	65
Tabel 3.17	Nilai IKLI Kecamatan se-Kota Serang Tahun 2022.....	66
Tabel 3.18	Perkembangan Nilai IKLI Kecamatan se-Kota Serang Tahun 2019-2022 .....	66
Tabel 3.19	Realisasi dan Target IKLI dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023	67
Tabel 3.20	Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Tahun 2022 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD .....	68
Tabel 3.21	Realisasi dan Target Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 .....	70
Tabel 3.22	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Tahun 2022 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD .....	71
Tabel 3.23	Capaian Pengukuran Kinerja Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah Tahun 2022.....	71
Tabel 3.24	Uraian Pengukuran Kinerja Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah Tahun 2022.....	71
Tabel 3.25	Nilai Interval dan Kategori IKLH .....	75



Tabel 3.26	Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022	76
Tabel 3.27	Realisasi dan Target IKLH dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023	77
Tabel 3.28	Nilai Hasil IKLH Tahun 2022	80
Tabel 3.29	Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2022	84
Tabel 3.30	Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam Perubahan RPJMD 2018-2023	85
Tabel 3.31	Capaian Kinerja Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2022 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD	85
Tabel 3.32	Rekapitulasi Volume Sampah yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022	87
Tabel 3.33	Rekapitulasi Volume Sampah yang ditangani oleh Pihak Ketiga/Swasta Tahun 2022	87
Tabel 3.34	Luas Ruang Terbuka Hijau yang Terpelihara oleh Pemerintah Kota Serang Tahun 2022	91
Tabel 3.35	Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana Tahun 2022	95
Tabel 3.36	Hasil Indeks Resiko Bencana Berdasarkan Ancaman Tahun 2020-2021	96
Tabel 3.37	Indikator Sasaran Strategis Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana dalam Perubahan RPJMD 2018-2023	97
Tabel 3.38	Capaian Kinerja Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana Tahun 2022 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD	97
Tabel 3.39	Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Penanganan Bencana di Kota Serang	100
Tabel 3.40	Capaian Pengukuran Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Serang Tahun 2022	102
Tabel 3.41	Realisasi dan Target LPE dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023	103
Tabel 3.42	Capaian Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD	103
Tabel 3.43	Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat Tahun 2022	105



Tabel 3.44	Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 .....	107
Tabel 3.45	Capaian Kinerja Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat Tahun 2022 Terhadap Kondisi akhir RPJMD.....	107
Tabel 3.46	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Serang Tahun 2020-2022 .....	119
Tabel 3.47	Hasil antara Penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Serang Tahun 2020-2022.....	119
Tabel 3.48	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Serang Tahun 2017-2022 .....	120
Tabel 3.49	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Serang Tahun 2022 .....	121
Tabel 3.50	Realisasi dan Target Indeks Reformasi Birokrasi dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 .....	121
Tabel 3.51	Komponen Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2022 .....	122
Tabel 3.52	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi.....	123
Tabel 3.53	Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022.....	126
Tabel 3.54	Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 .....	127
Tabel 3.55	Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD .....	128
Tabel 3.56	Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD .....	128
Tabel 3.57	Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.....	131
Tabel 3.58	Capaian Pengukuran Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 .....	131
Tabel 3.59	IKM Kota Serang Berdasar Indikator Komposit Triwulan I-IV Tahun 2022 .....	136
Tabel 3.60	Hasil Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2015-2020 .....	137
Tabel 3.61	Hasil Evaluasi AKIP Kota Serang 2017 – 2021 .....	139
Tabel 3.62	Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2022 .....	140
Tabel 3.63	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP.....	141



Tabel 3.64	Capaian dan Target Indikator Sasaran Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam Perubahan RPJMD 2018-2023.....	143
Tabel. 3.65	Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah dalam Pencapaian Indikator Kinerja Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) .....	144
Tabel 3.66	Komposisi Belanja Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2022 (Anaudited) .....	146
Tabel 3.67	Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Serang Per Sasaran Strategis Tahun 2022 .....	148



## DAFTAR GRAFIK

Hal

Grafik 3.1 _Capaian Indikator Kinerja Tujuan Pemerintah Kota Serang_ Tahun 2022 .....	42
Grafik 3.2 _Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2016-2022..	46
Grafik 3.3 _Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kota Serang Tahun 2016-2022..	52
Grafik 3.4 _Capaian Harapan Lama Sekolah Kota Serang Tahun 2016-2022 ..	52
Grafik 3.5 _Capaian Usia Harapan Hidup Kota Serang Tahun 2016-2022.....	58
Grafik 3.6 _Capaian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Serang_ Tahun 2019-2022 .....	67
Grafik 3.7 _Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Serang Tahun 2016-2022 .....	76
Grafik 3.8 _Persentase Capaian Penanganan Sampah Kota Serang Tahun 2018-2022 .....	88
Grafik 3.9 _Persentase Ketersediaan RTH Kota Serang Tahun 2018-2022 .....	90
Grafik 3.10 _Perkembangan Indeks Resiko Bencana Kota Serang Terhadap Provinsi Banten Tahun 2016-2022.....	97
Grafik 3.11 _Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Serang Tahun 2016-2022.....	104
Grafik 3.12 _Laju Inflasi Kota Serang Terhadap Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2016-2022 .....	110
Grafik 3.13 _Indeks Daya Beli Kota Serang Tahun 2018-2022.....	111
Grafik 3.14 _PDRB PerKapita Kota Serang Tahun 2016-2022.....	112
Grafik 3.15 _Indeks Gini Kota Serang Terhadap Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2018-2022 .....	114
Grafik 3.16 _Persentase Penduduk Miskin Kota Serang terhadap Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2016-2022 .....	115
Grafik 3.17 _Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Serang terhadap Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2018-2022.....	116
Grafik 3.18 _IKM Kota Serang Berdasar Unsur Triwulan I-IV Tahun 2022.....	132
Grafik 3.19 _Capaian IKM Kota Serang Tahun 2015-Triwulan IV 2022 .....	133
Grafik 3.20 _Capaian Nilai AKIP Kota Serang Tahun 2017 - 2022.....	138



**DAFTAR GAMBAR**

	Hal
Gambar 1.1. Peta Administrasi Kota Serang.....	5
Gambar 3.1 Peta Proses Bisnis Kota Serang.....	43
Gambar 3.2 Crosscutting untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Strategis Pemerintah Kota Serang.....	44
Gambar 3.3. Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Mewujudkan Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya .....	44
Gambar 3.4 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Meningkatkan Derajat Pendidikan .....	49
Gambar 3.5 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat ...	53
Gambar 3.6 Logical Frame Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	54
Gambar 3.7 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat .....	56
Gambar 3.8 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.....	59
Gambar 3.9 Logical Frame Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat...	59
Gambar 3.10 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Meningkatkan Infrastruktur .....	64
Gambar 3.12 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah .....	70
Gambar 3.13 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah.....	74
Gambar 3.14 Logical Frame Sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah.....	74
Gambar 3.15 Upaya Pemerintah Kota dalam Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup .....	75
Gambar 3.16 Lembar Kerja Analisa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022 .....	77
Gambar 3.17 Lembar Kerja Analisa Indeks Kualitas Air Tahun 2022 .....	78
Gambar 3.18 Lembar Kerja Analisa Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2022 .....	80
Gambar 3.19 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).....	84



Gambar 3.20	Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).....	92
Gambar 3.21	Logical Frame Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).....	93
Gambar 3.22	Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Menurunkan Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana.....	94
Gambar 3.23	Proses Bisnis Sasaran Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana.....	99
Gambar 3.24	Logical Frame Sasaran Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana.....	100
Gambar 3.25	Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Keunggulan Lokal.....	101
Gambar 3.26	Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat.....	105
Gambar 3.27	Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat.....	108
Gambar 3.28	Logical Frame Sasaran Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat.....	109
Gambar 3.29	Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima.....	118
Gambar 3.30	Upaya Pemerintah Kota Serang Dalam Meningkatkan Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik.....	126
Gambar 3.31	Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	129
Gambar 3.32	Logical Frame Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	130



## 1.1 LATAR BELAKANG

**A**kuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut pelaporan kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Walikota menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bertitik tolak dari RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Serang Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Serang Tahun 2022, serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan LKjIP Tahun 2022 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran, dengan demikian LKjIP Kota Serang Tahun 2022 menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Walikota



kepada Presiden ini disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2022 yaitu tahun keempat RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023.

## 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Serang Tahun 2022 memiliki maksud sebagai upaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel. Sedangkan tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Serang Tahun 2022 memiliki tujuan:

1. Mewujudkan akuntabilitas instansi Pemerintah Kota Serang dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah kepada unit kerja yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Serang kepada Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat;
2. Memberikan informasi umum terkait dengan capaian kinerja keseluruhan Pemerintah Kota Serang sepanjang pelaksanaan RKPD Kota Serang pada Tahun Anggaran 2022;
3. Memberikan informasi capaian kinerja berupa angka capaian indikator-indikator misi yang terukur serta dapat memrepresentasikan kinerja Pemerintah Kota Serang yang sesungguhnya;
4. Memberikan berbagai informasi dan rekomendasi terkait capaian indikator kinerja sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan serta pelaksanaan perubahan ke arah perbaikan dalam mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mewujudkan pelaksanaan misi RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023;
5. Sebagai salah satu proses perbaikan dalam sistem perencanaan, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



### 1.3 DASAR HUKUM

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Serang Tahun 2022 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang;
16. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Serang Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Walikota Serang Nomor 58 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Serang;
18. Peraturan Walikota Serang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pedoman Rekonsiliasi Data Transaksi Realisasi anggaran Dalam Penyusunan Laporan Keuangan;
19. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Serang Tahun 2019-2023;
20. Peraturan Walikota Serang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2022;





21. Peraturan Walikota Serang Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Serang Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

## 1.4 GAMBARAN UMUM KOTA SERANG

### 1.4.1 DATA GEOGRASIS WILAYAH

Kota Serang merupakan wilayah baru hasil pemekaran dari Kabupaten Serang sebagai kabupaten induk. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya oleh pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007, Kota Serang memiliki luas wilayah keseluruhan  $\pm 266,74 \text{ Km}^2$  atau 26.674 Ha. Luas wilayah Kota Serang mengalami penyesuaian peta berdasarkan rekomendasi Badan Informasi Geospasial (BIG) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020-2040, dimana luas semula sebesar  $266,74 \text{ km}^2$  menjadi  $266,18 \text{ km}^2$ . Namun demikian perubahan luas wilayah ini belum disesuaikan dengan data yang dikeluarkan oleh instansi-inastansi vertikal lainnya seperti BPS dan BPN, sehingga data luasan wilayah yang dirilis masih menggunakan data luas wilayah yang lama.



**Gambar 1.1.**  
**Peta Administrasi Kota Serang**



Kota Serang memiliki luas 26.670 Ha yang secara astronomis terbentang diantara  $5^{\circ}99'6''22'$  Lintang Selatan serta di sepanjang  $106^{\circ}07'106''25'$  Bujur Timur. Berdasarkan sistem koordinat UTM (*Universal Transfer Mercator*) Zona 48E wilayah Kota Serang terletak pada koordinat 618.000 m sampai dengan 638.600 m dari Barat ke Timur, serta pada 9.337.725 m sampai dengan 9.312.475 m dari Utara ke Selatan. Jika ditarik garis lurus dari utara ke selatan, maka jarak terpanjang yang didapat adalah sekitar 21,7 Km. Sementara itu jarak terpanjang dari Barat ke Timur adalah sekitar 20 km. Letak wilayah Kota Serang secara geografis berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah Utara, sementara di bagian yang lain berbatasan dengan Kabupaten Serang. Relief topografi Kota Serang di dominasi dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 500 mdpl.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, Kota Serang mempunyai batas-batas wilayah :

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Teluk Banten;
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pontang, Kecamatan Ciruas, Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Cikuesal, Kecamatan Petir, Kecamatan Baros Kabupaten Serang; dan
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Waringin Kurung, Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang.

Cakupan wilayah Kota Serang terdiri dari 6 kecamatan dan 67 kelurahan, yaitu:

**1. Kecamatan Curug**

- 1) Kelurahan Kamanisan,
- 2) Kelurahan Pancalaksana,
- 3) Kelurahan Tinggar,
- 4) Kelurahan Cipete,
- 5) Kelurahan Curugmanis,
- 6) Kelurahan Sukalaksana,
- 7) Kelurahan Sukawana,

**2. Kecamatan Kasemen**

- 1) Kelurahan Kasemen,
- 2) Kelurahan Warung Jaud,
- 3) Kelurahan Mesjid Priyayi,
- 4) Kelurahan Bendung,
- 5) Kelurahan Terumbu,
- 6) Kelurahan Sawah Luhur,
- 7) Kelurahan Kilasah,



- 8) Kelurahan Curug,
- 9) Kelurahan Sukajaya, dan
- 10) Kelurahan Cilaku

- 8) Kelurahan Margaluyu,
- 9) Kelurahan Kasunyatan, dan
- 10) Kelurahan Banten.

### **3. Kecamatan Cipocok Jaya**

- 1) Kelurahan Gelam,
- 2) Kelurahan Dalung,
- 3) Kelurahan Tembong,
- 4) Kelurahan Karundang,
- 5) Kelurahan Cipocok Jaya,
- 6) Kelurahan Banjarsari,
- 7) Kelurahan Banjaragung, dan
- 8) Kelurahan Panancangan

### **4. Kecamatan Serang**

- 1) Kelurahan Serang,
- 2) Kelurahan Cipare,
- 3) Kelurahan Sumurpecung,
- 4) Kelurahan Cimuncang,
- 5) Kelurahan Kotabaru,
- 6) Kelurahan Lontarbaru,
- 7) Kelurahan Kagungan,
- 8) Kelurahan Lopang,
- 9) Kelurahan Unyur,
- 10) Kelurahan Kaligandu,
- 11) Kelurahan Terondol, dan
- 12) Kelurahan Sukawana

### **5. Kecamatan Taktakan**

- 1) Kelurahan Cilowong,
- 2) Kelurahan Sayar,
- 3) Kelurahan Sepang,
- 4) Kelurahan Pancur,
- 5) Kelurahan Kalang Anyar,
- 6) Kelurahan Kuranji,
- 7) Kelurahan Panggung Jati,
- 8) Kelurahan Drangong,
- 9) Kelurahan Taktakan,
- 10) Kelurahan Umbul Tengah,
- 11) Kelurahan Lialang,
- 12) Kelurahan Taman Baru, dan
- 13) Kelurahan Cibendung

### **6. Kecamatan Walantaka**

- 1) Kelurahan Lebakwangi,
- 2) Kelurahan Cigoong,
- 3) Kelurahan Tegalsari,
- 4) Kelurahan Pasuluhan,
- 5) Kelurahan Pabuaran,
- 6) Kelurahan Walantaka,
- 7) Kelurahan Pengampelan,
- 8) Kelurahan Pipitan,
- 9) Kelurahan Kiara,
- 10) Kelurahan Pageragung,
- 11) Kelurahan Kalodran,
- 12) Kelurahan Kepuren,
- 13) Kelurahan Teritih, dan
- 14) Kelurahan Nyapah,



Secara astronomis Wilayah Kota Serang terbentang di antara  $5^{\circ} 99'$  –  $6^{\circ} 22'$  Lintang Selatan serta di sepanjang  $106^{\circ} 07'$  –  $106^{\circ} 25'$  Bujur Timur. Berdasarkan sistem koordinat UTM (*Universal Transfer Mercator*) Zona 48E wilayah Kota Serang terletak pada koordinat 618.000 m sampai dengan 638.600 m dari Barat ke Timur, serta pada 9.337.725 m sampai dengan 9.312.475 m dari Utara ke Selatan. Jika ditarik garis lurus dari utara ke selatan, maka jarak terpanjang yang didapat adalah sekitar 21,7 Km. Sementara itu jarak terpanjang dari Barat ke Timur adalah sekitar 20 Km. Letak wilayah Kota Serang secara geografis berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, sementara di bagian yang lain berbatasan dengan Kabupaten Serang.

Kota Serang memiliki peranan yang fundamental, selain merupakan pusat pemerintahan provinsi Banten, jarak dari Kota Jakarta yang hanya sekitar 70 km, menjadikan Kota Serang juga sebagai daerah alternatif dan penyangga (*hinterland*) Ibukota Negara. Relief topografi Kota Serang didominasi dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 500 mdpl. Pengaruh iklim tropis menghasilkan variasi temperatur dengan amplitudo yang tidak terlalu ekstrem. Suhu minimum sepanjang 2022 adalah  $20,04^{\circ}\text{C}$ , terjadi di bulan Juli, sedangkan suhu maksimum tercatat pada bulan Februari, sebesar  $35,60^{\circ}\text{C}$ . Suhu rata-rata harian tertinggi tercatat pada bulan April yaitu  $28,10^{\circ}\text{C}$  dan suhu rata-rata harian terendah pada bulan Juni sebesar  $27,00^{\circ}\text{C}$ . Sepanjang tahun 2022, di Kota Serang terjadi 173 hari hujan dengan rata-rata curah hujan sebesar 143,4 mm per bulan dan rata-rata suhu udara sebesar  $27,6^{\circ}\text{C}$ .

Kelembaban relatif terendah di Kota Serang pada tahun 2022 sebesar 36% terjadi pada bulan April. Kelembaban relatif tertinggi tercatat pada bulan April, yaitu 100%. Kelembaban relatif rata-rata terendah tercatat pada bulan Oktober, yaitu 76,6%. Sedangkan kelembaban relatif rata-rata tertinggi tercatat pada bulan Mei, yaitu 98%. Tekanan udara sekitar 1.006,2 h Pa; serta tingkat penyinaran matahari berkisar antara 39,73% per tahun. Tekanan udara terendah di Kota Serang pada tahun 2022 tercatat pada bulan Desember, yaitu 999,3 mb. Sedangkan tekanan udara tertinggi, tercatat di bulan Januari, yaitu



1.011,1 mb. Pada tahun 2022 di Kota Serang, curah hujan terendah tercatat pada bulan Agustus yaitu 31,3 mm<sup>3</sup>. Sementara curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Februari yaitu 283,2 mm<sup>3</sup>.

Dilihat dari proporsi cakupan penggunaan lahan Kota Serang pada tahun 2022, persentase penggunaan lahan paling rendah adalah untuk hutan yaitu sebesar 0,66%, sedangkan penggunaan lahan yang terbesar adalah untuk lahan pertanian, yaitu sebesar 69,75%. Sedangkan lahan yang digunakan untuk perumahan mencapai 20,62%.

Dengan luas wilayah mencapai 266,74 km<sup>2</sup>, Kota Serang dibagi atas 6 Kecamatan dan 67 Kelurahan sebagaimana tabel 1.1 berikut :

**Tabel 1.1**  
**Luas Wilayah Kota Serang Berdasarkan Kecamatan**

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Luas Kota (%)
1.	Serang	12	25,88	9,7
2.	Cipocok Jaya	8	31,54	11,82
3.	Kasemen	10	63,36	23,75
4.	Taktakan	13	47,88	17,95
5.	Walantaka	14	48,48	18,18
6.	Curug	10	49,60	18,59
<b>Jumlah</b>		<b>67</b>	<b>266,74</b>	<b>266,18</b>

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Serang

#### 1.4.2 KONDISI DEMOGRAFIS

Jumlah penduduk Kota Serang Tahun 2022 berjumlah 724.552 jiwa. Dari jumlah tersebut 368.808 jiwa (50,90%) adalah penduduk laki-laki dan 355.744 jiwa (49,10%) adalah penduduk perempuan, dengan kepadatan penduduk sebesar 2.638 jiwa/km<sup>2</sup> terlihat pada Tabel 1.2 dan Tabel 1.3 berikut :



**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Serang**  
**Tahun 2018 –2022**

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Cipocok Jaya	90.213	91.996	96.549	99.710	103.679
2	Curug	53.436	53.625	56.940	59.249	62.004
3	Kasemen	94.677	97.430	102.368	106.737	111.205
4	Serang	223.050	224.546	229.901	232.787	235.355
5	Taktakan	90.537	92.361	97.250	101.629	105.768
6	Walantaka	90.673	92.234	98.004	102.116	106.541
<b>Jumlah</b>		<b>642.586</b>	<b>652.192</b>	<b>681.012</b>	<b>702.228</b>	<b>724.552</b>

Sumber: Disdukcapil Kota Serang, 2023

**Tabel 1.3**  
**Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Serang**  
**Tahun 2018–2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
1	Jumlah Penduduk Tahun (t)	642.586	652.192	681.012	702.228	724.552	680.514
2	Jumlah Penduduk Tahun (t-1)	635.632	642.589	652.192	681.012	702.228	662.731
3	<b>Laju Pertumbuhan Penduduk (%)</b>	<b>1,09</b>	<b>1,49</b>	<b>4,42</b>	<b>3,12</b>	<b>3,18</b>	<b>2,68</b>

Sumber: Disdukcapil Kota Serang, 2023

**Tabel 1.4**  
**Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Serang**  
**Tahun 2018-2022**

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Tingkat Kepadatan Penduduk (Jiwa/km <sup>2</sup> )				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Cipocok Jaya	34,1	2.860	2.898	2.831	2.924	3.040
2.	Curug	38,96	1.077	1.078	1.461	1.521	1.591
3.	Kasemen	68,85	1.494	1.534	1.487	1.550	1.615
4.	Serang	26,55	8.618	8.667	8.659	8.768	8.865
5.	Taktakan	61,16	1.890	1.912	1.590	1.662	1.729
6.	Walantaka	36,56	1.870	1.879	2.681	2.793	2.914
<b>Rata-rata &amp; Jumlah</b>		<b>266,18</b>	<b>2.355</b>	<b>2.382</b>	<b>2.433</b>	<b>2.638</b>	<b>2.722</b>

Sumber : Disdukcapil Kota Serang, 2023





Dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin besarnya *sex ratio* penduduk Kota Serang pada tahun 2022 adalah 1,04. Hal ini berarti bahwa penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, dengan perbandingan 368.808 jiwa (50,90%) adalah penduduk laki-laki dan 355.744 jiwa (49,10%) adalah penduduk perempuan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.5**  
**Komposisi Penduduk Kota Serang Menurut Jenis Kelamin**  
**Tahun 2018-2022**

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio
2017	325.997	309.635	635.632	1,05
2018	328.797	313.789	642.586	1,05
2019	332.912	319.280	652.192	1,04
2020	346.829	334.183	681.012	1,04
2021	357.349	344.879	702.228	1,04
2022	368.808	355.744	724.552	1,04

Sumber: *Disdukcapil Kota Serang, 2023*

Komposisi penduduk Kota Serang menurut kelompok umur pada tahun 2022 terlihat pada Tabel 1.6:

**Tabel 1.6**  
**Komposisi Penduduk Kota Serang Menurut Kelompok Umur**  
**Tahun 2018-2022**

Kelompok Umur	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
0 – 4	53.622	54.994	58.410	59.555	63.362
5 – 9	55.796	63.247	68.557	69.859	71.500
10 – 14	53.549	56.459	63.757	65.512	66.860
15 – 19	59.733	41.716	48.873	52.109	53.462
20 – 24	63.091	62.151	63.260	63.690	64.484
25 – 29	60.168	62.172	63.833	66.099	67.299
30 – 34	57.481	59.870	60.675	61.255	63.331
35 – 39	54.199	55.534	56.105	58.688	58.601
40 – 44	49.228	50.984	51.328	51.402	54.234
45 – 49	42.869	74.023	44.500	47.333	47.781
50 – 54	33.175	35.814	36.582	37.750	40.145
55 – 59	24.186	25.846	25.654	27.458	28.753
60 – 64	16.097	17.191	18.463	18.676	20.037
65 – 69	9.564	11.118	10.339	11.433	12.179



Kelompok Umur	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
70 -74	4.927	5.514	5.553	5.887	6.538
75+	4.901	5.559	5.123	5.522	5.986
<b>Jumlah</b>	<b>642.586</b>	<b>652.192</b>	<b>681.012</b>	<b>702.228</b>	<b>724.552</b>

Sumber : Disdukcapil Kota Serang, 2023

Gambaran sebaran penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan di Kota Serang tahun 2022 terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.7**  
**Sebaran Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Di Kota Serang Tahun 2018-2022**

PENDIDIKAN	2018	2019	2020	2021	2022
Tidak Punya Ijazah SD	203.384	207.635	234.930	246.553	258.286
Tamat SD / Sederajat	181.157	177.972	173.220	172.673	171.903
SMP / Sederajat	83.044	82.649	83.504	85.477	87.300
SMA / Sederajat	130.885	137.449	140.939	146.605	153.140
Akademi/Diploma I/II/III/Sarjana Muda	11.198	11.462	11.652	11.811	12.052
Diploma IV / Strata I	29.826	31.743	33.325	35.452	37.919
Strata II	2.961	3.128	3.276	3.482	3.752
Strata III	131	154	166	175	200
<b>JUMLAH</b>	<b>642.586</b>	<b>652.192</b>	<b>681.012</b>	<b>702.228</b>	<b>724.552</b>

Sumber: Disdukcapil Kota Serang, 2023

Perkembangan Kota Serang sebagai Ibukota Provinsi Banten berdampak pada heterogenitas penduduknya, walaupun Kota Serang memiliki landasan paradigma dan perspektif agamis dalam menjalankan visi dan misinya, namun tetap menghargai agama dan keyakinan lain yang diakui oleh negara. Toleransi dari keberagaman kehidupan beragama telah tumbuh di Kota Serang, hal ini ditandai dengan berdampingannya mayoritas pemeluk Islam di Kota Serang dengan pemeluk-pemeluk agama lain, komposisi penduduk pemeluk agama di Kota Serang pada tahun 2022 terlihat pada (Tabel 1.8)



**Tabel 1.8**  
**Komposisi Penduduk Pemeluk Agama di Kota Serang**  
**Tahun 2018-2022**

No	Agama	2018	2019	2020	2021	2022
1	Islam	629.291	638.474	666.611	687.316	709.106
2	Kristen Protestan	7.651	8.003	8.530	9.008	9.470
3	Kristen Katolik	2.930	2.934	3.045	3.085	3.163
4	Hindu	261	246	273	293	308
5	Budha	2.449	2.532	2.541	2.512	2.491
6	Konghucu	0	2	11	14	14
7	Kepercayaan	4	1	1	-	-
<b>TOTAL JUMLAH</b>		<b>642.586</b>	<b>652.192</b>	<b>681.012</b>	<b>702.228</b>	<b>724.552</b>

Sumber: Disdukcapil Kota Serang, 2022

### 1.4.3 SUMBER DAYA APARATUR

Salah satu instrumen penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah aparatur dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Serang berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang Tahun 2022 sebanyak 4371 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1411 orang dan perempuan sebanyak 2960 orang, sebagaimana Tabel 1.9 berikut :

**Tabel 1.9**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022**

Ru ang	REKAP SELURUH PEGAWAI																JUMLAH	
	PNS								CPNS				PPPK					
	GOLON GAN I		GOLON GAN II		GOLONGA N III		GOLONGA N IV		GOLON GAN II		GOLONG AN III		GOLON GAN VII		GOLON GAN IX			
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
A	0	0	6	2	98	297	200	394			56	70					1411	2960
B	0	0	13	9	96	193	185	451			0	1						
C	1	0	42	15	188	388	29	16	11	18								
D	2	0	13	25	368	718	3	2										
E							0	0										
													1	0	99	361		
Jum lah	3	0	74	51	750	1596	417	863	11	18	56	71	1	0	99	361	4371	
	3		125		2346		1280		29		127		1		460			
	3754								156				461					

Sumber : BKPSDM Kota Serang, 2023



Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Serang berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana Tabel 1.10 berikut:

**Tabel 1.10**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022**

TINGKAT PENDIDIKAN	PNS		PPPK		SUB TOTAL		%
	L	P	L	P	L	P	
SD	1	0	0	0	1	0	0,02%
SLTP	12	0	0	0	12	0	0,27%
SLTA	49	32	0	0	49	32	1,85%
SLTA KEJURUAN	7	7	0	0	7	7	0,32%
Diploma I	2	4	0	0	2	4	0,14%
Diploma II	21	22	0	0	21	22	0,98%
Diploma III	57	142	1	0	58	142	4,58%
Diploma IV	12	100	0	0	12	100	2,56%
S-1	807	1931	99	361	906	2292	73,16%
S-2	336	361	0	0	336	361	15,95%
S-3	7	0	0	0	7	0	0,16%
<b>JUMLAH</b>	<b>1311</b>	<b>2599</b>	<b>100</b>	<b>361</b>	<b>1411</b>	<b>2960</b>	<b>100%</b>
	<b>3910</b>		<b>461</b>		<b>4371</b>		

Sumber : BKPSDM Kota Serang, 2023

Berdasarkan tabel di atas tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil Kota Serang yang memperoleh pendidikan Strata 1 menduduki peringkat pertama dengan 73,16%, disusul pendidikan Strata II sebesar 15,95%.

#### 1.4.4 SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Serang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, sebagai berikut :

**1. Sekretariat Daerah**, merupakan Sekretariat Daerah ipe B terdiri dari unit kerja yaitu :

- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
- Asisten Administrasi Umum.



2. **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** merupakan Sekretariat DPRD tipe B;
3. **Inspektorat** merupakan Inspektorat tipe B;
4. **Dinas Daerah**, yaitu:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
  - b. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman serta bidang pertanahan;
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja Pemukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Sub bidang ketentraman dan ketertiban umum serta sub bidang kebakaran;
  - f. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
  - g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
  - h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
  - i. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - k. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;



- l. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
  - m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
  - n. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata serta bidang kepemudaan dan olahraga;
  - o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
  - p. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan;
  - q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- 5. Badan Daerah, yaitu :**
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
  - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan;
  - d. Badan Pendapatan Daerah Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan;
  - e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik intensitas sedang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 6. Kecamatan, yaitu :**



- a. Kecamatan Serang dengan Tipe A;
- b. Kecamatan Cipocok Jaya dengan Tipe A,;
- c. Kecamatan Kasemen dengan Tipe A,;
- d. Kecamatan Curug dengan Tipe A,;
- e. Kecamatan Walantaka dengan Tipe A;
- f. Kecamatan Taktakan dengan Tipe A.

## 1.5 ISU STRATEGIS KOTA SERANG

Isu Strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah atau panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Atas dasar penelaahan terhadap dokumen-dokumen perencanaan nasional, Provinsi Banten dan Kota Serang, maka isu strategis pada Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

### 1. Geostrategis dan demografi Kota Serang

Sebagai ibu kota Provinsi Banten serta berada pada lintasan antar kota di wilayah Provinsi Banten dan lintasan antar Jawa-Sumatera, Kota Serang berpotensi menarik minat pendatang untuk tinggal di Kota Serang yang akan berpengaruh tidak hanya terhadap pertumbuhan penduduk, namun juga mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi dan lingkungan, khususnya dalam peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah, serta upaya penyediaan infrastruktur dasar. Kota Serang memiliki daya tarik alamiah yang dapat dioptimalkan untuk kepentingan pembangunan daerah di masa mendatang. Sebagai pusat aglomerasi bagi daerah sekitarnya, Kota Serang saat ini berkembang sebagai kota yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa bagi produk-produk dan komoditas yang dihasilkan kawasan *hinterland*.

### 2. Kota Metropolitan Serang

Pembangunan Kota Metropolitan Serang menjadi bagian dari kebijakan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang akan menjadikan Kota Serang yang lebih maju, cerdas dan berkelanjutan. Untuk membangun Kota Metropolitan Serang perlu upaya pembangunan menyeluruh yaitu pembangunan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, dan pemenuhan





infrastruktur wilayah, hal ini diperlukan dalam upaya mengurangi dampak yang kurang baik dari pembangunan Kota Metropolitan Serang. Namun demikian diyakini apabila pembangunan Kota Metropolitan Serang nantinya dapat meningkatkan daya saing Kota Serang di segala sektor pembangunan. Disamping itu didukung oleh beberapa proyek strategis Pemerintah Provinsi Banten di Kota Serang, diantaranya Sport Centre, Kampus Terpadu Untirta, dan pengembangan Danau Ciwaka.

### **3. Kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat**

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat berfokus pada pembangunan pendidikan dan kesehatan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dan penanggulangan permasalahan sosial yang masih menjadi permasalahan pembangunan di Kota Serang, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 yang berpengaruh pada seluruh sendi kehidupan baik perekonomian maupun pendidikan dan kesehatan.

### **4. Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah**

Peningkatan daya saing perekonomian daerah Kota Serang dimaksudkan untuk menjadikan Kota Serang memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif dengan daerah lain ataupun dalam menghadapi tantangan perekonomian regional, nasional dan global. Namun demikian hal tersebut akan memiliki tantangan yang besar akibat atau dampak pandemi COVID-19 dalam upaya pemulihan perekonomian.

Upaya peningkatan daya saing perekonomian daerah Kota Serang dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan sektor potensial, yaitu Pariwisata, Budaya, Perdagangan dan Jasa, UKM dan Koperasi, Pertanian, Ketahanan Pangan, Ekonomi kreatif, dan Investasi dengan peningkatan pengelolaan BUMD untuk pelayanan publik dan peningkatan potensi PAD. Selain itu, peningkatan daya saing perekonomian daerah dapat dicapai dengan penguatan fungsi kelitbangan dan sistem inovasi daerah yang berdaya guna dan berhasil guna.

Salah satu daya saing pariwisata Kota Serang adalah eksistensi Kawasan Cagar Budaya Keraton Surosowan Kesultanan Banten secara faktual memiliki potensi sebagai obyek dan destinasi wisata yang tinggi. Karenanya pengembangan dan pengelolaannya yang dilakukan secara profesional sebagai sebuah industri pariwisata, akan sangat menjanjikan di masa depan, tidak hanya bagi kepentingan pemerintah daerah namun juga untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.



## **5. Infrastruktur wilayah**

Peningkatan infrastruktur wilayah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kenyamanan masyarakat Kota Serang, yaitu peningkatan konektivitas wilayah (jalan dan jembatan), penanganan sampah, kemacetan, titik banjir dan/atau genangan air, drainase dan irigasi serta sarana prasarana perumahan dan permukiman.

## **6. Pengelolaan tata ruang, lingkungan hidup dan mitigasi bencana**

Pengelolaan tata ruang, lingkungan hidup dan mitigasi bencana dalam kerangka penataan Kota Serang yang berkelanjutan serta antisipasi terhadap potensi bencana dan perkembangan pengelolaan tata ruang wilayah. Salah satu diantara mitigasi bencana adalah mitigasi bencana non alam berupa pandemic COVID-19.

## **7. Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi**

Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi diarahkan pada rangka peningkatan pelayanan publik dan e-government dalam upaya memenuhi harapan dan ekspektasi masyarakat atas pelayanan publik serta pemerintahan yang baik dan bersih, dengan memfokuskan pada agenda: penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai standar, pembangunan Smart City, penyederhanaan birokrasi, fungsionalisasi aparatur sipil negara, penyelesaian peralihan aset daerah secara progresif, pembangunan Pusat Pemerintahan Kota, peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat, pemenuhan standar pelayanan publik, peningkatan implementasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kerja pemerintah, serta peningkatan tata kelola keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

### **1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Serang Tahun 2022 terdiri dari 4 (Empat) Bab yaitu :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Umum Daerah, Susunan Organisasi Perangkat daerah, Sumber Daya Manusia dan Isu-isu Strategis yang dihadapi Pemerintah Kota Serang serta Sistematika Penyusunan.



## **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Rencana strategis daerah, penetapan indikator kinerja utama, Perjanjian Kinerja tahun 2022, rencana aksi pelaksanaan tujuan dan sasaran strategis dan rencana anggaran tahun 2022.

## **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

### **a. Capaian Kinerja Organisasi**

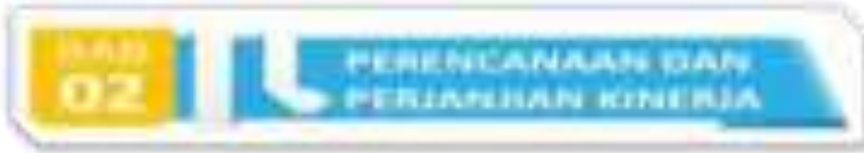
Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2022. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional (jika ada), menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, menganalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

### **b. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## **BAB IV. PENUTUP**

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kota Serang dalam kurun waktu tahun 2021 dan upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka peningkatan kinerjanya dimasa mendatang.



## 2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 – 2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018 – 2023 sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahun. Namun sejalannya waktu kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Kota Serang dengan berpedoman pada Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Adapun perubahan yang mempengaruhi substansi RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 lebih kepada kondisi terjadi perubahan yang mendasar, diantaranya mencakup terjadinya bencana, krisis ekonomi dan perubahan kebijakan nasional, antara lain penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat berupa peraturan perundang-undangan. Kebijakan tersebut mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, maupun organisasi perangkat daerah.

Hal lain yang mendasari perubahan RPJMD disebabkan kejadian bencana non alam pandemi COVID-19 sebagaimana telah ditetapkan sebagai bencana nasional yang berdampak terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian arah kebijakan dan target indikator kinerja makro, indikator kinerja utama dan program.

Alasan berikutnya yaitu hasil pengendalian dan evaluasi pada tahapan proses yang sudah berjalan menunjukkan perlu dilakukan perumusan kembali indikator kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan perubahan fungsi perangkat daerah atau SOTK dan juga adanya substansi yang belum terakomodir, seperti terkait kebijakan rencana pembentukan BUMD dan penyertaan modal sebagaimana mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah



(BUMD) perlu arah kebijakan yang merumuskan pendirian badan usaha milik daerah pada dokumen perencanaan.

Perencanaan pembangunan daerah yang dirumuskan secara terarah, efektif dan berkesinambungan dan diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah. Perumusan perencanaan sebagai penjabaran RPJMD tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang disusun untuk 5 (lima) tahun. Renstra merupakan proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

Sesuai dengan RPJMD Tahun 2018-2023, Kota Serang memiliki visi, yaitu :

#### 1. VISI

Berdasarkan kondisi Kota Serang, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 (lima) tahun mendatang, Walikota dan Wakil Walikota membuat Visi Kota Serang Tahun 2018-2023, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut:

#### **”TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA”**

Visi tersebut menggambarkan bahwa Kota Serang sebagai Kota **Peradaban** (*Civil Society*) yaitu kondisi pemerintahan dan masyarakat Kota Serang yang berciri:

1. Adanya toleransi (tenggang rasa) untuk tujuan kerukunan dan kedamaian;
2. Adanya *pluralism* yaitu sikap yang mau menerima dengan tulus ikhlas suatu kondisi warga Kota Serang yang majemuk.
3. Adanya keadilan sosial, bermakna setiap warga negara mendapatkan hak dan kewajibannya secara seimbang dalam kehidupan sosial, terjamin keadilan untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan penghidupan yang layak;



4. Adanya partisipasi sosial, yaitu setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk ikut serta dalam berpolitik dengan rasa tanggung jawab secara bersih tanpa adanya paksaan atau intimidasi dari pihak manapun;
5. Adanya demokratisasi yaitu sebuah proses dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi demi terciptanya warga Kota Serang yang menjunjung tinggi azas-azas demokrasi;
6. Adanya supremasi hukum, ditandai penegakan hukum yang seadil-adilnya terhadap warga Kota Serang tanpa pandang bulu, tidak tumpul ke atas tajam ke bawah;
7. Tersedianya ruang bebas publik, sebagai tempat bagi warga Kota Serang untuk melakukan aktivitas publiknya secara bebas dan bertanggung jawab seperti dalam hal berorganisasi, berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat termasuk mempublikasikannya kepada publik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Kota *Berdaya*, mengandung arti bahwa Kota Serang mampu menunjukkan keunggulan berkomparasi dan berkompetisi diberbagai bidang kehidupan. Kota Serang akan menjadi Kota Peradaban yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Serang.

Kota *Berbudaya*, mempunyai arti bahwa setiap perilaku kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, kearifan lokal, norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta diyakini sebagai nilai-nilai budi pekerti yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial sebagai identitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan visi diperlukan semangat baru dalam pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan nilai dasar Bangsa Indonesia dan masyarakat Kota Serang khususnya, yakni kegotongroyongan. Semangat baru tersebut tertuang dalam slogan: “**Aje Kendor Membangun Serang**”.

Makna slogan **Aje Kendor Membangun Serang** diartikan satu sikap yang terwujud dalam bentuk inisiatif dan penuh semangat untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam rangka membangun Kota Serang. Sikap ini diperlukan





untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan aparatur dan masyarakat akan kotanya. Melalui pernyataan ini akan timbul sikap kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kotanya dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal.

## 2 MISI

Untuk mewujudkan visi **"TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA"** dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan kebudayaan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya.
- 2) Meningkatkan Sarana Prasarana Daerah yang berwawasan Lingkungan, dengan memantapkan penataan kota, membangun infrastruktur dasar wilayah, melalui manajemen perencanaan ruang kota yang memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup dan kelestariannya.
- 3) Meningkatkan perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berdaya saing, dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, meningkatkan produktivitas, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan, menurunkan tingkat pengangguran dan memperluas lapangan kerja, melalui peningkatan daya saing daerah.
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan menghadirkan pemerintahan yang merakyat dan memiliki semangat perubahan yang didukung oleh teknologi informasi komunikasi (TIK) sebagai penggerak birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan bertanggung jawab, membangkitkan partisipasi warga kota Serang, dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang prima.





### 3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang berisikan program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dirumuskan dengan kriterianya mencakup : (a) hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan prioritas program kepala daerah terpilih, (b) hubungan yang kuat dengan analisis sumber daya daerah dan isu-isu strategik, (c) pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama lima tahun, dan (d) dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah.

Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan pembangunan Kota Serang menitik beratkan pada upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan perekonomian masyarakat dan infrastruktur serta pendayagunaan kondisi dan potensi yang dimiliki secara optimal guna peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Kota Serang sebagai kota peradaban dengan prioritas pembangunan pada Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023, yaitu :

1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
2. Peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah;
3. Peningkatan mutu lingkungan hidup, pengelolaan penataan ruang dan mitigasi bencana;
4. Peningkatan kualitas dan daya saing perekonomian daerah;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi.

Dengan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada pembahasan sebelumnya, dalam rangka mencapai sasaran pembangunan maka dirumuskan strategi ditiap sasaran daerah pada Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 yang terinci pada tabel berikut.



**Tabel 2.1**  
**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Serang Tahun 2018-2023**  
**VISI : Terwujudnya Kota Peradaban yang Berdaya dan Berbudaya**

TUJUAN DAERAH		SASARAN DAERAH		STRATEGI	
<b>MISI 1. MENGUATKAN PERADABAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI KEMANUSIAAN</b>					
1.1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya	1.1.1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1.1.1.1	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan
				1.1.1.2	Peningkatan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan masyarakat
				1.1.1.3	Peningkatan kualitas dan implementasi seni budaya lokal
		1.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.1.2.1	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat
				1.1.2.2	Pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
				1.1.2.3	Pengendalian pertumbuhan penduduk serta pelayanan keluarga berencana dan ketahanan keluarga
<b>MISI 2. MENINGKATKAN SARANA PRASARANA DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN</b>					
2.1	Terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah	2.1.1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	2.1.1.1	Peningkatan kapasitas dan kualitas sistem infrastruktur pengembangan kawasan dan wilayah, serta pendukung pengembangan perekonomian dan pelayanan publik
2.2	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	2.2.1	Meningkatnya pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.2.1.1	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, persampahan dan Ruang Terbuka Hijau
		2.2.2	Menurunnya risiko bencana dan meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	2.2.2.1	Peningkatan mitigasi dan penanggulangan bencana
<b>MISI 3. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING</b>					
3.1	Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi	3.1.1	Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat	3.1.1.1	Peningkatan daya saing perekonomian daerah dan pemulihan ekonomi melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat



TUJUAN DAERAH		SASARAN DAERAH		STRATEGI	
	keunggulan lokal daerah			3.1.1.2	Peningkatan pemantapan ketahanan pangan daerah
<b>MISI 4. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK</b>					
4.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi	4.1.1	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	4.1.1.1	Pengembangan sistem pemerintahan yang inovatif, efektif, dan efisien melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan
				4.1.1.2	Peningkatan kapasitas kecamatan dan kelurahan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023

## 2.2 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

Mengacu pada beberapa permasalahan serta memperhatikan permasalahan tantangan kedepannya, maka ditetapkan isu strategis RKP Kota Serang Tahun 2022 adalah :

1. Akses dan mutu pelayanan kesehatan serta Pendidikan;
2. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan masalah social;
3. Infrastruktur wilayah, pengendalian pemanfaatan ruang, lingkungan hidup dan mitigasi bencana;
4. Peningkatan perekonomian daerah;
5. Pandemi Covid-19;
6. Penguatan reformasi birokrasi.

Memperhatikan hasil evaluasi pembangunan serta permasalahan dan isu strategis, juga merujuk pada prioritas pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam RKP Tahun 2022 dengan tema **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”** dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 dengan tema **“Pemantapan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”**, maka ditetapkan tema pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2022 adalah **“Peningkatan Daya Saing Menuju Percepatan Pemulihan Ekonomi”**, mengandung kata kunci yang dibangun sebagai berikut :

1. **Peningkatan Daya Saing:** Peningkatan Daya Saing lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan dan tingkat



kesejahteraan yang tinggi serta berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional dimana hal ini sangat tergantung pada iklim usaha yang kondusif, keunggulan komparatif (*comparative advantage*), dan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) yang dimiliki Kota Serang.

2. ***Percepatan Pemulihan Ekonomi***: Percepatan Pemulihan ekonomi mengandung arti bahwa proses, upaya dan tindakan, keberpihakan dan pemberdayaan serta pembangunan di Kota Serang sebagai upaya pemerintah Kota Serang dalam mempercepat penanganan dan pemulihan kehidupan masyarakat khususnya di bidang perekonomian sebagai dampak pandemic COVID-19 dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Serang sebagai kota peradaban.

Prioritas pembangunan Kota Serang Tahun 2022 sebagaimana berikut:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengarusutamaan gender;
2. Peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar;
3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan tata ruang dan mitigasi bencana;
4. Pengembangan potensi seni budaya dan penguatan ekonomi yang berbasis sumber daya unggulan daerah;
5. Penurunan kemiskinan, pengangguran dan penanggulangan masalah sosial;
6. Penguatan reformasi birokrasi.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 memiliki 7 Prioritas dan 10 Fokus Pembangunan, yaitu :

1. Industri;
2. Pariwisata;
3. ketahanan pangan;
4. UMKM;
5. Infrastruktur;
6. Transformasi digital;
7. Pembangunan rendah karbon;
8. Reformasi perlindungan sosial;
9. Reformasi pendidikan dan ketrampilan;
10. Reformasi kesehatan.



Dari tujuh prioritas pembangunan nasional, keterkaitan yang utama lebih pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan daya saing perekonomian daerah dan penanganan masalah sosial. Fokus pembangunan sesuai prioritas pembangunan Kota Serang Tahun 2022 sebagaimana berikut :

**Tabel 2.2**  
**Penataan Fokus Pembangunan Berdasarkan Prioritas RKPD Kota Serang Tahun 2022**

<b>PRIORITAS RKPD</b>	<b>FOKUS PEMBANGUNAN</b>
<b>Peningkatan kualitas sumber daya manusia</b>	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan berupa Ruang Kelas, Perpustakaan, Laboratorium, Air bersih dan Sanitasi
	peningkatan kerjasama pendidikan
	Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan
	PAUD dan pendidikan masyarakat
	Pengembangan RSUD
	Peningkatan pelayanan dan sarana prasarana kesehatan
	Peningkatan sumberdaya kesehatan (tenaga medis dan paramedis)
	Peningkatan upaya promotif, preventif dan kuratif
	Pengendalian penduduk dan pelayanan KB
	Pengarustamaan gender dan perlindungan anak
	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga serta Pembinaan kepemudaan dan olahraga
	Peningkatan minat baca dan budaya literasi
<b>Peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar</b>	Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan
	Pembangunan dan peningkatan gedung pemerintahan dan fasilitas umum
	Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi
	Peningkatan drainase dan pengendalian genangan air
	Peningkatan dan penataan Ruang Terbuka Hijau
	Penataan Kawasan Kumuh dan RTLH
	Pembangunan jalan lingkungan, sarana air bersih dan sanitasi
	Pengelolaan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) Perumahan
	Peningkatan manajemen lalu lintas dan penanganan kemacetan
	Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU)
	Penataan Kawasan Kesultanan Banten
	Infrastruktur smart city
Pengelolaan sampah dan limbah B3	



<b>PRIORITAS RKPD</b>	<b>FOKUS PEMBANGUNAN</b>
<b>Peningkatan mutu lingkungan hidup, pengelolaan tata ruang dan mitigasi bencana</b>	Pengendalian pencemaran dan kerusakan LH
	Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang
	Mitigasi dan penanganan bencana
<b>Peningkatan daya saing perekonomian daerah dan penanganan masalah sosial</b>	Pengelolaan dan implementasi nilai-nilai budaya daerah
	Peningkatan sarana prasarana, produksi, promosi dan pemasaran hasil Pertanian
	Pemantapan ketahanan pangan
	Penataan Pasar dan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL)
	Stabilisasi harga dan pasokan barang
	Revitalisasi Koperasi dan peningkatan daya saing UKM
	Pengembangan dunia usaha dan ekonomi kreatif
	Penataan dan promosi destinasi wisata
Peningkatan kerja sama dan iklim investasi daerah	
<b>Penurunan kemiskinan, pengangguran dan penanggulangan masalah social</b>	Penanganan dan pemberdayaan PMKS
	Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar
	Partisipasi dan kualitas angkatan kerja serta perluasan kesempatan kerja
<b>Penguatan reformasi birokrasi</b>	Peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur
	Peningkatan akuntabilitas, penataan kelembagaan dan kinerja perangkat daerah
	Peningkatan inovasi daerah dan pemanfaatan hasil kelitbangan
	Peningkatan fungsi pengawasan
	Peningkatan pelayanan publik melalui Implementasi e-government

### 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Serang Tahun 2022 mengacu pada dokumen Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2022, dan dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022. Pemerintah Kota Serang telah menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut :



**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

**Misi 1 : Menguatkan Peradaban Yang Berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan**

No.	Tujuan & Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target 2022
1	2	3	4	5
1.	<b>Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	<b>Poin</b>	<b>72,81</b>
	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,86
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,92
	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,34

**Misi 2 : Meningkatkan Sarana Prasarana Daerah Yang Berwawasan Lingkungan**

No.	Tujuan & Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target 2022
1	2	3	4	5
1.	<b>Terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah</b>	<b>Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah</b>	<b>Poin</b>	<b>66</b>
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah	%	74,83
2.	<b>Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan</b>	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>	<b>Poin</b>	<b>50,45</b>
	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Penanganan Timbunan Sampah	%	75
		Ketersediaan RTH	%	3,5
	Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Resiko Bencana	Poin	110

**Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat Yang Berdaya Saing**

No.	Tujuan & Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target 2022
1	2	3	4	5





1.	Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan local daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,25
	Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat	Tingkat inflasi daerah	%	3
		Indeks daya beli	Poin	79,54
		PDRB Per kapita	Juta (Rp)/Jiwa	49,14
		Indeks ketimpangan regional Williamson	Poin	0,348
		Angka Kemiskinan	%	5,86
		Tingkat pengangguran terbuka	%	9,06

**Misi 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**

No.	Tujuan & Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target 2022
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	Poin	61,00
	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	79,00
		Nilai LPPD Kota	Poin	34.550
		Hasil Evaluasi AKIP	Poin	62
		Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Kategori	WTP

**2.4 PROGRAM DAN RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan pengejawantahan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimana program dan kegiatan diterjemahkan dalam kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2022. Pada APBD Perubahan Kota Serang Tahun Anggaran 2022, komposisi belanja Kota Serang sebagai penunjang program dan kegiatan sebagai berikut:



**Tabel 2.4**  
**Rencana Belanja Pemerintah Kota Serang Tahun 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)		%
		Sebelum	Sesudah	
1.	Belanja Operasi	1.226.357.231.570	1.315.400.505.424	85,44
2.	Belanja Modal	188.936.364.785	214.797.121.573	13,95
3.	Belanja Tak Terduga	8.500.000.000	9.274,995,210	0,61
<b>Jumlah</b>		<b>1.463.793.596.355</b>	<b>1.539.472.622.207</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPKAD Kota Serang, 2022

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	%	Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)	%
1.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	133.878.441.042	9,15	159.317.960.865	10,35
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	54.755.760.041	3,74	94.655.191.666	6,15
3.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	234.561.781.593	16,02	265.935.954.865	17,27
4.	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	37.528.660.756	2,56	45.181.965.615	2,93
5.	Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatkan Ketangguhan terhadap Bencana	3.881.999.253,00	0,26	3.839.352.000	0,25
6.	Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat	20.214.644.694	1,38	20.387.535.167	1,32
7.	Meningkatnya Kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah	978.972.308.976	66,88	950.154.662.029	61,72
<b>Jumlah</b>		<b>1.463.793.596.355</b>	<b>100</b>	<b>1.539.472.622.207</b>	<b>100</b>

Sumber: BPKAD Kota Serang, 2022 (diolah)



**Tabel 2.6**  
**Rencana Anggaran Per Program Tahun 2022**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)		OPD
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
1	2	3		4
1	Program Pengelolaan Pendidikan	108.129.475.757	132.170.583.983	Dindikbud
2	Program Pengembangan Kurikulum	75.000.000	75.000.000	Dindikbud
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6.603.720.050	7.029.337.050	Dindikbud
4	Program Pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan	1.892.206.000	1.589.995.750	Disporapar
5	Program Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	11.293.660.900	12.106.677.400	Disporpar
6	Program Pembinaan Perpustakaan	175.000.000	175.000.000	DPK
7	Program Pengembangan Kebudayaan	3.804.378.335	3.801.366.682	Dindikbud
8	Program Pembinaan Sejarah	1.405.000.000	1.870.000.000	Dindikbud
9	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	350.000.000	350.000.000	Dindikbud
10	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	52.470.945.791	83.446.365.916	Dinas Kesehatan
11	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	218.820.000	2.280.490.000	Dinas Kesehatan
12	Program Peningkatan Ketersediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	236.000.000	464.542.000	Dinas Kesehatan
13	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	255.418.750	441.645.250	Dinas Kesehatan
14	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	512.875.500	706.875.500	DP3AKB
15	Program Perlindungan Perempuan	137.000.000	291.295.000	DP3AKB
16	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	330.000.000	330.000.000	DP3AKB
17	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	292.000.000	604.355.000	DP3AKB
18	Program Pemenuhan Hak Anak	81.000.000	181.110.000	DP3AKB
19	Program Perlindungan Khusus Anak	120.775.000	1.733.268.000	DP3AKB
20	Program Pengendalian Penduduk	100.925.000	4.175.245.000	DP3AKB
21	Program Pembinaan Keluarga Berencana	52.470.945.791	83.446.365.916	DP3AKB
22	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	218.820.000	2.280.490.000	DP3AKB
23	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	3.765.900.000	5.866.256.384	DPUPR
24	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air Minum	2.282.723.122	5.465.783.622	DPUPR
25	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air Limbah	925.455.650	4.756.007.650	DPUPR
26	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	14.875.000.000	19.902.034.484	DPUPR
27	Program Penataan Bangunan Gedung	48.068.716.550	44.113.600.899	DPUPR
28	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	20.463.287.000	19.148.489.500	DPUPR



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)		OPD
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
1	2	3		4
29	Program Penyelenggaraan Jalan	62.395.532.044	83.338.770.571	DPUPR
30	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	348.480.000	309.473.000	DPUPR
31	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.266.849.320	1.172.794.100	DPUPR
32	Program Pengembangan Perumahan	2.405.000.000	1.346.170.000	DPKP
33	Program Kawasan Permukiman	10.663.933.733	13.789.029.583	DPKP
34	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	10.434.395.010	11.207.825.810	DPKP
35	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	27.611.736.658	32.855.865.758	DPKP
36	Program Redistribusi Tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absente	237.831.000	187.831.000	DPKP
37	Program Pengelolaan Tanah Kosong	389.964.000	336.204.000	DPKP
38	Program Penatagunaan Tanah	597.391.000	457.143.000	DPKP
39	Program Aplikasi Informatika	1.077.650.000	918.250.000	Diskominfo
40	Program Pengendalian Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	6.765.462.500	5.431.607.000	Dinas Perhubungan
41	Program Pengelolaan Pelayaran	19.895.574.006	15.241.918.504	Dinas Perhubungan
42	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	412.349.750	396.251.750	DLH
43	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1.525.431.655	1.477.580.781	DLH
44	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	224.631.416	143.650.462	DLH
45	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	94.000.000	97.281.000	DLH
46	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	89.126.141	74.126.141	DLH
47	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	90.000.000	88.860.000	DLH
48	Program Pengelolaan Persampahan	27.840.211.798	35.576.905.485	DLH
49	Pengendalian Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHAYATI)	7.252.909.996	7.327.309.996	DLH
50	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Non Kebakaran	2.330.304.000,00	2.395.335.000	Satpol PP
51	Program Penanggulangan Bencana	1.551.695.253,00	1.444.017.000	BPBD
52	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	61.940.000	61.940.000	DINKOPUKM INDAG
53	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	397.971.735	548.531.735	DINKOPUKM INDAG
54	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	71.145.000	71.145.000	DINKOPUKM INDAG



NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)		OPD
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
1	2	3		4
55	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	152.520.000	352.920.000	DINKOPUKM INDAG
56	Program Pengembangan UMKM	221.415.000	221.415.000	DINKOPUKM INDAG
57	Program Perizinan Pendaftaran Perusahaan	19.083.000	19.083.000	DINKOPUKM INDAG
58	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.639.275.823	1.018.929.950	DINKOPUKM INDAG
59	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	284.579.280	556.577.530	DINKOPUKM INDAG
60	Program Pengembangan Ekspor	1.158.176.650	1.079.427.250	DINKOPUKM INDAG
61	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	224.013.000	224.013.000	DINKOPUKM INDAG
62	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	255.465.000	223.945.000	DINKOPUKM INDAG
63	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	60.000.000	49.670.000	DKP3
64	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	299.102.500	1.430.582.500	DKP3
65	Program Penanganan Kerawanan Pangan	100.000.000	100.000.000	DKP3
66	Program Pengawasan Keamanan Pangan	63.647.500	57.887.500	DKP3
67	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	109.706.750	564.476.750	DKP3
68	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	98.593.250	96.943.250	DKP3
69	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	139.750.000	84.750.000	DKP3
70	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	619.780.000	837.481.000	DKP3
71	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	125.620.000	235.231.220	DKP3
72	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	181.500.000	150.658.484	DKP3
73	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	13.088.388	14.560.400	DKP3
74	Program Penyuluhan Pertanian	391.200.000	336.333.640	DKP3
75	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Parawisata	923.448.000	780.351.000	Disporapar
76	Program Pemasaran Pariwisata	637.493.000	491.876.000	Disporapar
77	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1.961.782.560	715.399.500	Disporapar
78	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan ekonomi Kreatif	153.267.940	617.307.940	Disporapar
79	Program Pengembangan iklim Penanam Modal	179.542.250	151.138.500	DPMPTSP
80	Program Promosi Penanaman Modal	289.572.222	219.586.222	DPMPTSP





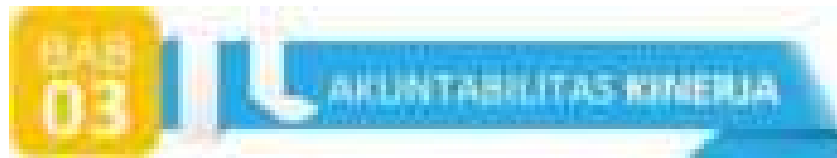
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)		OPD
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
1	2	3		4
81	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	152.205.000	545.599.000	DPMPTSP
82	Program Pemberdaya Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.249.746.712	1.374.746.712	DP3AKB
83	Program Pemberdayaan Sosial	188.935.000	188.935.000	Dinas Sosial
84	Program Rehabilitasi Sosial	1.591.388.400	1.591.388.400	Dinas Sosial
85	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	4.626.365.000	3.585.549.500	Dinas Sosial
86	Program Penanganan Bencana	360.480.000	360.480.000	Dinas Sosial
87	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	45.000.000	45.000.000	Dinas Sosial
88	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	559.772.750	556.490.250	Disnakertrans
89	Program Penempatan Tenaga Kerja	286.826.984	553.993.934	Disnakertrans
90	Program Hubungan Industrial	172.096.000	134.541.000	Disnakertrans
91	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	149.150.000	138.650.000	Disnakertrans
92	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	11.890.536.235	11.935.440.225	Sekretariat Daerah
93	Program Perekonomian dan Pembangunan	3.168.680.608	3.121.579.661	Sekretariat Daerah
94	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	829.569.990.183	801.266.441.552	SEMUA OPD
95	Program Informasi dan Komunikasi Publik	8.135.307.679	8.057.916.679	Diskominfo
96	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	350.646.750	317.437.750	Diskominfo
97	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	112.728.750	80.151.187	Diskominfo
98	Program Pendaftaran Penduduk	578.000.000	578.000.000	Disdukcapil
99	Program Pencatatan Sipil	455.184.750	458.184.750	Disdukcapil
100	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	720.132.250	723.132.250	Disdukcapil
101	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	123.322.500	123.322.500	Disdukcapil
103	Program Pelayanan Penanaman Modal	273.999.960	263.215.960	DPMPTSP
104	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	344.938.559	315.560.500	DPMPTSP
105	Program Pengelolaan Arsip	504.378.500	446.695.700	DPK
106	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	264.816.000	258.016.000	DPK
107	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	41.593.079.677	42.218.175.494	Sekretariat DPRD
108	Program Kepegawaian Daerah	2.455.115.500	2.455.765.500	BKPSDM
109	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	3.058.507.000	3.058.507.000	BKPSDM
110	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.391.345.000	1.777.036.250	Inspektorat
111	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.094.329.000	1.084.433.000	Inspektorat

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)		OPD
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
1	2	3		4
112	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.600.000.000	1.938.273.400	Bappeda
113	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.074.421.450	3.777.356.500	Bappeda
114	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.195.421.618	1.077.435.922	Bappeda
115	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	7.012.399.850	7.195.000.350	BPKAD
116	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.411.687.658	3.108.451.658	BPKAD
117	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.432.010.066	7.802.569.908	Bapenda
118	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.903.696.000	4.911.946.000	Satpol PP
119	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.188.490.074	1.101.830.074	Kecamatan
120	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	36.902.936.619	35.276.529.099	Kecamatan
121	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	18.810.000	18.810.000	Kecamatan
122	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.698.390.216	1.710.440.636	Kecamatan
123	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	550.000.000	550.000.000	Kesbangpol
124	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengemabangan Etika serta Budaya Politik	1.501.458.524	1.501.458.524	Kesbangpol
125	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, sosial dan Budaya	83.500.000	83.500.000	Kesbangpol
126	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik sosial	1.314.048.000	1.562.048.000	Kesbangpol
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.463.793.596.355</b>	<b>1.539.472.622.207</b>	





Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kota Serang dilakukan secara berkala triwulanan dan tahunan dengan sistem desk imbal balik yang dilaksanakan oleh unsur perencanaan, keuangan, pengawasan serta pengendalian pembangunan.

Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Serang untuk mewujudkan sebagai Kota Peradaban yang Berdaya dan Berbudaya. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Serang tersebut menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Nilai Interval	Kinerja Pelayanan
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi dengan cara perhitungan sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :



$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{target}} \times 100 \%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target} - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

### 3.1 CAPAIAN KINERJA KOTA SERANG

Dalam laporan ini, Pemerintah Kota Serang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan RPJMD 2018-2023 maupun RKPD Perubahan Tahun 2022. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Serang Tahun 2022 telah ditetapkan 5 (lima) tujuan dengan 5 (lima) indikator kinerja serta 7 (tujuh) sasaran dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Indikator Kinerja Sasaran Strategis**

1.	Sasaran 1	Meningkatnya Derajat Pendidikan masyarakat	:	2 indikator
2.	Sasaran 2	Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat	:	1 indikator
3.	Sasaran 4	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah	:	1 indikator
4.	Sasaran 4	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	:	2 indikator
5.	Sasaran 5	Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana	:	1 indikator
6.	Sasaran 6	Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat	:	6 indikator
7.	Sasaran 7	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	:	4 indikator

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Serang pada Tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:



**Tabel 3.3**  
**Capaian Pengukuran Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Tahun 2022		Kinerja Pelayanan
					Realisasi	%	
1	2	3	5	6	7	8	9
<b>Misi 1: Menguatkan Peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan</b>							
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	72,81	72,98	100,23	Sangat tinggi
	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,86	8,90	100,45	Sangat tinggi
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,92	12,81	99,15	Sangat tinggi
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,34	68,54	100,29	Sangat tinggi
<b>Misi 2 : Meningkatkan sarana prasarana daerah yang berwawasan lingkungan</b>							
	Terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah	Poin	66,00	62,77	95,11	Sangat tinggi
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah	%	74,83	74,30	99,29	Sangat tinggi
	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	50,45	54,37	107,77	Sangat tinggi
	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Penanganan Timbunan Sampah	%	75	55,72	74,29	Sedang
		Ketersediaan RTH	%	3,5	3,03	86,60	Tinggi
	Menurunnya resiko bencana dan meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	Point	110	156,20	58,00	Rendah
<b>Misi 3 : Meningkatkan perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berdaya saing</b>							
	Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,25	4,71	89,71	Tinggi
	Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat	Tingkat inflasi daerah	%	3	7,22	-40,67	Sangat Rendah
		Indeks daya beli	Poin	79,54	79,78	100,30	Sangat tinggi
		PDRB Per kapita	Rp Juta/Jiwa	49,14	50,98	103,74	Sangat tinggi
		Indeks Gini	Poin	0,348	0,354	98,28	Sangat tinggi
		Angka Kemiskinan	%	5,86	5,94	98,63	Sangat Tinggi
		Tingkat pengangguran terbuka	%	9,06	8,17	109,82	Tinggi



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG

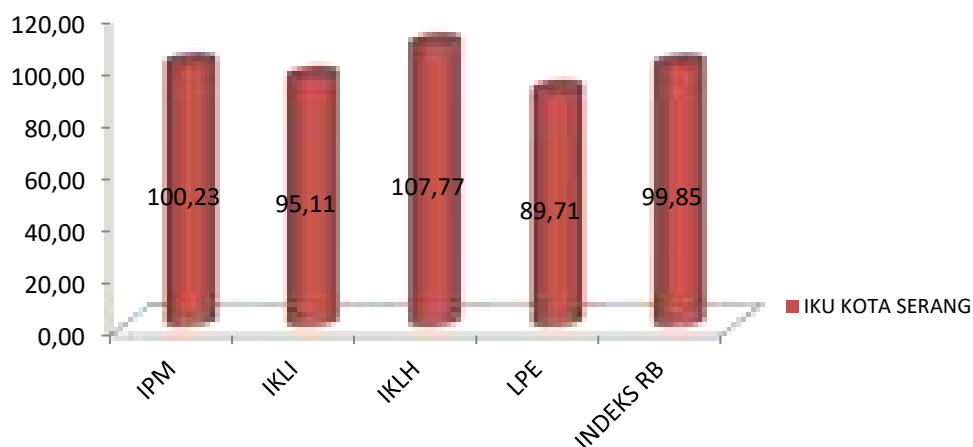
Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Tahun 2022		Kinerja Pelayanan
					Realisasi	%	
1	2	3	5	6	7	8	9
Misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik							
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	Poin	61	60,91	99,85	Sangat Tinggi
	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	79	78,61	99,51	Sangat tinggi
		Nilai LPPD Kota	Poin	34.550	34.365*	99,46	Sangat Tinggi
		Hasil Evaluasi AKIP	Poin	62	59,04	95,23	Sangat Tinggi
		Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Kategori	WTP	WTP*	100	Sangat Tinggi
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>						<b>89,78</b>	<b>Tinggi</b>

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Serang (Hasil Olahan), 2023

Keterangan \* : Data Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas bahwa hasil dari capaian tersebut memperoleh rata-rata capaian kinerja pelayanan sebesar 89,78 % dengan nilai **Tinggi** dengan menghitung capaian kinerja Nilai LPPD dan hasil laporan keuangan pemerintah daerah nilai tahun 2021.

**Grafik 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Tujuan Pemerintah Kota Serang Tahun 2022**



Sumber : Bagian Organisasi dan RB Setda Kota Serang, Tahun 2023 (diolah)



Berdasarkan grafik di atas bahwa capaian indikator kinerja tujuan Pemerintah Kota Serang pada tahun 2022 ada 4 indikator mencapai sesuai dengan target yang ditetapkan dengan kategori kinerja *Sangat Tinggi* yaitu indeks pembangunan manusia, indeks kualitas layanan infrastruktur, indeks kualitas lingkungan hidup dan Indeks Reformasi Birokrasi sesuai dengan target yang ditetapkan sedangkan 1 indikator dengan capaian kinerja sebesar 89,71% dengan kategori kinerja *Tinggi* yaitu laju pertumbuhan ekonomi..

**Tabel 3.4**  
**Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis**  
**Pemerintah Kota Serang Tahun 2022**

No	Predikat	Rata-rata % Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat Tinggi	91 % ≤ 100 %	16
2	Tinggi	76 % ≤ 90 %	3
3	Sedang	66 % ≤ 75 %	1
4	Rendah	51 % ≤ 65 %	1
5	Sangat Rendah	≤ 50 %	1
<b>Jumlah</b>			<b>22</b>

Untuk mewujudkan Kota Serang yang berdaya dan berbudaya sesuai dengan Visi RPJMD 2018-2023, disusunlah proses bisnis yang berisi uraian proses inti, pendukung dan manajemen. Berikut disajikan bagan proses bisnis Pemerintah Kota Serang.



**Gambar 3.1** Peta Proses Bisnis Kota Serang

Berdasarkan proses bisnis yang sudah disusun, selanjutnya dijabarkan ke dalam perangkat daerah yang menjadi penanggung jawab untuk mewujudkan



tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota Serang. Berikut disajikan bagan *Crosscutting* yang dimaksud:



**Gambar 3.2 Crosscutting untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Strategis Pemerintah Kota Serang**

Adapun analisis capaian kinerja dari semua indikator Pemerintah Kota Serang pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

### **1. TUJUAN STRATEGIS 1**

**Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya”**



*Kunjungan Ke Paud Link. Pekijing Taktakan*



*Pemberian beasiswa kepada anak yang berprestasi*

**Gambar 3.3. Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Mewujudkan Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya**

Salah satu Indikator Kinerja untuk mewujudkan tujuan strategis ini adalah Indeks Pembangunan Manusia sebagai upaya untuk mencapai misi pertama yang





ditetapkan dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 yaitu **“Menguatkan peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan”**. Pencapaian misi ini didukung oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai Perangkat Daerah utama.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Serang tahun 2022 tercapai sebesar 72,98 meningkat sebesar 0,54 point dari tahun 2021 sebesar 72,44 dengan capaian kinerja sebesar 100,23% kriteria sangat tinggi. Hasil pengukuran kinerja Indeks Pembangunan Manusia terlihat sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Capaian Pengukuran Kinerja Indeks Pembangunan Manusia**  
**Tahun 2022**

No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja Pelayanan
1.	Indeks Pembangunan Manusia		Poin	72,81	72,98	100,23	Sangat tinggi

Sumber : BPS Kota Serang, 2023

IPM Provinsi Banten tahun 2022 sebesar 73,32 lebih tinggi dari IPM Nasional sebesar 72,91 seperti terlihat dalam tabel 3.6 dan grafik 3.2 berikut:

**Tabel 3.6**  
**Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2016-2022**

NO	IPM	TAHUN						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nasional	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91
2	Banten	70,96	71,42	71,95	72,44	72,45	72,72	73,32
3	Kota Serang	71,09	71,31	71,68	72,1	72,16	72,44	72,98

Sumber : BPS Kota Serang, 2023

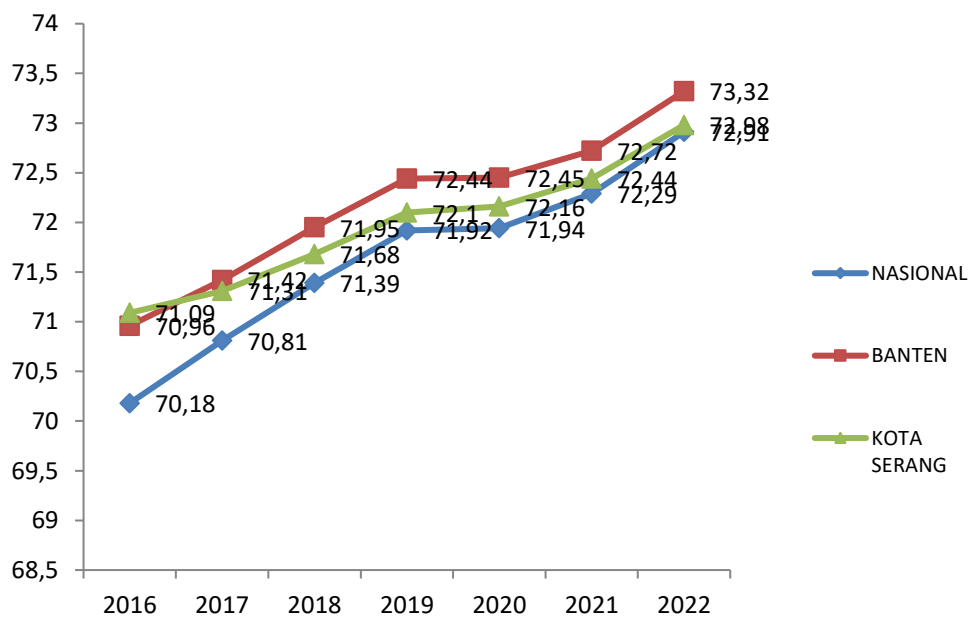
Walaupun setiap tahun nilai IPM Kota Serang terus meningkat dimana Tahun 2016 sebesar 71,09, meningkat menjadi 72,98 pada Tahun 2022, namun capaian tersebut masih tertinggal dari beberapa kabupaten/kota di Provinsi



Banten atau bahkan lebih rendah dari rata-rata IPM Provinsi Banten pada Tahun 2022 yang sebesar 73,32.

Pada grafik di bawah terlihat pertumbuhan IPM Kota Serang dari tahun 2016-2022 mengalami peningkatan walaupun belum optimal bahkan cenderung lebih rendah dari laju pertumbuhan IPM Nasional dan Provinsi Banten, walaupun pengecualian laju pertumbuhan IPM Kota Serang Tahun 2022 yang sebesar 0,07 point lebih tinggi dari laju pertumbuhan IPM Nasional dan lebih rendah dari laju pertumbuhan IPM Provinsi Banten yang sebesar 0,34 point. Hal ini menggambarkan bahwa peningkatan pertumbuhan kualitas sumber daya manusia di Kota Serang pada tahun 2022 berada di antara rata-rata pertumbuhan kualitas sumber daya manusia secara nasional dan Provinsi Banten.

**Grafik 3.2**  
**Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2016-2022**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Pertumbuhan capaian dan target yang tertuang dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 Kota Serang tercantum dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.7**  
**Indeks Pembangunan Manusia dalam Perubahan RPJMD 2018-2023**



No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja					Target Kinerja	Kondisi Akhir RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,68	72,1	72,16	72,44	72,98	73,09	73,09	

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Serang 2018-2023

Berdasarkan tabel di atas sampai dengan tahun 2022 capaian IPM sebesar 99,85% atau sebesar 0,11 point dari target di penghujung tahun RPJMD. Adapun permasalahan yang terjadi dalam pencapaian indeks pembangunan manusia ini berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia Kota Serang antara lain:

a. Belum optimalnya akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, yaitu :

- 1) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar dan kesetaraan, dimana capaian untuk Harapan Lama Sekolah sebesar 12,81 Tahun (Tahun 2022), Angka Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8,9 persen (Tahun 2022), APM SD Tahun 2022 sebesar 100% sedangkan APM SMP Tahun 2022 sebesar 99,98%;
- 2) Belum maksimalnya sarana dan prasarana penunjang layanan pendidikan dasar, diantaranya gedung SD/MI berkondisi baik sebesar 80,04 persen dan gedung SMP/MTs berkondisi baik sebesar 88,04 persen pada Tahun 2022;
- 3) Jumlah dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan belum memenuhi standar, sebagai gambaran rasio rata-rata jumlah guru SD terhadap jumlah murid SD per kelas sebesar 1:49 dan untuk RGM sekolah menengah sebesar 1:44 (standar 1:32).

b. Masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat, yaitu :

- 1) Angka Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 2022 sebesar 68,54 tahun, dibawah rata-rata Provinsi Banten sebesar 70,39 tahun;
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan untuk akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- 3) Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat;
- 4) Masih ditemukannya kasus Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), gizi buruk (stunting) dan kasus penyakit



menular, yaitu pada Tahun 2022 masih ditemukan jumlah kasus AKI sebanyak 20 kasus meningkat dari kasus pada tahun 2021 sebanyak 19 kasus, AKB pada Tahun 2022 sebanyak 32 kasus (0,253 per 1000 kelahiran hidup) sedangkan tahun 2021 sebanyak 13 Kasus ( 0,10 per 1000 kelahiran hidup), jumlah kasus gizi buruk pada Tahun 2022 sebanyak 311 kasus meningkat jika dibandingkan tahun 2021 hanya sebesar 112 kasus atau 0,11 persen dan kasus stunting ditemukan sebanyak 1.732 kasus meningkat dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 1.351 kasus;

- 5) Masih belum idealnya jumlah tenaga dokter dan paramedik, yaitu rasio medis (dokter dan dokter gigi) per 1000 penduduk sebesar 0,50 dari 351 dokter untuk melayani penduduk berjumlah 702.228 orang dan rasio paramedis (Bidan dan Perawat) per 1000 penduduk sebesar 2,67 dari 1.875 paramedis untuk melayani penduduk sejumlah 702.228 orang pada Tahun 2022;
  - 6) Terjadinya pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat Kota Serang dikarenakan penyebaran COVID-19 yang begitu tinggi dan berpotensi pada kualitas kesehatan masyarakat.
- c. Belum optimalnya pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
  - d. Belum optimalnya cakupan pelayanan perlindungan perempuan dan anak, yang tergambar dari masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, hal ini dikarenakan belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak.
  - e. Masih rendahnya peranan pemuda dalam pembangunan yang disebabkan diantaranya oleh masih rendahnya pembinaan serta sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga.
  - f. Belum optimalnya pelestarian dan pemanfaatan nilai budaya daerah yang disebabkan oleh belum optimalnya pelestarian dan implementasi seni dan budaya di masyarakat.

Tujuan daerah tersebut ditunjang dengan sasaran strategis pembangunan Kota Serang sebagai berikut:

**a. Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat**



Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki daerah tersebut. Pencapaian sasaran ini didukung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai Perangkat Daerah utama.



*Meninjau Perpustakaan di Link. Pekijing Taktakan*



*Pemagaran SMPN 27*



*Kunjungan Siswa SD ke Perpustakaan Daerah*



*Perpustakaan Digital masuk dalam berita harian di Kota Serang*

**Gambar 3.4 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Meningkatkan Derajat Pendidikan**

Sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat di Kota Serang diukur dengan indikator angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel 3.8**

**Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Tahun 2022**



No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja Pelayanan
1.	Rata Lama Sekolah	$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n xi$ <p>dimana:            RLS = Rata-rata Lama sekolah Penduduk usia 25 tahun ke atas  <math>xi</math> = Lama Sekolah Penduduk ke-<math>i</math> yang berusia 25 tahun  <math>n</math> = Jumlah Penduduk usia 25 tahun ke atas</p>	Tahun	8,81	8,9	100,45	Sangat tinggi
2	Harapan Lama Sekolah	$HLS_a^t = FKx \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Dimana :  <math>HLS_a^t</math> = Harapan Lama sekolah pada umur <math>a</math> di tahun <math>t</math>  <math>E_i^t</math> = Jumlah Penduduk usia <math>i</math> yang bersekolah pada tahun <math>t</math>  <math>P_i^t</math> = Jumlah Penduduk usia <math>i</math> pada tahun <math>t</math>  <math>i</math> = usia (<math>a, a+1, \dots, n</math>)            FK = Faktor Koreksi</p>	Tahun	12,86	12,81	99,15	Sangat tinggi
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>						<b>99,80</b>	<b>Sangat tinggi</b>

Sumber : BPS Kota Serang, 2023

Berdasarkan tabel di atas sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat melalui 2 indikator kinerja Tahun 2022 untuk rata-rata capaian kinerja untuk angka rata lama sekolah dan harapan lama sekolah sebesar 99,80% dengan kategori pelayanan **Sangat Tinggi** meningkat dibandingkan kondisi awal tahun 2021 di mana rata-rata lama sekolah meningkat sebesar 0,01 dan harapan lama sekolah meningkat sebesar 0,02. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah Kota Serang dalam mencerdaskan masyarakatnya terealisasi sesuai dengan target yang direncanakan pada tahun 2022. Peningkatan tersebut diantaranya karena Pemerintah Kota Serang telah membebaskan biaya pendidikan untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama melalui biaya operasional sekolah serta memberikan beasiswa bagi murid berprestasi sehingga bisa membantu bagi masyarakat yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya.





Rata-rata capaian terhadap target akhir RPJMD adalah 99,29% untuk 2 indikator sasaran pendidikan tersebut dengan rata-rata lama sekolah adalah 99,89% dari target akhir RPJMD 8,91 yang masih harus mengejar sebesar 0,01 point dan harapan lama sekolah sebesar 98,69% dari target akhir RPJMD 12,98 dan masih kurang 0,17 point.

**Tabel 3.9**  
**Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat dalam Perubahan RPJMD 2018-2023**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja					Target Kinerja	Kondisi Akhir RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Thn	8,62	8,67	8,76	8,89	8,9	8,91	8,91	
2	Harapan Lama Sekolah	Thn	12,65	12,77	12,78	12,79	12,81	12,98	12,98	

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Serang 2018-2023

**Tabel 3.10**  
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Tahun 2022 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Tahun 2022	
				Realisasi	%
1.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,91	8,90	99,89
2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,98	12,81	98,69
<b>Rata-rata terhadap RPJMD</b>					<b>99,29</b>

Sumber : BPS Kota Serang. 2023

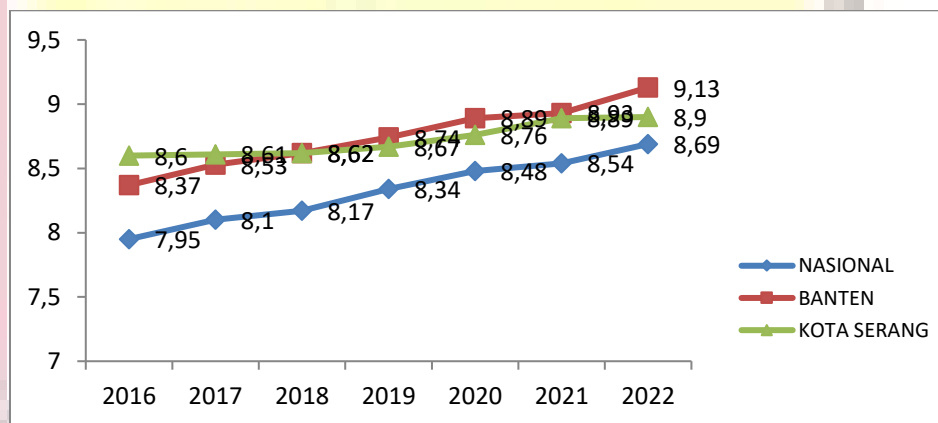
Rata-rata Lama Sekolah Kota Serang tahun 2022 adalah sebesar 8,9 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Serang usia 25 tahun ke atas memiliki rata-rata lama sekolah sebesar 8-9 tahun atau dapat menyelesaikan sekolah hanya sampai kelas 2 SLTP. Meskipun dapat memenuhi target tahun 2022 sebesar 8,89 tahun, namun untuk mencapai target rata-rata bersekolah 9 tahun masih membutuhkan upaya lebih kerja keras lagi dari Pemerintah Kota Serang. Rata-rata Lama Sekolah Kota Serang juga masih di bawah Provinsi Banten yang mencapai 9,13 dan di atas Nasional yaitu 8,69.



Harapan Lama Sekolah Kota Serang tahun 2022 adalah sebesar 12,79 tahun menggambarkan jumlah penduduk usia sekolah yang bersekolah pada tahun itu dibagi dengan jumlah total penduduk yang berusia pada tahun bersangkutan. Hal ini menjelaskan bahwa harapan untuk usia sekolah di Kota Serang berkisar antara 12,81 atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan lulus Sekolah Menengah Umum. Harapan Lama Sekolah Kota Serang juga masih di bawah Provinsi Banten yang mencapai 13,05 dan Nasional yaitu 13,10.

Adapun grafik capaian selama lima tahun dibandingkan dengan Provinsi Banten dan nasional sebagaimana grafik berikut:

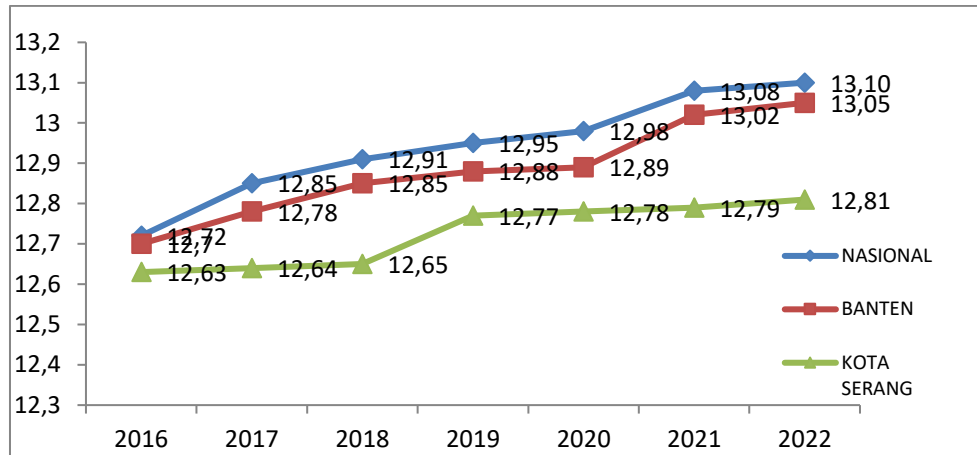
**Grafik 3.3**  
**Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kota Serang Tahun 2016-2022**



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan trend grafik di atas selama tahun 2016-2022 bahwa angka rata-rata lama sekolah selalu berada di antara Provinsi Banten dan Nasional dan setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan.

**Grafik 3.4**  
**Capaian Harapan Lama Sekolah Kota Serang Tahun 2016–2022**



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Trend angka harapan lama sekolah selama tahun 2016-2022 selalu di bawah angka provinsi Banten dan nasional hal ini menunjukkan bahwa Kota Serang masih jauh tertinggal dalam harapan lama sekolah dan harus memperbaiki dari segala fasilitas dan kualitas pendidikan agar bisa mengejar ketertinggalan dan masyarakatnya menjadi lebih cerdas.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat, disusunlah proses bisnis yang berisi uraian proses inti, pendukung dan manajemen. Berikut disajikan bagan proses bisnis pada sasaran Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat beserta intervensi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Serang.



**Gambar 3.5** Proses Bisnis Sasaran Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat

Berdasarkan proses bisnis yang sudah disusun, selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan beserta penanggung jawab.



Berikut disajikan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran daerah beserta perangkat daerah pengampu.



**Gambar 3.6 Logical Frame Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat**

Dalam usaha pencapaian sasaran ini, terdapat beberapa faktor yang mendorong terealisasinya target yang ditetapkan. Akan tetapi, pada sisi lain juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya kualitas pendidikan ini. Adapun faktor pendorong dan faktor penghambat dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel. 3. 11  
Faktor Penghambat dan Pendorong Sasaran Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat**

No	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	OPD Pendukung
1	Sarana Prasarana Pendidikan belum memadai	a. Membangun dan merehabilitasi gedung sekolah yang sudah tidak layak b. Menambah kelas baru di SD Banjarsari agar bisa mengakomodir jumlah siswa yang masuk sekolah c. Melengkapi fasilitas dan alat peraga pendidikan beserta kelengkapan laboratoriumnya	Dindikbud
2	Kualitas tenaga pendidikan yang masih rendah	a. Memberikan diklat kepada para guru agar bisa meningkatkan kualitas mengajarnya b. Memberikan diklat mengenai teknik memberikan materi bahan pengajaran dalam	Dindikbud



No	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	OPD Pendukung
		menghadapi belajar menggunakan teknologi informasi c. Menambah tenaga pendidik dan kependidikan atau guru dari P3K dan honorer daerah d. Menambah tutor PAUD untuk 291 lembaga	
3	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pendidikan karena rendahnya penghasilan keluarga	a. Memberikan BOS untuk seluruh siswa b. Beasiswa bagi para siswa yang tidak mampu c. Memberikan keringanan kepada keluarga yang tidak mampu dalam menyekolahkan anaknya dari PIP (Program Indonesia Pintar)	Dindikbud
4	Kurangnya sarana dan prasarana serta lembaga pendidikan informal	Bekerjasama dengan lembaga pendidikan informal dengan memberikan bantuan sapsras untuk siswa kejar paket	Dindikbud
5	Kurangnya minat baca masyarakat	a. Memberikan pelayanan perpustakaan keliling dan digital kepada masyarakat b. Revitalisasi Gedung Juang 45 menjadi salah satu destinasi wisata sejarah kearsipan dan edukasi (ruang perpustakaan umum dan anak) pada Tahun 2020. c. Pengembangan Sistem Informasi (sistem / aplikasi), terdiri dari - Perpustakaan Digital yakni E Pusda Kota Serang (Tahun 2020) - Pinjam Antar Buku (Pintar Buku) Tahun 2021 d. Pendirian Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial di Kp. Pekijing Kelurahan Kalang Anyar Kec. Taktakan pada Tahun 2021 e. Pendirian Pojok-pojok baca yang berlokasi Kecamatan Taktakan, Masjid Al-Ikhlas BIP dan Kp. Pejaten Kel. Kaligandu	Dindikbud dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan



No	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	OPD Pendukung
6	Rendahnya Daya saing kepemudaan dan keolahragaan	a. Mengikutsertakan para pelajar dan pemuda dalam berbagai kompetisi olahraga dan kesenian b. Melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketrampilan dan keahlian bagi para pemuda dalam bidang olahraga dan kesenian	Dindikbud dan Disporapar

### b. Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Kesehatan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki daerah tersebut. Pencapaian sasaran ini didukung oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. sebagai Perangkat Daerah utama.

Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di Kota Serang diukur dengan indikator Usia Harapan Hidup sesuai dengan tabel 3.12.



*Peresmian RSUD menjadi BLUD*



*Pemasangan Alat Kontrasepsi di mowling*



*Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor*



*Pembinaan dan Pendampingan kepada Masyarakat terkait Stunting*

### Gambar 3.7 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

**Tabel 3.12**

**Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2022**





No.	Indikator Kinerja Utama	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja Pelayanan
1.	Usia Harapan Hidup	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.	Tahun	68,34	68,54	100,29	Sangat tinggi

Sumber : BPS Kota Serang, 2023

Berdasarkan tabel di atas sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui indikator kinerja usia harapan hidup Tahun 2022 senilai 68,54 tahun atau sebesar 100,29% dengan kategori pelayanan **Sangat Tinggi** jika dibandingkan kondisi awal tahun 2021 sebesar 68,12 tahun yang meningkat sebesar 0,42 point. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah Kota Serang dalam meningkatkan kesehatan masyarakatnya terealisasi sesuai dengan target yang direncanakan pada tahun 2022. Peningkatan ini merupakan usaha dari Pemerintah Kota Serang dalam melaksanakan program-program kesehatan dengan berbagai macam kendala yang dihadapi.

**Tabel 3.13**  
**Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dalam Perubahan RPJMD 2018-2023**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja					Target Kinerja	Kondisi Akhir RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Usia Harapan Hidup	Thn	67,58	67,83	68,00	68,12	68,54	68,51	68,51	

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Serang 2018-2023

Usia harapan hidup dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 telah mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 Usia Harapan Hidup tercapai sebesar 68,54. Pencapaian tersebut masih di bawah angka Provinsi Banten yang mencapai 70,39 dan angka Nasional 71,85. Capaian kinerja terhadap target akhir RPJMD adalah 100,04% atau sangat tinggi dari target 68,5 yang sudah melewati target yang sudah ditetapkan.

**Tabel 3.14**



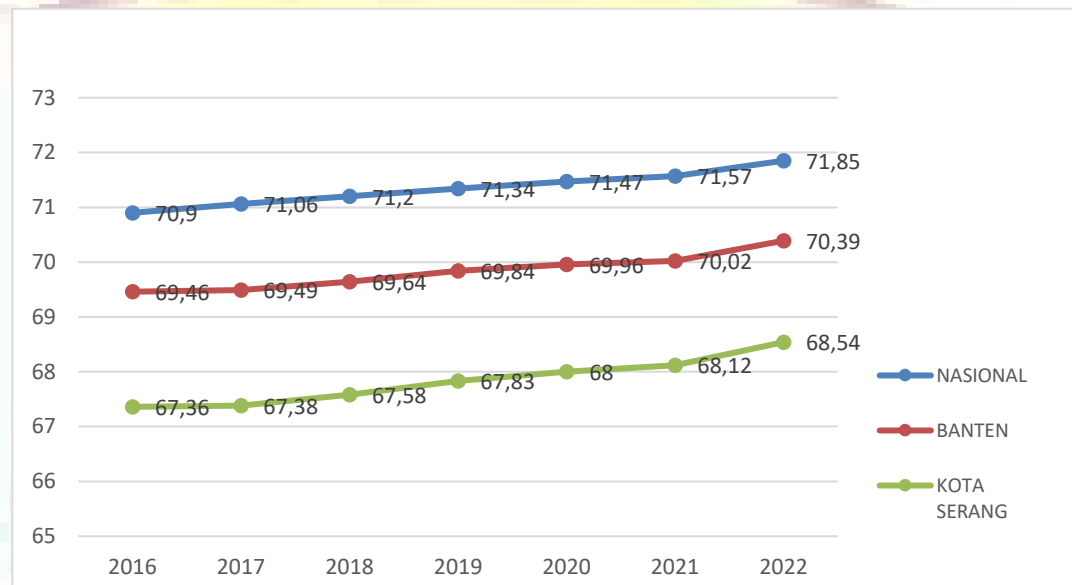
### Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2022 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Tahun 2022	
				Realisasi	%
1.	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,51	68,54	100,04
<b>Capaian Kinerja terhadap RPJMD</b>					<b>100,04</b>

Sumber : BPS Kota Serang, 2023

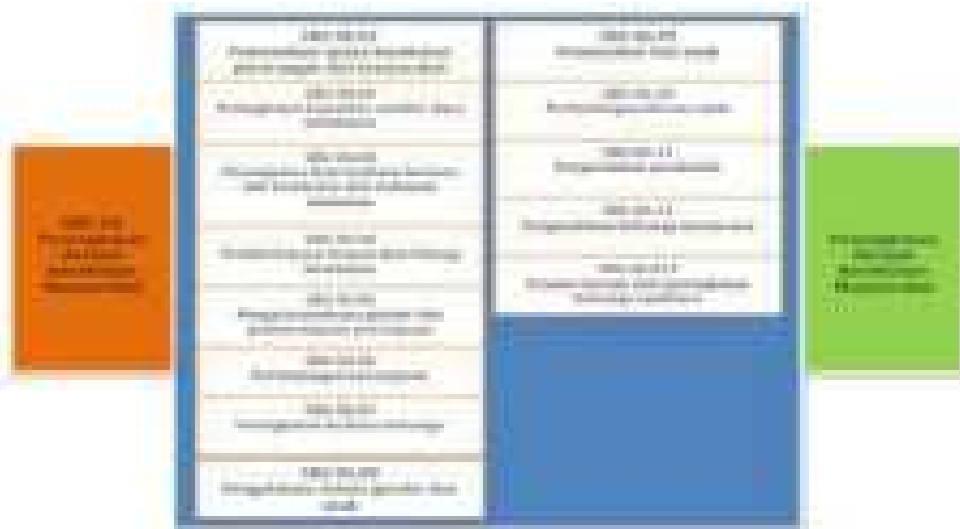
Adapun grafik capaian kinerja selama lima tahun sebagaimana berikut:

**Grafik 3.5**  
**Capaian Usia Harapan Hidup Kota Serang Tahun 2016–2022**



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Untuk mencapai sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, disusunlah proses bisnis yang berisi uraian proses inti, pendukung dan manajemen. Berikut disajikan bagan proses bisnis pada sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat beserta intervensi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Serang.



**Gambar 3.8** Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Berdasarkan proses bisnis yang sudah disusun, selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan beserta penanggung jawab. Berikut disajikan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran daerah beserta perangkat daerah pengampu.



Sumber : Bappeda Kota Serang, 2021

**Gambar 3.9** Logical Frame Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat



Permasalahan utama dalam meningkatkan usia harapan hidup di Kota Serang sebagai berikut:

1. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu masih menjadi masalah aktual di wilayah Kota Serang (AKI : 20 Kasus). Kematian Ibu disebabkan oleh Covid 19, perdarahan, Pra Eklampsia Berat (PEB) dan Eklampsia, anemia dan suspek paru - paru. Dan masih adanya persalinan yang ditolong oleh dukun serta belum diperbaharui SK kemitraan antara Bidan dan Dukun.

2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Masih ditemukannya kasus kematian bayi di wilayah Kota Serang (AKB : 32 Kasus) disebabkan oleh BBLR, asfiksia, lahir prematur, kelainan bawaan, bayi lahir besar dan infeksi.

3. Balita Gizi Buruk

Peningkatan persentase balita gizi buruk (414 balita (0.66%)

- 1) Peningkatan persentase balita gizi buruk disebabkan oleh pola asuh yang salah;
- 2) Tidak rutinnya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita karena pandemi Covid 19;
- 3) Faktor lingkungan dan ekonomi keluarga..

4. Terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan untuk akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

5. Masih belum idealnya jumlah dokter dan tenaga paramedis pada Tahun 2022, yaitu rasio dokter per 1000 penduduk sebesar 0,050 dan rasio tenaga paramedis (Bidan dan Perawat) per 1000 penduduk sebesar 0,267.

6. Masih kurangnya pemahaman dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan program KKBPK

7. Mobilitas penduduk yang cukup tinggi, angka pengangguran , dan dampak inflasi tinggi

8. Meningkatnya angka kelahiran pada perempuan kelompok umur 25- 29 Th sebanyak 3.378 kelahiran



9. Kurang maksimalnya kinerja kader TPK dalam pendampingan Catin dalam aplikasi elsimil, pendampingan Ibu balita dan pendampingan Ibu Pasca Bersalin.

Langkah atau upaya dalam penanganan peningkatan usia harapan hidup antara lain :

a. Angka Kematian Ibu

- 1) Setiap pertolongan persalinan wajib dilakukan oleh tenaga kesehatan;
- 2) Skrining awal dan akhir kehamilan;
- 3) Pemeriksaan 6 kali selama kehamilan, trimester I sebanyak 2 kali, trimester II 1 kali dan trimester III sebanyak 3 kali
- 4) Mengaktifkan kembali P4K di masing-masing Kelurahan;
- 5) Pengisian Buku KIA yang lengkap, benar dan tepat di institusi pelayanan kesehatan (termasuk oleh bidan kelurahan);
- 6) Mengisi cohort ibu dengan lengkap dan meningkatkan kompetensi Nakes dengan meningkatkan sarana prasarana pasien kesehatan
- 7) Pertolongan persalinan 6 tangan, 1 dokter 2 bidan atau 1 dokter 1 perawat dan 1 bidan;
- 8) Pelaksanaan Prenatal Care sebanyak 4 kali;
- 9) Identifikasi faktor non-medis termasuk informasi rujukan dan masalah sosial ekonomi keluarga;
- 10) Menjadikan PMI sebagai mitra dalam ketersediaan stok darah.
- 11) Memperjelas kembali Tupoksi dukun/paraji bahwa dukun/paraji sebagai pendamping tenaga kesehatan yang bertugas mengajak pemeriksaan kehamilan, masa nifas dan bayi baru lahir ke bidan dan/atau posyandu, puskesmas dan/atau BPM/klinik;
- 12) Setiap kelurahan wajib memiliki komitmen untuk memberikan *reward* dan *punishment* bagi kemitraan bidan dan dukun;
- 13) Meningkatkan peran serta lintas sektor, kader, Tokoh masyarakat, Tokoh agama, RW, RT, babinmas dan babinsa dalam peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak.



- b. Angka Kematian Bayi (AKB)
  - 1) Pelayanan ANC berkualitas sesuai standar;
  - 2) Peningkatan kuantitas dan kualitas kunjungan neonatal;
  - 3) Peningkatan kuantitas dan kualitas kelas ibu balita;
  - 4) Pendampingan neonatal resiko tinggi.
- c. Prevalensi Balita Gizi Buruk
  - 1) Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan pada balita di Posyandu terkait dengan upaya tersebut melalui Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan rutin setiap bulan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan melalui koordinasi dan penggerakan kepada lintas sektor terutama Tim Pokjanel Posyandu di berbagai tingkatan administrasi, Kecamatan, Kelurahan, Tim Penggerak PKK, Lembaga swadaya Masyarakat, organisasi profesi, dan Organisasi Kemasyarakatan lain yang ada di wilayah masing-masing.
  - 2) Memberikan edukasi kepada ibu balita/pengasuh mengenai hasil pemantauan pertumbuhan, Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), stimulasi perkembangan dan pelayanan kesehatan berikutnya.
  - 3) Mengintervensi balita yang ditemukan mengalami masalah gizi dan kesehatan (gagal tumbuh dan kembang).
- d. Melaksanakan sosialisasi Program KKBPK dan peningkatan kapasitas Program KKBPK di Kampung KB
- e. Melaksanakan KIE KB dan program KKBPK dan melaksanakan pelayanan KB metoda MKJP secara kontinyu;
- f. Memberikan bimtek dan peningkatan kapasitas kader pendamping TPK Peningkatan kegiatan imunisasi, posyandu, pelayanan ibu, bayi, bumil, anak, remaja sampai lansia
- g. Pelaksanaan pelayanan dilakukan dengan penyesuaian-penyesuaian dalam mekanisme pelayanan dalam gedung dan luar gedung dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan.

Strategi dan Rencana Tindak Lanjut yang dilakukan guna mengatasi permasalahan yang dihadapi pada tahun 2022, dapat dirumuskan sebagai berikut:





1. Peningkatan fungsi Puskesmas dalam pelayanan kesehatan dasar, pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan dan peningkatan peran stakeholder serta sektor terkait.
2. Pemenuhan pemenuhan SDM Kesehatan di puskesmas sesuai standar, khususnya untuk pemenuhan program prioritas.
3. Peningkatan upaya promotif dan preventif serta edukasi kepada masyarakat terkait faktor resiko penyakit menular dan tidak menular serta peningkatan skrining guna mendeteksi dini penyakit tidak menular di FKTP dan jejaringnya, yang akan berdampak pada peningkatan capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Serang.
4. ANC terpadu dengan peningkatan screening ibu hamil, pemeriksaan oleh dokter umum di Puskesmas setiap ibu hamil pertama kontak dengan tenaga kesehatan dan pemeriksaan oleh obgyn;
5. Menerbitkan Perda Kibla dan Peraturan Walikota terkait Percepatan Penurunan angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi;
6. Menerbitkan Perwal GERMAS (Gerakan Masyarakat Sehat);
7. Membuat Posyandu Remaja dan Serang Jawara Anti Anemia dalam rangka menekan angka Stunting;
8. Inovasi program Aje Kendor (Awasi Jaga Evaluasi Kehamilan Resiko Tinggi), peningkatan surevileans kematian maternal dan perinatal;
9. Mengimplementasikan PMK;
10. Upaya pemenuhan tenaga medis dengan perekrutan SDM di sarana kesehatan pemerintah.



## 2. TUJUAN STRATEGIS 2

**“Terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah”**



*Pembangunan irigasi Kp. Sukadana Kec. Kasemen*



*Pembangunan Drainase Jalan*



*Pemasangan Penerangan Jalan Umum*



*Penertiban Parkir Liar*

### **Gambar 3.10 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Meningkatkan Infrastruktur**

Indikator Kinerja tujuan ini adalah Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke dua yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 yaitu **“Meningkatkan sarana prasarana daerah yang berwawasan lingkungan”**. Pencapaian misi ini didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemukiman dan Kawasan Perumahan, Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Perangkat Daerah utama. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kota Serang diperoleh dengan survei yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Serang dengan mutu pelayanan terbagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:



**Tabel 3.15**  
**Kinerja Mutu Pelayanan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur**

Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1,00 – 2,99	10,00 – 29,99	D	Sangat Tidak Puas
3,00 – 4,99	30,00 – 49,99	C	Tidak Puas
5,00 – 6,99	50,00 – 69,99	C+	Cukup Puas
7,00 – 8,99	70,00 – 89,99	B	Puas
9,00 – 10	90,00 – 100	A	Sangat Puas

Sumber : Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, 2022

Hasil analisis terhadap penilaian indeks kualitas layanan infrastruktur melalui kuesioner yang dilakukan terhadap 900 responden yang di sebar ke seluruh kecamatan se-Kota Serang. Nilai Capaian pengukuran IKLI dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.16**  
**Capaian Pengukuran Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah Tahun 2022**

No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja Pelayanan
1.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah	Nilai diperoleh dari Survei yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang	Poin	66	62,77	95,11	Sangat tinggi

Sumber : Bappeda Kota Serang, 2023

Berdasarkan tabel di atas untuk capaian kinerja pada tahun 2022 ini tercapai 95,11% dengan kinerja pelayanan sangat tinggi karena tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kota Serang tahun 2022 tercapai sebesar 62,77. Apabila kita lihat tabel tersebut di atas maka dapat dikatakan Kinerja Pelayanan Infrastruktur di Kota Serang adalah **“Cukup Puas”** atau dengan skor C+. Dalam hal ini masyarakat telah merasakan hasil pembangunan infrastruktur diwilayahnya meskipun belum maksimal.



Adapun rincian IKLI per Kecamatan se-Kota Serang tahun 2022 dapat dilihat di tabel berikut:

**Tabel 3.17**  
**Nilai IKLI Kecamatan se-Kota Serang Tahun 2022**

Kecamatan	Nilai	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
Serang	72,18	B	Puas
Taktakan	52,74	C+	Cukup Puas
Cipocok Jaya	69,53	C+	Cukup Puas
Walantaka	58,97	C+	Cukup Puas
Kasemen	72,21	B	Puas
Curug	50,97	C+	Cukup Puas
<b>Kota Serang</b>	<b>62,77</b>	<b>C+</b>	<b>Cukup Puas</b>

Sumber : Bappeda Kota Serang, Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas pembangunan infrastruktur dilakukan secara terus menerus oleh Pemerintah Kota Serang. Pada Tahun 2022 dengan kualitas Baik terdapat pada Kecamatan Serang dan Kasemen dengan Skor 72,18 dan 72,21. Hal ini menunjukkan pembangunan terkait infrastruktur di wilayah tersebut sudah mengalami perbaikan yang signifikan dibandingkan dengan 4 kecamatan lainnya dalam rangka memberikan layanan yang maksimal terhadap kebutuhan masyarakat untuk menunjang perekonomian daerah. Pertumbuhan indeks kepuasan layanan infrastruktur dapat dilihat perkembangannya pada tabel dan grafik di bawah ini:

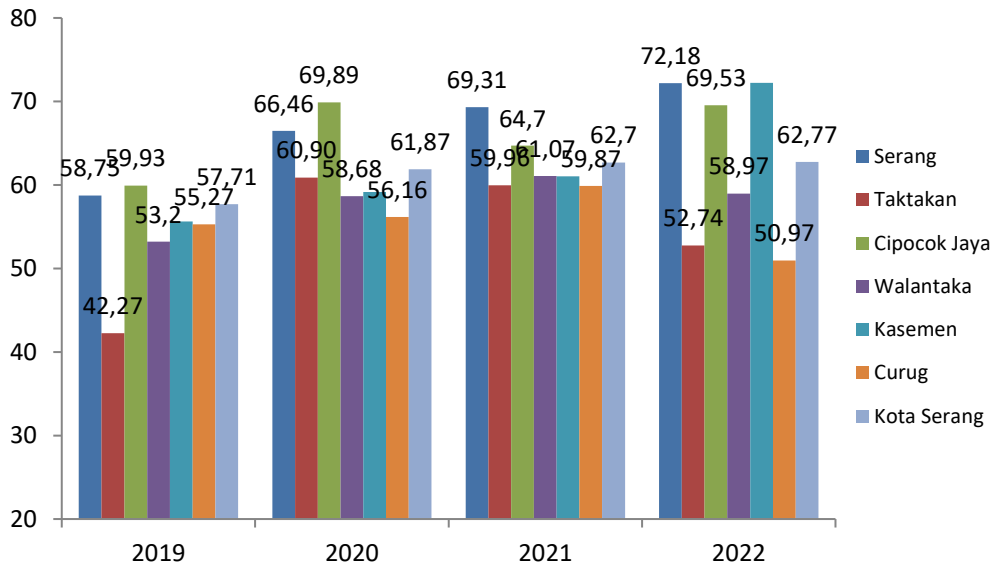
**Tabel 3.18**  
**Perkembangan Nilai IKLI Kecamatan se-Kota Serang**  
**Tahun 2019-2022**

Tahun	Serang	Taktakan	Cipocok Jaya	Walantaka	Kasemen	Curug	Kota Serang
2019	58,75	42,27	59,93	53,2	55,65	55,27	57,71
2020	66,46	60,90	69,89	58,68	59,16	56,16	61,87
2021	69,31	59,96	64,7	61,07	61,04	59,87	62,70
2022	72,18	52,74	69,53	58,97	72,21	50,97	62,77

Sumber : Bappeda Kota Serang, Tahun 2023



**Grafik 3.6**  
**Capaian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Serang**  
**Tahun 2019-2022**



Sumber : Bappeda Kota Serang, 2023

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa selama kurun waktu tahun 2019-2022 terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya terhadap kualitas infrastruktur wilayah terutama di Kecamatan Kasemen, Serang dan Cipocok Jaya yang dengan nilai di atas IKLI Kota Serang sedangkan Kecamatan Curug, Walantaka dan Taktakan merupakan daerah yang potensi wilayahnya sebagian besar pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan nilainya di bawah IKLI Kota Serang. Hal ini menjadi tugas Pemerintah Kota Serang dalam meneruskan pembangunan pada tahun selanjutnya agar lebih maksimal dalam memperbaiki infrastruktur wilayah.

**Tabel 3.19**  
**Realisasi dan Target IKLI dalam Perubahan RPJMD**  
**Tahun 2018-2023**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja				Target Kinerja	Kondisi Akhir RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah	Poin	57,71	61,87	62,70	62,77	70	70

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Serang 2018-2023



Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap kondisi akhir Perubahan RPJMD sebesar 89,67% atau kategori **Tinggi**. Berdasarkan tabel di atas untuk mencapai nilai 70 dengan kriteria ‘**Puas**’ dengan skor B harus mengejar 7,23 point lagi agar target dalam RPJMD sesuai dengan misi Walikota terpilih dapat tercapai.

**Tabel 3.20**  
**Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur**  
**Tahun 2022 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Tahun 2022	
				Realisasi	%
1.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah	Tahun	70	62,77	89,67
<b>Capaian Kinerja terhadap RPJMD</b>					<b>89,67</b>

Sumber : Bappeda Kota Serang, 2023

Faktor yang menyebabkan layanan terhadap pembangunan infrastruktur wilayah masih belum cukup puas di Kota Serang adalah karena belum optimalnya kondisi dan ketersediaan infrastruktur wilayah yang tercermin dari beberapa kondisi, yaitu :

#### **1. Jalan**

Masyarakat merasakan perbaikan pada jalan walaupun ada yang masih mengeluh akan tetapi rata-rata menyatakan puas, dan hal ini harus terus di pelihara dan di perbaiki.

#### **2. Sampah**

Masalah pembuangan sampah, dimana tidak ada bak sampah atau penampungan yang cukup memadai menjadikan masyarakat merasa bahwa permasalahan sampah kemudian menjadi beban dari pemerintah. Walaupun harus diakui bahwa budaya bersih dan budaya membuang sampah pada tempatnya masih sangat rendah. Oleh karenanya dalam kasus ini harus ada ketegasan dan pendekatan sosial bagi masyarakat terkait dengan masalah sampah ini.





### 3. Air Bersih

Peran dari pemerintah Kota Serang dalam pemenuhan air bersih dirasa masih sangat minim, hampir dapat dikatakan bahwa pemerintah Kota Serang dalam persepsi masyarakat abai pada pemenuhan air bersih ini.

### 4. IPLT (Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja)

Hampir sama dengan keadaan pada penyediaan air bersih, persepsi masyarakat pada IPLT ini dapat dikatakan sangat tidak puas, masyarakat merasakan ketidakhadiran pemerintah dalam pengelolaan IPLT ini, bahkan masyarakat awam tidak banyak mengetahui tentang IPLT ini.

Strategi dan upaya-upaya yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Serang yang kondisinya dinilai buruk oleh masyarakat sehingga menyebabkan ketidakpuasan masyarakat maka harus segera ditindaklanjuti dengan upaya perbaikan jika kondisinya belum optimal. Segera dibangun (pengadaan) jika belum tersedia.
2. Inovasi Layanan Pengaduan Kondisi Jalan bagi masyarakat Kota Serang
3. Menjalin koordinasi untuk permasalahan Infrastruktur yang kewenangannya melibatkan Pemerintah Kota Serang dan Pemerintah Provinsi Banten.
4. Meningkatkan indikator kinerja yang masih dinilai kurang baik oleh masyarakat untuk meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat.
5. Penggunaan media baik konvensional dan media baru dalam mengangkat isu-isu dan program pemerintah yang menyentuh pada masyarakat serta melakukan pendekatan struktural menyeluruh kepada masyarakat

Tujuan daerah tersebut ditunjang dengan sasaran strategis pembangunan Kota Serang sebagai berikut:

#### a. Sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah

Pencapaian sasaran ini didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Perangkat Daerah utama.



*Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor*



*Pengaturan Kemacetan di tempat keramaian*



*Peningkatan Jalan Poros Kp. Pasuluhan Walantaka*



*Peningkatan Jalan Poros Kp. Pereng*

**Gambar 3.11 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah**

Sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah di Kota Serang diukur dengan indikator Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah dengan capaian 74,30% dari target yang ditetapkan sebesar 74,83% seperti tersaji pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.21**  
**Realisasi dan Target Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023**

No .	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				Target Kinerja	Kondisi Akhir RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah	Poin	67,55	70,09	73,13	74,30	77,14	77,14

*Sumber : Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023*



Berdasarkan tabel di atas selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2022 tingkat kemantapan infrastruktur wilayah mengalami peningkatan yang signifikan walaupun kondisi yang diharapkan pada akhir target RPJMD masih harus mencapai 3,68% lagi.

**Tabel 3.22**  
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Tahun 2022 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	%
1.	Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah	%	77,14	74,83	74,30	96,32

Capaian terhadap target akhir RPJMD untuk tingkat kemantapan infrastruktur wilayah adalah 96,32% dari target akhir Perubahan RPJMD, pada tahun 2022 pencapaian target sudah mendekati kondisi akhir RPJMD.

**Tabel 3.23**  
**Capaian Pengukuran Kinerja Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah Tahun 2022**

No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja Pelayanan
1.	Tingkat Kemantapan Struktur Wilayah	[(50% Indeks Pekerjaan Umum) +(30% Indeks Perumahan dan Permukiman)+ (20% indeks Perhubungan)]	%	74,83	74,30	99,29	Sangat tinggi

Sumber Bappeda Kota Serang, 2023

Capaian kinerja sasaran meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah tahun 2022 adalah sebesar 99,29 meningkat dari tahun 2021, hal ini terjadi karena pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada tahun 2022 yang sebelumnya terhenti karena pada tahun 2020 banyak anggaran di alihkan untuk mengatasi wabah covid-19. Tingkat kemantapan infrastruktur wilayah sebesar 74,30% di tahun 2022.

Adapun untuk penjelasannya pengukuran Tingkat kemantapan infrastruktur wilayah dibagi menjadi 3 indeks dengan rincian sebagai berikut :



1. Indeks Pekerjaan Umum dengan bobot 50%
  - a. Indeks ini didukung oleh perangkat daerah utama yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR). Komposisi dalam pengukuran yang rinciannya yaitu Penjumlahan dari (60% Capaian Bidang Bina Marga) + (30% Capaian Bidang SDA)+ (10% Capaian Bidang cipta Karya }
    - a. Bidang Bina Marga dengan bobot sebesar 60% rincian sebagai berikut : (50% Persentase Panjang Jalan kondisi baik)+(50% Persentase Jembatan Kondisi baik)
    - b. Bidang SDA dengan bobot sebesar 30% rincian sebagai berikut: (50% Presentase Panjang drainase kondisi baik)+(50%Presentase Panjang saluran irigasi kondisi baik)
    - c. Bidang Cipta Karya dengan bobot sebesar 10% dari Persentase Gedung Pemerintah terbangun dan fasilitas umum dalam kondisi baik.
2. Indeks Perumahan dan Pemukiman dengan bobot 30% didukung oleh perangkat daerah :
  - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR)

Dukungan Dinas PUPR terhadap komponen penghitungan diberikan bobot sebanyak 35% yang bersumber dari Bidang Cipta Karya dengan rincian sebagai berikut:

= (50% Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi)+(50%Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik)
  - b. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP)

Dukungan Dinas PKP terhadap komponen penghitungan diberikan sebanyak 65 % Komposisi dalam pengukuran yang rinciannya yaitu penjumlahan dari 35 % Capaian kawasan pemukiman dan 30% capaian perumahan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

    - Bidang kawasan pemukiman dengan bobot sebesar 35% dengan rincian sebagai berikut :



(50%Presentase Luas Pemukiman Layak huni) +(50%Presentase Luas Pemukiman Tertata))}

- Bidang perumahan dengan bobot sebesar 30% dari Presentase Lingkungan Sehat dan aman dengan PSU

3. Indeks Perhubungan dengan bobot 20% didukung oleh perangkat daerah Dinas Perhubungan yang diperoleh dari capaian presentase pemasangan rambu jalan dan pemasangan PJU:





**Tabel 3.24**  
**Uraian Pengukuran Kinerja Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah**  
**Tahun 2022**

N0	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Bobot	Realisasi (%)	Hasil Pembobotan	OPD Penanggung Jawab
1	Proporsi Panjang jaringan jalan kondisi baik	$\frac{\text{Panjang Jalan Kondisi Baik (km)}}{\text{Luas total Panjang Jalan (km)}} \times 100\%$	50% x 60%	$\frac{146,94 \text{ Km}}{208,16 \text{ Km}} \times 100\% = 70,59\%$	21,18	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	Proporsi Luas Jembatan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Luas Bentang Jembatan Kondisi Baik (m}^2\text{)}}{\text{Luas total Bentang jembatan (m}^2\text{)}} \times 100\%$	50% x 60%	$\frac{125581 \text{ m}^2}{179597 \text{ m}^2} \times 100\% = 69,92$	20,98	
3	Presentase drainase dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang Drainase Tidak Tersumbat Pembuangan Aliran Air (Km)}}{\text{Panjang seluruh drainase Kota (km)}} \times 100\%$	50% x 30%	$\frac{73054 \text{ km}}{76642 \text{ km}} \times 100\% = 95,32\%$	14,30	
4	Presentase irigasi kondisi baik	$\frac{\text{Luas Irigasi dalam kondisi baik (m}^2\text{)}}{\text{Luas total irigasi Kota (m}^2\text{)}} \times 100\%$	50% x 30%	$\frac{13978,76 \text{ m}^2}{14222,76 \text{ m}^2} \times 100\% = 98,28\%$	14,74	
5	Pemenuhan Gedung Pemerintah sesuai standar Kebutuhan	$\frac{\text{Jumlah Gedung Pemerintah yang terbangun (unit)}}{\text{Jumlah Gedung Pemerintah yang harus dibangun (unit)}} \times 100\%$	10%	$\frac{12}{15} \times 100\% = 80\%$	8,00	
<b>INDEKS PEKERJAAN UMUM (50%)</b>					<b>39,60</b>	
1	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	$\frac{\text{Jumlah RT yang mendapat akses air minum}}{\text{Jumlah Total Rumah tangga}} \times 100\%$	50% x 35%	$\frac{88949}{203363} \times 100\% = 43,74\%$	7,65	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{\text{Jumlah RT yang mendapat layanan PAL domestik}}{\text{Jumlah Total Rumah tangga}} \times 100\%$	50% x 35%	$\frac{79725}{203363} \times 100\% = 39,20\%$	6,86	
3	Persentase Luas pemukiman layak huni	$100\% - \left( \frac{\text{Luas Kawasan Kumuh (Ha)}}{\text{Luas Kawasan Permukiman (Ha)}} \times 100\% \right)$	50% x 35%	$100\% - \left( \frac{150,53 \text{ Ha}}{5973,96 \text{ (Ha)}} \times 100\% \right) = 97,48\%$	17,06	DINAS PEMUKIMAN





4	Persentase luas pemukiman tertata	$\frac{\text{Luas Kawasan Pemukiman tertata (Ha)}}{\text{Luas Kawasan Permukiman (Ha)}} \times 100\%$	50% x 35%	$\frac{5769,15 \text{ (Ha)}}{5973,96 \text{ (Ha)}} \times 100 = 96,57\%$	16,90	DAN KAWASAN PERUMAHAN
5	Persentase PSU yang diserahkan ke pemerintah	$\frac{\text{Jumlah lingkungan yang didukung PSU yang sudah diserahkan}}{\text{Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$	30%	$\frac{85}{211} \times 100\% = 40,28\%$	12,09	
<b>INDEKS PEMUKIMAN DAN PERUMAHAN (30%)</b>					<b>18,17</b>	
1	Persentase Pemasangan rambu	$\frac{\text{Jumlah Titik Pemasangan Rambu (buah)}}{\text{Jumlah Total Titik yang harus terpasang rambu (buah)}} \times 100\%$	50%	$\frac{339 \text{ buah}}{469 \text{ buah}} \times 100\% = 72,28\%$	36,14	DINAS PERHUBUNGAN
2	Persentase Pemasangan PJU	$\frac{\text{Jumlah Pemeliharaan PJU (Titik)}}{\text{Jumlah Total Titik yang harus dipelihara PJU (titik)}} \times 100\%$	50%	$\frac{483 \text{ titik}}{519 \text{ titik}} \times 100\% = 93,06\%$	46,53	
<b>INDEKS PERHUBUNGAN (20%)</b>					<b>16,53</b>	
<b>TINGKAT KEMANTAPAN INFRASTRUKTUR WILAYAH</b>					<b>74,30</b>	

Sumber : Dpupr, dprkp, dishub Kota Serang (Data Olahan). 2023





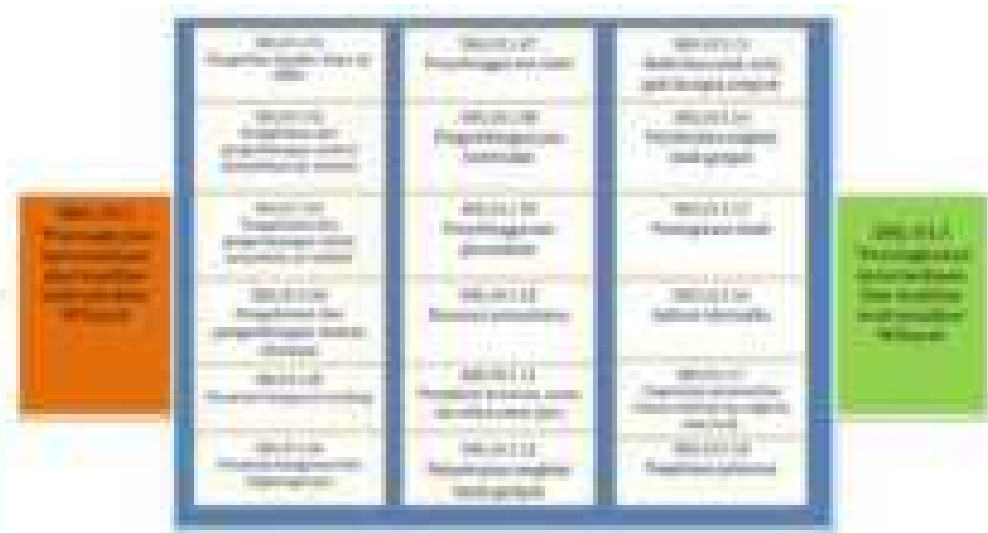
Berdasarkan tabel di atas bisa diinterpretasikan bahwa:

- a. Ketersediaan dan kondisi jalan yang kurang memadai bagi terselenggaranya fungsi kota yang optimal. Panjang jalan kota dalam kondisi baik pada tahun 2022 sebesar 70,59 persen atau 146,94 km, jalan dalam kondisi sedang sebesar 20,75 persen atau 43,20 km, jalan dalam kondisi rusak ringan sebesar 25,53 persen atau 17,64 km sedangkan jalan dalam kondisi rusak berat sudah tidak ada. Masalah kemacetan dan genangan air di beberapa titik ruas jalan, serta kondisi drainase yang kurang berfungsi dengan baik merupakan penyebab utama kerusakan jalan di samping tonase angkutan barang yang seringkali tidak terkendali.
- b. Ketersediaan dan kondisi infrastruktur perhubungan pada tahun 2022 terpasang rambu lalu lintas sebanyak 339 titik dari total yang ditargetkan sebanyak 469 buah atau sebesar 72,28%. Sedangkan untuk sarana perhubungan ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) sebesar 483 yang terpasang dari total 519 yang harus dipelihara atau sebesar 93,06%, belum optimalnya fungsi keberadaan halte dan rambu lalu lintas, pengawasan trayek angkutan umum, dan pengelolaan parkir dan terminal.
- c. Kondisi dan ketersediaan infrastruktur perumahan dan permukiman yang tergambar dari dengan pemukiman layak huni sebesar 97,48% dengan luas permukiman kumuh sekitar 2,52% dari luas wilayah Kota Serang, Sedangkan pemukiman tertata sebesar 96,57% serta Persentase lingkungan perumahan yang Prasarana serta Fasilitas Umumnya sudah diserahkan kepada Pemerintah Kota Serang sebesar 40,28% atau 85 lokasi dari total 211 lokasi yang ada.

Pemerintah Kota Serang terus meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah melalui pembangunan jalan dan jembatan, penyediaan sarana dan prasarana kebinamargaan, peningkatan pembangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum, pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong, pengembangan dan pengelolaan irigasi dan pengairan lainnya, pengendalian banjir, rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan dan pembinaan jasa konstruksi.



Untuk mencapai sasaran meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur, disusunlah proses bisnis yang berisi uraian proses utama, pendukung dan manajemen. Berikut disajikan bagan proses bisnis pada sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah beserta intervensi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Serang.



**Gambar 3.12 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah**

Berdasarkan proses bisnis yang sudah disusun, selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan beserta penanggung jawab. Berikut disajikan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran daerah beserta perangkat daerah pengampu.

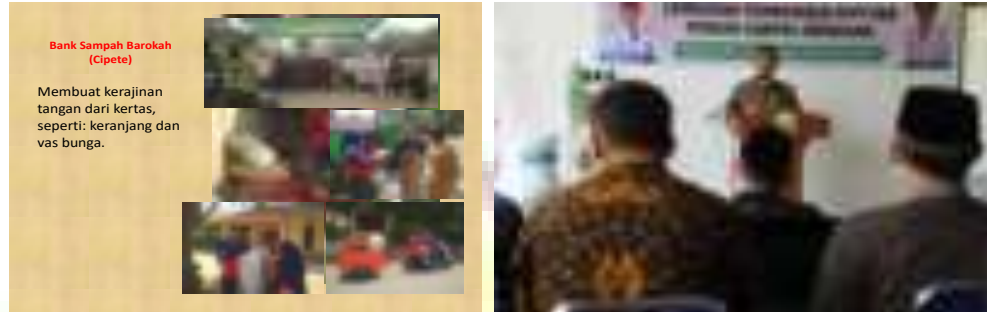


**Gambar 3.13 Logical Frame Sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah**



#### 4. TUJUAN STRATEGIS 3

**“Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan”**



*Pengelolaan Sampah dengan Launching Pembayaran SPPT-PBB dengan memberdayakan kelompok masyarakat Sampah anorganik melalui Bank Sampah*

**Gambar 3.14 Upaya Pemerintah Kota dalam Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup**

Indikator Kinerja Tujuan ke 3 adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke dua yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 yaitu **“Meningkatkan sarana prasarana daerah yang berwawasan lingkungan”**. Pencapaian misi ini didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai Perangkat Daerah utama. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah Indeks Kualitas/Pencemaran Air, Indeks Kualitas/Pencemaran Udara Indeks Tutupan Hutan/Lahan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) memiliki rentang nilai dan kategori sebagai berikut:

**Tabel 3.25  
Nilai Interval dan Kategori IKLH**

SKOR	KRITERIA
$90 \leq x \leq 100$	Sangat Baik
$70 \leq x < 90$	Baik
$50 \leq x < 70$	Sedang
$25 \leq x < 50$	Kurang
$0 \leq X < 25$	Sangat Buruk

Sumber : Peraturan Menteri LHK, 2021



Pada tahun 2022 penilaian indeks kualitas lingkungan hidup seperti tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 3.26**  
**Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022**

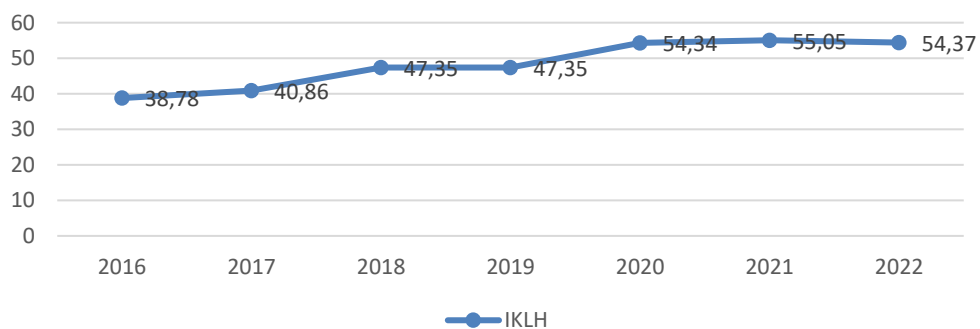
No.	Indikator Kinerja Utama	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja Pelayanan
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$ Dimana: IKA : Indeks Kualitas Air IKU : Indeks Kualitas Udara IKL : Indeks Kualitas Lahan	Poin	50,45	54,37	107,77	Sangat tinggi

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, 2023

Berdasarkan tabel di atas dari target pada tahun 2022 sebesar 50,45 point realisasi pelaksanaan sebesar 54,37 point dengan capaian 107,77% atau berkinerja **Sangat Tinggi**. IKLH Kota Serang tahun 2022 adalah sebesar 54,37 poin dengan kategori **Sedang**. Kondisi ini memiliki makna bahwa lingkungan hidup di Kota Serang masih belum memenuhi kriteria lingkungan yang baik dan sehat. Indeks tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 55,05 point.

Perkembangan capaian indeks kualitas lingkungan hidup dari tahun 2016-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Grafik 3.7**  
**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Serang Tahun 2016–2022**



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, 2023



**Tabel 3.27**  
**Realisasi dan Target IKLH dalam Perubahan RPJMD**  
**Tahun 2018-2023**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja					Target Kinerja	Kondisi Akhir RPJMD	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sebelum	Sesudah	
1	IKLH	Poin	47,35	47,35	54,34	55,05	54,37	47,79	51,3	47,79	

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023

Berdasarkan tabel di atas untuk mencapai target kinerja di akhir tahun masa RPJMD tahun 2023 untuk indikator IKLH sudah tercapai dan melampaui target.

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter – parameter pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan NO<sub>3</sub>-N. Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>, dan indeks tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan.



**Gambar 3.15** Lembar Kerja Analisa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022





Berdasarkan amanat yang ampu Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, baik dari aspek urusan, maupun geografis khusus daerah aliran sungai, maka berikut hasil analisis Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Serang IKA Kota Serang berada pada status "Sedang" pada Nilai Indeks 50 dengan Persentase Pemenuhan Mutu Air (100%) dan Jumlah Pemantauan yang Memenuhi Mutu Air (6 titik) Secara teknis status sedang tersebut dipengaruhi oleh beberapa parameter utama, seperti parameter kimia organik;

- a. BOD diatas baku mutunya;
- b. COD diatas baku mutunya;
- c. DO diatas baku mutunya;
- d. Fe diatas baku mutunya;
- e. Air Raksa (Hg) diatas baku mutunya;
- f. Timbal (Pb) diatas baku mutunya;



**Gambar 3.16 Lembar Kerja Analisa Indeks Kualitas Air Tahun 2022**

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Indeks ini digunakan oleh pemerintah Kota Serang untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di zona tertentu. Indeks ini memitigasi dan memandu kepada stakeholder untuk tanggap terhadap kondisi potensi polusi udara ketika kualitas udara berada di level berisiko rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Berdasarkan hasil analisis Indeks Kualitas



Udara (IKU), dapat diketahui bahwa Indeks Kualitas Udara Kota Serang pada periode 2022 berada pada katagori "Baik" dengan bobot indeks senilai 74,65.

Berdasarkan lembar kerja dibawah ini, dapat dijelaskan bahwa faktor utama yang menyebabkan kualitas udara Kota Serang dalam katagori "BAIK" yaitu dukungan dari sinergitas Pemerintah Kota melalui Instansi terkait, serta partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam mengendalikan pencemaran udara dengan baik.



**Gambar 3.17 Lembar Kerja Analisa Indeks Kualitas Udara Tahun 2022**

Kegiatan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengurangi pencemaran udara di Kota Serang dengan cara menggelar uji emisi gratis untuk kendaraan roda 4 rutin setiap tahunnya. Kegiatan ini diharapkan dapat meminimalisasi pencemaran udara.

Data kualitas lahan yang digunakan merupakan data sekunder berasal dari interpretasi satelit tutupan lahan, data demografi dan luas wilayah kota serang serta data tabular untuk data tutupan hutan vegetasi dan tutupan hutan non vegetasi.

Berdasarkan hasil analisis Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), dapat diketahui bahwa Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Serang pada periode 2022 berada pada katagori "sangat kurang" dengan bobot indeks senilai 24,38.

Berdasarkan lembar kerja, dapat dijelaskan bahwa faktor utama yang menyebabkan rendahnya nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Serang adalah semakin berkurangnya kawasan konservasi dan secara bersamaan



semakin meningkatnya aktivitas pembangunan (pertanian sawah (46,69%), pertanian lahan kering campuran (19,84%), permukiman (18,34%), pertanian lahan kering (10,48%) yang tidak serta disertai dengan kebijakan buffer zone/fasilitas umum sebagai ruang terbuka hijau dan atau ruang terbuka non hijau secara masif.



**Gambar 3.18 Lembar Kerja Analisa Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2022**

Berdasarkan hasil analisis instrumen IKLH Kota Serang, maka dapat disusun rangkaian kerangka berfikir model matematisnya sesuai dengan Pedoman Penyusunan IKLH yaitu :

$$\text{IKLH} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKTL})$$

$$\text{IKLH} = (0,376 \times 50,00) + (0,405 \times 74,65) + (0,219 \times 24,38)$$

$$\text{IKLH} = 18,80 + 30,23 + 5,33$$

$$\text{IKLH} = 54,37 \text{ (Kategori Sedang)}$$

**Tabel 3.28**  
**Nilai Hasil IKLH Tahun 2022**

No	Indikator	Nilai	Bobot	Hasil
1	Indeks Kualitas Air	50,00	0,376	18,80
2	Indeks Kualitas Udara	74,65	0,405	30,23
3	Indeks Kualitas Lahan	24,38	0,219	5,33
<b>IKLH Kota Serang</b>				<b>54,37</b>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, 2023



Perhitungan analisis tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Serang dengan mengacu pada tiga parameter perhitungan yang terdiri dari IKA, IKU, dan IKL diperoleh nilai IKLH 54,37. Nilai ini berada pada level terendah ketiga pada penilaian indeks kualitas lingkungan hidup yang telah ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan nilai yang berada di di range  $50 \leq x < 70$  maka kondisi Lingkungan Hidup di Kota Serang masih termasuk pada kategori sedang seperti pada tabel di atas.

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk tujuan dan sasaran ini ditunjang oleh 4 program yaitu Program Perencanaan Lingkungan hidup, Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Dampak Lingkungan, Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.

Sedangkan upaya-upaya yang dapat dilakukan antara untuk mengurangi pencemaran air, diperlukan upaya-upaya konkrit antara lain :

1. Lebih meningkatkan kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah dan limbah ke badan sungai;
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha dan industri industri untuk tidak membuang limbah langsung ke badan sungai dan memberikan reward dan punishment bagi perusahaan-perusahaan penghasil limbah cair;
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat berperilaku bijak terhadap aliran sungai dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya kebersihan sungai.

Untuk mengurangi pencemaran udara, diperlukan upaya-upaya konkrit antara lain :

1. Mengurangi emisi gas buang pengguna kendaraan bermotor, dengan melakukan uji emisi secara berkala, dan memberikan reward serta punishment bagi pengendara motor;
2. Melakukan gerakan penanaman pohon secara berkelanjutan dengan jenis pohon tertentu yang bisa mengurangi dampak polusi;



3. Mempertahankan kebijakan yang pro lingkungan seperti pemberlakuan car free day dan gerakan gemar bersepeda sebagai salah satu langkah meminimalkan dampak lingkungan akibat transportasi;
4. Menggalakkan sosialisasi pemanfaatan transportasi massal, sehingga mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor.

Untuk menambah luasan tutupan lahan diperlukan upaya-upaya konkrit antara lain:

1. Penetapan wilayah hutan kota yang tidak dapat dialihfungsikan untuk penggunaan yang lain;
2. Lebih menggiatkan penanaman mangrove di wilayah pesisir selain untuk mengurangi abrasi, juga dapat berfungsi untuk penghijauan;
3. Lebih banyak menyediakan RTH dan memultifungsikan RTH yang ada sebagai ruang terbuka publik yang dapat berfungsi sosial dan ekowisata.

Strategi pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan yang harus dilakukan sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan penyempurnaan kesahihan dan keakuratan sumber data;
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup dan perbaikan dalam fasilitas anggaran untuk pengendalian dampak lingkungan;
- c. Diperlukan regulasi setingkat perda untuk melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait fasilitas dan ruang publik.

Rekomendasi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kualitas air permukaan, Pemerintah kota Serang sebaiknya melakukan restorasi kualitas air sungai melalui upaya;

- a. Pembangunan karakter ekosistem sungai dan kualitas air sungainya;
- b. Pembangunan karakter biotik dan abiotik ekosistem sungai dan kualitas airnya ;
- c. Pembangunan karakter sosial kultural sungai dan kualitas airnya; Pembangunan karakter tersebut dengan meminiliasi pengaruh limbah padat, limbah cair, dengan sistemik.

Untuk memperbaiki kualitas udara, Pemerintah kota Serang sebaiknya melakukan kebijakan sebagai berikut;



- a. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, dengan budaya memanfaatkan transportasi masal, dan atau menggunakan sarana transportasi yang tidak menggunakan bahan bakar fosil (seperti kendaraan listrik, sepeda);
- b. Membudayakan desain rumah yang ramah lingkungan (sirkulasi udara - sirkulasi cahaya), sebagai upaya menghemat energi, sebab energi yang digunakan merupakan energi hasil pembakaran fosil;
- c. Membudayakan penggunaan produk daur ulang dan sustainable;
- d. Membudayakan menanam pohon di ruang terbuka;
- e. Membudayakan mengkonsumsi produk lokal organik;
- f. Meningkatkan kesadaran publik terhadap lingkungan;
- g. Memperpanjang jam pelaksanaan car freeday.

Untuk memperbaiki kualitas tutupan lahan, Pemerintah Kota Serang sebaiknya melakukan kebijakan sebagai berikut; smart city seperti

- a. Kebijakan smart environment yang berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik
- b. Mengaktualisasikan kebijakan pembangunan kota yang sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku, seperti UndangUndang 24/2007: Penanggulangan Bencana (Kota hijau harus menjadi kota waspada bencana), undang-undang 26/2007: Penataan Ruang, undang-undang 32/2009: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kedalam kebijakan operasional (RPJMD-RKPD) yang tersosialisasikan kepada seluruh stakeholder Kota Serang.

Tujuan daerah tersebut ditunjang dengan sasaran strategis pembangunan Kota Serang sebagai berikut:





a. Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)



Hasil Pengolahan Sampah daur ulang menjadi kerajinan tangan



Penanganan Sampah di Pasar Rau



Pembangunan RTH



Penanaman Pohon Pada Hari Jalan

**Gambar 3.19 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Pencapaian sasaran ini didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai Perangkat Daerah utama. Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Serang diukur dengan indikator Jumlah Penanganan Sampah dan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel 3.29**

**Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2022**

No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja Pelayanan
1.	Capaian Penanganan Timbunan sampah	$\frac{\Sigma \text{Sampah yang Tertangani}}{\Sigma \text{Timbunan Sampah}} \times 100$	%	75	55,72	74,29	Sedang
2.	Ketersediaan RTH	$\frac{\text{Luas RTH Publik yang tersedia}}{\text{Luasan RTH Publik yang seharusnya ada}} \times 100$	%	3,5	3,03	86,60	Tinggi
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>						<b>80,45</b>	<b>Tinggi</b>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, 2023





Berdasarkan tabel di atas untuk indikator capaian penanganan sampah tercapai 74,29% dengan kriteria *Sedang* dari target 75% terealisasi 55,72% sedangkan ketersediaan ruang terbuka hijau tercapai 86,60% dengan kriteria *Tinggi* dari target 3,5% terealisasi 3,03%. Rata-rata capaian kinerja untuk dua indikator tersebut sebesar 86,60% dengan kriteria *Tinggi*.

Capaian tersebut mengalami fluktuasi setiap tahun, untuk capaian terhadap target akhir RPJMD tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 3.30**  
**Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam Perubahan RPJMD 2018-2023**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja					Target Kinerja	Kondisi Akhir RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Capaian Penanganan Sampah	%	51,92	55,58	61,6	52,36	55,72	80,00	80,00	
2	Ketersediaan RTH	%	1,52	2,98	3,43	3,03	3,03	4,05	4,05	

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023

Pada tabel di atas dapat terlihat bahwa capaian penanganan sampah memiliki kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan adanya penambahan armada angkutan sampah yang menyebabkan sampah tertangani. Namun pada indikator ketersediaan Ruang Terbuka Hijau pada tahun 2022 tidak terjadi perluasan penambahan RTH sehingga realisasinya sama dengan tahun 2021.

**Tabel 3.31**  
**Capaian Kinerja Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2022 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Tahun 2022	
				Realisasi	%
1.	Capaian Penanganan Timbunan sampah	%	80	55,72	69,65
2.	Ketersediaan RTH	%	4,05	3,03	74,81
<b>Rata-rata terhadap RPJMD</b>					<b>72,23</b>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. 2023



Dari tabel di atas terdapat beberapa kondisi atau indikator kinerja yang mengalami kenaikan dan penurunan capaian pada akhir tahun 2022. Pencapaian terhadap kondisi akhir RPJMD di tahun keempat ini untuk persentase jumlah penanganan sampah tercapai 69,65% masih harus mengejar 21,35% lagi agar tercapai sesuai target yang diharapkan sedangkan ketersediaan RTH baru tercapai 74,81% dari target 4,05% dan rata-rata capaiannya sebesar 72,23% dengan kategori **Rendah**.

### 1. Persentase Jumlah Penanganan Sampah

**Capaian realisasi pengukuran indikator kinerja penanganan sampah adalah :**

- Total kubikasi sampah Cilowong Tahun 2022 =  $317226,1 + 41035 = 358261,1 \text{ m}^3$
- Asumsi sampah per orang sekitar  $0,0025 \text{ m}^3/\text{orang}$  per hari, jadi sampah yang dihasilkan per orang selama 1 tahun =  $0,0025 \text{ m}^3/\text{orang} \times 365 = 0,9125 \text{ m}^3/\text{orang}$ .
- Penduduk Kota Serang = 704618 jiwa
- Jumlah sampah dalam 1 tahun =  $704618 \text{ orang} \times 0,9125 \text{ m}^3/\text{orang} = 642963,925 \text{ m}^3$

$$\begin{aligned} \text{Persentase Penanganan Sampah} &= \frac{\Sigma \text{Sampah yang Tertangani}}{\Sigma \text{Timbunan Sampah}} \times 100\% \\ &= \frac{358261,1 \text{ m}^3}{642963,925 \text{ m}^3} \times 100\% \\ &= 55,72\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase Sampah Yang Tidak Tertangani} &= \frac{\Sigma \text{Sampah yang Tidak Tertangani}}{\Sigma \text{Timbunan Sampah}} \times 100 \\ &= \frac{284702,825 \text{ m}^3}{642963,925 \text{ m}^3} \times 100\% \\ &= 44,28\% \end{aligned}$$



**Tabel. 3.32**  
**Rekapitulasi Volume Sampah yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022**

NO	BULAN/TAHUN	RITASI		KUBIKASI		KETERANGAN
1	JANUARI 2022	3.038	Rit	27.304,6	M <sup>3</sup>	Per 1 Bulan
2	FEBRUARI 2022	2.744	Rit	25.126,7	M <sup>3</sup>	Per 1 Bulan
3	MARET 2022	3.038	Rit	27.395,8	M <sup>3</sup>	Per 1 Bulan
4	APRIL 2022	2.940	Rit	26.406,5	M <sup>3</sup>	Per 1 Bulan
5	MEI 2022	3.038	Rit	27.314,3	M <sup>3</sup>	Per 1 Bulan
6	JUNI 2022	2.940	Rit	26.406,5	M <sup>3</sup>	Per 1 Bulan
7	JULI 2022	3.038	Rit	27.305,4	M <sup>3</sup>	Per 1 Bulan
8	AGUSTUS 2022	3.038	Rit	27.315,9	M <sup>3</sup>	Per 1 Bulan
9	SEPTEMBER 2022	2.940	Rit	26.561,2	M <sup>3</sup>	Per 1 Bulan
10	OKTOBER 2022	3.038	Rit	26.749,4	M <sup>3</sup>	Per 1 Bulan
11	NOVEMBER 2022	2.940	Rit	26.307,8	M <sup>3</sup>	Per 1 Bulan
12	DESEMBER 2022	2.478	Rit	23.032	M <sup>3</sup>	Per 1 Bulan
JUMLAH TOTAL		35.210	Rit	317.226,1	M <sup>3</sup>	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, 2023

**Tabel. 3.33**  
**Rekapitulasi Volume Sampah yang ditangani oleh Pihak Ketiga/Swasta Tahun 2022**

NO	BULAN/TAHUN	RITASI		KUBIKASI		KETERANGAN
1	Januari 2022	890	Rit	3.104	M <sup>3</sup>	Per 1 Bulan
2	Februari 2022	810	Rit	2.821,4	M <sup>3</sup>	Per 1 Bulan
3	Maret 2022	1.039	Rit	3.501	M <sup>3</sup>	Per 1 Bulan
4	April 2022	1.057	Rit	3.379,6	M <sup>3</sup>	Per 1 Bulan
5	Mei 2022	1.036	Rit	3.503,1	M <sup>3</sup>	Per 1 Bulan
6	Juni 2022	1.037	Rit	3.395,8	M <sup>3</sup>	Per 1 Bulan
7	Juli 2022	1.095	Rit	3.626,1	M <sup>3</sup>	Per 1 Bulan

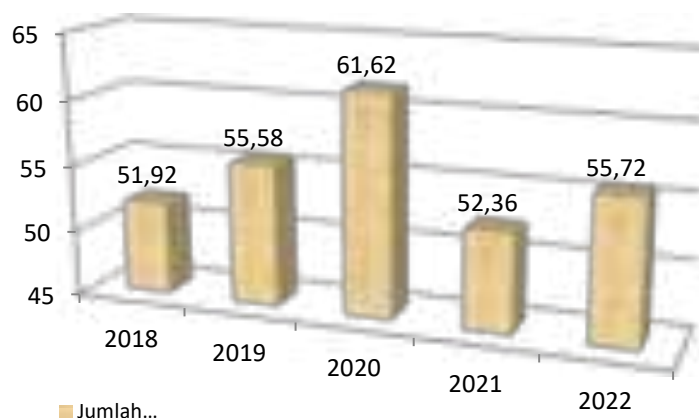


8	Agustus 2022	1.127	Rit	3.537,2	M <sup>3</sup>	<i>Per 1 Bulan</i>
9	September 2022	1.175	Rit	3.613	M <sup>3</sup>	<i>Per 1 Bulan</i>
10	Oktober 2022	1.184	Rit	3.721,3	M <sup>3</sup>	<i>Per 1 Bulan</i>
11	November 2022	1.117	Rit	3.560,1	M <sup>3</sup>	<i>Per 1 Bulan</i>
12	Desember 2022	997	Rit	3.272,5	M <sup>3</sup>	<i>Per 1 Bulan</i>
JUMLAH TOTAL		12.564	Rit	41.035	M <sup>3</sup>	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, 2023

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2022 Jumlah sampah yang di tangani Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dari 150 unit TPS dan 12 unit TPST yang tersebar di 6 kecamatan wilayah Kota Serang mencapai 317.226,1 M3 sedangkan volume timbulan sampah yang dikelola oleh pihak swasta mencapai 41.035 M3. Total timbunan sampah mencapai 642.964 M3. Sarana prasarana persampahan yang ada sekarang terdiri atas dumptruk sebanyak 23 unit, amrol sebanyak 15 unit, pickup 4 unit dan cator 45 unit. Kecamatan Serang memiliki timbunan sampah yang paling banyak di antara kecamatan lainnya se-Kota Serang, hal ini disebabkan karena pemukiman padat penduduk yang memiliki banyak sampah rumah tangga.

**Grafik 3.8**  
**Persentase Capaian Penanganan Sampah Kota Serang Tahun 2018–2022**



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, 2023

Grafik di atas, menggambarkan fluktuasi perkembangan capaian penanganan sampah dari tahun 2018 sampai dengan 2020 terjadi kenaikan



penanganan namun pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 9,26% dan kembali meningkat pada tahun 2022 sebesar 55,72%.

Faktor penghambat yang menyebabkannya antara lain:

- 1) Perhitungan yang dilakukan pada tahun 2018-2020 merupakan perhitungan berdasarkan estimasi ritasi kendaraan yang masuk di TPA Cilowong. Dengan asumsi 1 (satu) kendaraan dapat mengangkut sebanyak 6 kubik sampah sedangkan pada tahun 2021 ini perhitungan sampah sudah menggunakan jembatan timbang, sehingga berat sampah yang masuk (terangkut) ke TPA lebih real;
- 2) Belum optimalnya peranan komunitas lingkungan dalam pengolahan sampah, bank sampah yang sudah terbentuk masih sedikit;
- 3) Belum adanya regulasi tentang pengurangan sampah dengan pola 3R;
- 4) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung;
- 5) Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- 6) Banyaknya TP3SR yang belum aktif Kembali.

Langkah dan upaya yang dilakukan adalah:

- 1) Membangkitkan kembali komunitas masyarakat yang mengelola sampah seperti Bank sampah
- 2) Memberikan edukasi kepada masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya
- 3) Menambah armada sarana angkutan persampahan yang bertugas untuk mengambil dari perumahan
- 4) Menambah tenaga pengelola persampahan
- 5) Membuat kesepakatan perjanjian dengan Kota Tangerang Selatan dengan Kota Serang yang dituangkan dalam surat Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Serang dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan tentang Kerja Sama Antar Daerah Nomor 073/01/TKKSDKID/ I/221 Nomor 134.43/246/Pem/2021 dan Perjanjian Kerjasama antar Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Cilowong Kota Serang, Nomor 821/25/PKS/DLH/2021 Nomor 660/476-DLH/2021.



## 2. Persentase Ketersediaan RTH

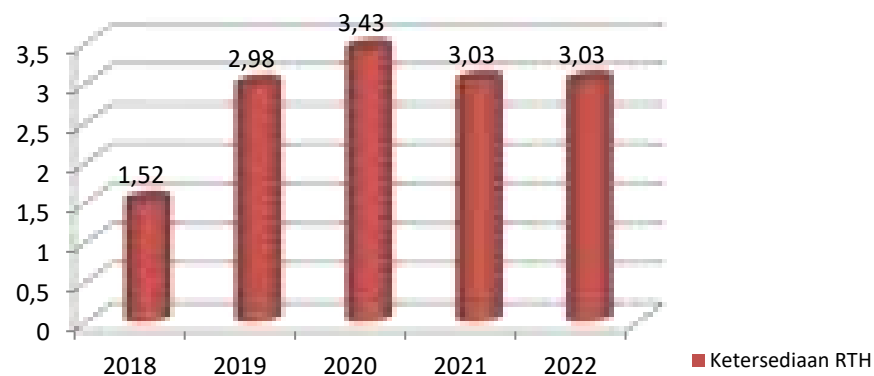
Capaian realisasi indikator kinerja diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Persentase Ketersediaan RTH} &= \frac{\text{Luas RTH Publik yang tersedia}}{\text{Luasan RTH Publik yang seharusnya ada}} \times 100 \\ &= \frac{161,53 \text{ Ha}}{5334,80 \text{ Ha}} \times 100 \% \end{aligned}$$

$$= 3,03 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Luasan RTH Publik yang seharusnya ada} &= 20\% \times \text{Luas Wilayah Kota Serang} \\ &= 20\% \times 26674 \text{ Ha} \\ &= 5334,80 \text{ Ha} \end{aligned}$$

**Grafik 3.9**  
**Persentase Ketersediaan RTH Kota Serang Tahun 2018–2022**



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, 2023

Berdasarkan tabel di atas terjadi peningkatan ketersediaan RTH dari tahun 2018-2020 namun di tahun 2021 terjadi penurunan kembali sebesar 0,4% hal ini disebabkan RTH yang sebelumnya tersedia terkena konversi lahan beralih fungsi menjadi peruntukkan lainnya sebagai akibat dari berkembangnya pembangunan perkotaan. Kota Serang sebenarnya harus mencapai 20% untuk ketersediaan RTH namun berbagai faktor kepentingan menyebabkan hal tersebut sulit untuk diwujudkan.

Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2022 ruang terbuka hijau di Kota Serang yang dipelihara dapat dilihat pada tabel di bawah ini dari jumlah keseluruhan ruang terbuka hijau sebesar 161.530 m<sup>2</sup> ternyata yang terpelihara hanya sebesar 155.444,21 m<sup>2</sup> atau sebesar 96,23%. Salah satu faktor penyebabnya adalah pengelolaannya menjadi kewenangan instansi lain.



**Tabel. 3.34**  
**Luas Ruang Terbuka Hijau yang Terpelihara**  
**oleh Pemerintah Kota Serang Tahun 2022**

NO	RUANG TERBUKA HIJAU	LUAS	SATUAN
1	Taman Terminal Pakupatan	3.921	m2
2	Taman Bina Bangsa	2.227	m2
3	Taman Tugu Debus	3.200	m2
4	Taman Selamat Datang ( Sari Asih )	786	m2
5	Taman Kaibon Banten	31.130	m2
6	Taman Tugu Jam	2.197	m2
7	Taman Pertigaan Darma Jaya	541	m2
8	Taman Makam Pahlawan	621	m2
9	Taman Tugu K3	357,21	m2
10	Taman Pemkot Lama	1.080	m2
11	Taman Tugu Adipura	1.262	m2
12	Taman Lampu Merah Warjok	72	m2
13	Taman Lampumerah Kebon Jahe	134	m2
14	Taman Lampumerah Ciracas	185	m2
15	Taman Lampu Merah Sempu	175	m2
16	Taman Median Sempu ( Depan Giant )	1.265	m2
17	Alun-alun Barat	18.654	m2
18	Alun-alun Timur	25.138	m2
19	Taman Tugu Selamat Jalan Parung	440	m2
20	Taman Median Ahmad Yani	2.600	m2
21	Taman Median Veteran	1.614	m2
25	Taman Median Sempu JL.Raya Pandeglang	830	m2
26	Taman Rumah Dinas Kodim	310	m2
27	Taman Sari	6.903	m2
28	Taman Patung Alun alun	462	m2
29	Taman Pemkot Serang	2.200	m2
30	Taman Lampu Merah Cipocok	52	m2
31	Taman Perum RS Pemda	1.074	m2
32	Taman Perempatan Gerbang Tol Serang Timur	288	m2
33	Taman Depan Darma Jaya (Pertigaan Daihatusu Serang)	412	m2
34	Taman Median JL Raya Jend. Sudirman	1.925	m2
35	Taman Median Dari pertigaan Sempu s/d Makam Cibebek	477	m2
36	Taman Median Dari Makam Cibetik S/D bayangkara	1.833	m2
37	Taman Stadion Maulana Yusuf	30.206	m2
38	Taman Bunderan Ciceri	544	m2
40	Taman Terminal Cipocok	524	m2





NO	RUANG TERBUKA HIJAU	LUAS	SATUAN
43	Taman Alun - alun Kecamatan Walantaka (2020)	6.430	m2
44	Taman Alun - alun Kecamatan Taktakan (2021)	2.249,00	m2
45	Taman Cijawa (2022)	1.126,00	m2
	<b>JUMLAH LUAS RTH YANG TERPELIHARA</b>	<b>155.444,21</b>	<b>m2</b>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, 2023

Untuk mencapai sasaran meningkatnya pengelolaan persampahan dan ruang terbuka hijau (RTH), disusunlah proses bisnis yang berisi uraian proses utama, pendukung dan manajemen. Berikut disajikan bagan proses bisnis pada sasaran Meningkatkan Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) beserta intervensi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Serang.



**Gambar 3.20 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Berdasarkan proses bisnis yang sudah disusun, selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan beserta penanggung jawab. Berikut disajikan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran daerah beserta perangkat daerah pengampu.



Sumber : Bappeda Kota Serang, 2021

### Gambar 3.21 Logical Frame Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Untuk menambah ketersediaan ruang terbuka hijau diperlukan upaya-upaya konkrit antara lain:

1. Penetapan wilayah hutan kota yang tidak dapat dialihfungsikan untuk penggunaan yang lain;
2. Lebih menggiatkan penanaman mangrove di wilayah pesisir selain untuk mengurangi abrasi, juga dapat berfungsi untuk penghijauan;
3. Membangun lebih banyak RTH dan memultifungsikan RTH yang ada sebagai ruang terbuka publik yang dapat berfungsi sosial dan ekowisata;
4. Diperlukan regulasi setingkat perda untuk melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait fasilitas dan ruang public khususnya ruang terbuka hijau sehingga alih fungsi lahan dapat ditekan, terutama lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan terbuka hijau dan lahan untuk penghijauan;
5. Mengingat pentingnya RTH sebagai paru-paru kota penyedia oksigen untuk kebutuhan kualitas udara yang bagus diperlukan sinergitas dan koordinasi terkait dengan para pemangku kebijakan dan stake holder agar target ketersediaan RTH sebesar 20% dari total luas wilayah Kota Serang bisa terwujud.



## b. Sasaran Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana



*Peninjauan Bencana Banjir Bandang Tanggal 1 Maret 2022*



*Pemberian bantuan P3K kepada korban banjir bandang oleh Walikota*



*Pelatihan terhadap TRC dalam evakuasi Bencana*



*Penanganan Kebakaran oleh Pasukan Damkar Satpol PP*

### **Gambar 3.22 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Menurunkan Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana**

Pencapaian sasaran kedua dari tujuan terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan adalah indikator Indeks Resiko Bencana yang didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah utama.

Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya dengan bobot sebesar 40%, keterpaparan dengan bobot sebesar 30% dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana dengan bobot sebesar 30%. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya



perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu. Sasaran Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana di Kota Serang diukur dengan indikator Indeks Risiko Bencana dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel 3.35**  
**Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana Tahun 2022**

No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja Pelayanan
1.	Indeks Resiko Bencana	$\frac{\text{Kerentanan}}{\text{kapasitas}} \times \text{Bahaya}$ <p>Dimana:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bahaya : probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitudo) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya</li><li>2. Kerentanan : parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.</li><li>3. Kapasitas : Pendekatan tingkat ketahanan</li></ol>	Point	110	156,2	58,00	Rendah

Sumber : BPBD Provinsi Banten, 2023

Berdasarkan tabel di atas untuk indikator indeks risiko bencana tercapai 58,00% dengan kriteria **Rendah** dari target skor 110 point terealisasi 156,2 point dan masih harus menurunkan 46,20 point lagi atau sebesar 42,00%. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten pada tahun 2022 bahwa Kota Serang untuk risiko bencana masih tergolong dalam kelas risiko tinggi dengan mencakup sembilan jenis ancaman yaitu: Gempabumi, Tsunami, Letusan Gunung Api, Tanah Longsor, Banjir, Banjir Bandang, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan



Lahan, dan Gelombang Ekstrim dan Abrasi. dengan menghitung potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan.

Tabel berikut menyajikan hasil Indeks Resiko Bencana Kota Serang Per Ancaman Tahun 2020-2021:

**Tabel 3.36**  
**Hasil Indeks Resiko Bencana Berdasarkan Ancaman Tahun 2020-2021**

No	Ancaman	Skor 2020	Skor 2021	Kelas Resiko
1	Banjir	33,60	23,76	Tinggi
2	Gempa bumi	21,60	18,82	Tinggi
3	Tsunami	24,00	15,27	Tinggi
4	Letusan Gunung api	-	-	-
5	Kebakaran Lahan	34,80	24,60	Tinggi
6	Tanah Longsor	11,60	8,20	Sedang
7	Gelombang Ekstrim dan abrasi	22,40	15,84	Tinggi
8	Bencana Kekeringan	23,20	16,40	Tinggi
9	Cuaca Ekstrim	-	9,62	Sedang

Sumber : BNPB, 2022

Berdasarkan tabel di atas Kota Serang untuk semua ancaman termasuk dalam kelas resiko tinggi kecuali untuk tanah longsor dan cuaca ekstrim. Hal ini menggambarkan bahwa pada tahun 2021 untuk ancaman tanah longsor menyebabkan kerugian harta, korban jiwa dan frekuensi kejadian menempati urutan paling rendah dengan nilai 8,20. Sedangkan untuk kebakaran lahan memiliki skor paling tinggi sebesar 24,60 point yang menyebabkan kerugian materiil harta dan jumlah korban serta frekuensi kejadian paling tinggi yang terjadi di Kota Serang.

Capaian Indeks Resiko Bencana setiap tahunnya fluktuasi setiap tahun, untuk capaian terhadap target akhir RPJMD tersaji dalam tabel berikut:



**Tabel 3.37**  
**Indikator Sasaran Strategis Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatkan Ketangguhan terhadap Bencana dalam Perubahan RPJMD 2018-2023**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja					Target Kinerja	Kondisi Akhir RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Indeks Resiko Bencana	Point	168,56	168,56	168,56	168,56	156,20	100	100	

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023

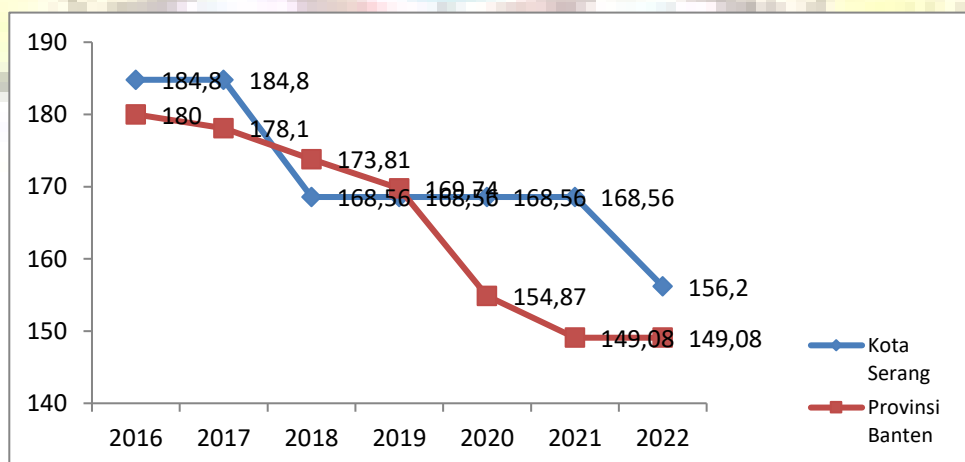
**Tabel 3.38**  
**Capaian Kinerja Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana Tahun 2022 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Tahun 2022	
				Realisasi	%
1.	Indeks Resiko Bencana	Point	100	156,20	43,80

Sumber : BPBD Kota Serang, 2023

Berdasarkan tabel di atas indeks resiko bencana terhadap kondisi akhir RPJMD harus menurunkan sebesar 56,20 % lagi agar target dapat tercapai dengan maksimal.

**Grafik 3.10**  
**Perkembangan Indeks Resiko Bencana Kota Serang Terhadap Provinsi Banten Tahun 2016–2022**



Sumber : BNPB, 2022





Dari grafik perkembangan IRBI dapat diketahui bahwa trend resiko bencana Kota Serang berada di atas IRB Banten selama tahun 2016-2022. Pada tahun 2018 nilainya di atas Kota Serang karena Provinsi Banten memiliki ancaman bencana yang beragam, diantaranya tsunami dan gempa bumi karena berdekatan dengan sesar Sumatera dan jalur cincin api. Bencana tsunami Selat Sunda memberikan dampak yang relatif besar, yaitu korban jiwa serta kerusakan dan kerugian infrastruktur dan perekonomian. Selain itu, Kota Cilegon memiliki pusat industri besar yang dapat meningkatkan risiko bencana jika aspek mitigasinya tidak dikelola dengan baik. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022, Provinsi Banten memiliki indeks risiko 149,08 (tinggi). Penanganan terhadap korban bencana telah dilaksanakan secara maksimal, mulai dari penanganan sampai pemulihan dampak bencana.

Faktor Pendorong Penanganan Bencana di Kota Serang antara lain :

- a. Adanya kajian risiko bencana yang memetakan potensi bencana, kerentanan dan kapasitas daerah;
- b. Dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program kegiatan;
- c. Semangat gotong royong dan kebersamaan masyarakat yang tinggi;
- d. Kesadaran masyarakat akan ancaman bencana semakin tinggi sehingga menuntut mereka untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menurunkan resiko bencana;
- e. Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran melalui program pemerintah daerah dan pusat;
- f. Peningkatan kompetensi personil dan relawan baik melalui program internal pemerintah kota Serang maupun melalui kerjasama dengan pemerintah provinsi, pusat dan pihak swasta;
- g. Adanya dukungan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk kerusakan-kerusakan yang bersifat non permanen dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- h. Dukungan Dana Kebutuhan dana darurat tanggap bencana ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;





- i. Adanya Aplikasi Media social (Facebook, Instagram dan website) serta layanan Pengaduan bencana seperti rabeg dan 112 sebagai salah satu aplikasi penanganan dan pengaduan bagi masyarakat jika ada kejadian bencana terjadi;
- j. Pembentukan Satlakar di Wilayah sebagai SDM pendukung proteksi dan penanggulangan bencana kebakaran oleh Satpol PP.

Untuk mencapai sasaran menurunkan resiko bencana dan meningkatnya ketangguhan terhadap bencana, disusunlah proses bisnis yang berisi uraian proses utama, pendukung dan manajemen. Berikut disajikan bagan proses bisnis pada sasaran Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana beserta intervensi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Serang.



**Gambar 3.23** Proses Bisnis Sasaran Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana

Berdasarkan proses bisnis yang sudah disusun, selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan beserta penanggung jawab. Berikut disajikan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran daerah beserta perangkat daerah pengampu.



Sumber : Bappeda Kota Serang, 2021

**Gambar 3.24 Logical Frame Sasaran Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana**

**Tabel 3.39 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Penanganan Bencana di Kota Serang**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Sinergisitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara pemerintah, swasta dan masyarakat belum maksimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membangun koordinasi dengan berbagai Lintas Perangkat Daerah, stakeholder dan masyarakat melalui Tim Tanggap Darurat Bencana Daerah;</li> <li>b. Memfasilitasi pembentukan kelurahan tangguh bencana merupakan sarana edukasi bagi masyarakat untuk memetakan potensi bencana di wilayahnya, membangun kebersamaan dan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana;</li> <li>c. Membangun koordinasi yang sinergis antara masyarakat pada tingkat kampung hingga tingkat kota dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (Forum KTB tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota);</li> <li>d. Melaksanakan simulasi penanggulangan bencana bersama-sama masyarakat maupun swasta.</li> </ul>



		<p>e. Membangun koordinasi dengan pihak swasta untuk mendapatkan CSR dalam penanggulangan bencana</p> <p>f. Peningkatan klasifikasi BPBD menjadi kategori A</p>
2	Belum meratanya pemahaman masyarakat tentang bahaya kebakaran dan cara pencegahan serta penanggulangannya	<p>Penyuluhan pada masyarakat di wilayah prioritas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat terhadap pencegahan kebakaran.</p>
3	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat terhadap pencegahan kebakaran dan upaya pada saat terjadinya kebakaran	

#### 4. TUJUAN STRATEGIS 4

**“Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah”**



*Peninjauan Pedagang Sayuran di Pasar Lama, Serang*



*Sidak Ke pasar Rau dalam rangka pengendalian inflasi bersama Sekda Provinsi Banten*



*Peninjauan Penilaian UMKM Kota Serang*



*Pemberian bantuan sembako untuk warga yang tak mampu*

**Gambar 3. 25 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Keunggulan Lokal**



Indikator Kinerja Utama ke 4 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke tiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023 yaitu “**Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat yang Berdaya Saing**” dan tujuan “**Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah**”. Pencapaian misi ini didukung oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai Perangkat Daerah utama.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Serang pada Tahun 2022 berkontraksi sebesar 4,71% dimana pencapaian tersebut meningkat dibandingkan Tahun 2021 yang mencapai 3,88%. Hal ini merupakan dampak dari masa transisi dari wabah covid-19 yang mengakibatkan banyak sektor mengalami perubahan yang signifikan terutama sektor perekonomian masyarakat Kota Serang. Berbagai macam upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menekan persebaran Covid-19 dengan harapan tidak memperburuk kondisi ekonomi di tahun 2021, sehingga di tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi meningkat secara signifikan.

**Tabel 3.40**  
**Capaian Pengukuran Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Serang Tahun 2022**

No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja Pelayanan
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	$LPE = \frac{(PDBt - PDBt-1)}{PDBt-1} \times 100\%$ <p><b>Dimana:</b>  PDBt = Produk Domestik Bruto pada tahun t  PDBt-1 = Produk Domestik Bruto pada tahun sebelumnya</p>	%	5,25	4,71	89,71	Tinggi

Sumber : BPS Kota Serang, 2022

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja untuk indikator laju pertumbuhan ekonomi sebesar 89,71% dengan kategori Tinggi. Hal ini



menunjukkan adanya pergerakan kembali perekonomian di Kota Serang yang sebelumnya mengalami penurunan di tahun 2021 dengan angka 3,88% yang berdampak kurangnya daya beli masyarakat dengan laju inflasi yang tinggi dan meningkatnya angka pengangguran.

Namun jika disandingkan dengan target yang harus dicapai pada masa periode akhir RPJMD, pencapaian di angka 4,71 masih berkategori Tinggi dengan nilai 84,68% dan masih harus mengejar sebanyak 0,84 point lagi bisa dilihat pada tabel 3.42. Hal ini harus prioritas perhatian bagi Pemerintah Kota Serang dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih sejahtera lagi.

**Tabel 3.41**  
**Realisasi dan Target LPE dalam Perubahan RPJMD**  
**Tahun 2018-2023**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja					Target Kinerja	Kondisi Akhir RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	LPE	Point	6,59	6,2	-1,29	3,88	4,71	5,55	5,55	

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023

**Tabel 3.42**  
**Capaian Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 Terhadap**  
**Kondisi Akhir RPJMD**

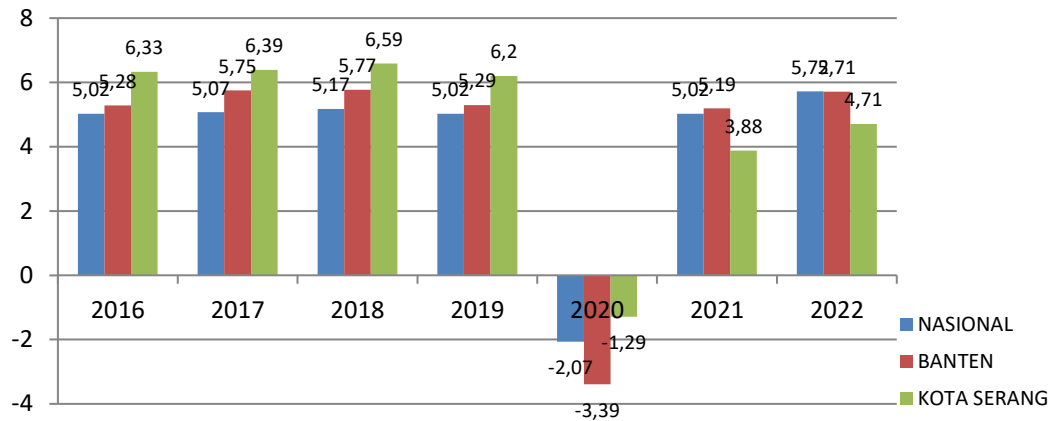
No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Tahun 2022	
				Realisasi	%
1.	LPE	Point	5,55	4,71	84,68

Sumber : BPS Kota Serang, 2022

Selama periode 2016-2022, laju pertumbuhan ekonomi Kota Serang selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Banten dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Serang relatif lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi makro secara regional Banten dan nasional. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kota Serang tahun 2016-2019 setiap tahunnya menunjukkan trend kenaikan dan cukup stabil terhadap gangguan/guncangan eksternal, baik dalam tataran global ataupun domestik.



**Grafik 3.11**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Serang Tahun 2016–2022**



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Pada Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kota Serang meningkat sebesar 4,71% dibandingkan tahun 2021, sementara pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,72% dan Provinsi Banten sebesar 5,71%. Oleh karena itu maka masih perlu akselerasi pertumbuhan ekonomi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

Faktor Penghambat yang menghambat percepatan kemajuan Kota Serang adalah:

1. Belum optimalnya daya saing produk unggulan daerah, terutama untuk produk-produk usaha mikro;
2. Belum optimalnya inovasi dalam hal ini terkait dengan kapasitas produksi, kapasitas inovasi, dan kemampuan daerah Kota Serang menarik investasi dalam kerangka meningkatkan struktur perekonomian.

Upaya dan strategi yang dilakukan :

1. Peningkatan daya beli masyarakat melalui operasi pasar (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan);
2. Menurunkan kemiskinan dan pengangguran terbuka melalui program pada karya pada setiap program pengadaan barang dan jasa;
3. Pembinaan UMKM dan usaha Kreatif serta kegiatan pemberdayaan yang lain.

Tujuan daerah tersebut ditunjang dengan sasaran strategis pembangunan Kota Serang sebagai berikut:





**a. Sasaran Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat**



*Pasar Lama Kota Serang*



*Rekrutmen Tenaga Kerja*



*Pemberian Bantuan Jaring Rampung untuk Nelayan*



*Bintek Persiapan Memasuki Dunia Kerja dalam mengurangi pengangguran*

**Gambar 3.26 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat**

Capaian Kinerja meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat diukur dengan 6 indikator yaitu tingkat inflasi daerah, indeks daya beli, PDRB Perkapita, indeks gini williamson, angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka dengan capaian sebagaimana tabel 3.43.

**Tabel 3.43**

**Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat Tahun 2022**

No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja Pelayanan
1.	Tingkat inflasi daerah		%	3	7,22	-40,67	Sangat Rendah





No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja Pelayanan
2	Indeks daya beli	$I_{DB} = \prod_{i=1}^n \left( \frac{P_{ik}}{P_{ij}} \right)^{1/n}$ Dimana : P <sub>ik</sub> : harga komoditas di kota Serang P <sub>ij</sub> : harga komoditas di Kota lain M : Jumlah komoditas	Poin	79,54	79,78	100,30	Sangat Tinggi
3	PDRB per kapita	$\frac{PDRB}{\Sigma \text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	Juta (Rp)/Jiwa	49,14	50,98	103,74	Sangat Tinggi
4	Indeks Gini	$I_w = \frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - Y)^2 f_i}{2Y^2}$ Dimana: I <sub>w</sub> = nilai indeks Williamson Y <sub>i</sub> = PDRB per kapita Kecamatan-i Y= PDRB per kapita Kabupaten f <sub>i</sub> = Jumlah Penduduk Kecamatan-i n= Jumlah Penduduk Kabupaten i = 1,2,3,...,x	Poin	0,348	0,354	98,28	Sangat Tinggi
5	Angka Kemiskinan	$P_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]$	%	5,86	5,94	98,63	Sangat Tinggi
6	Tingkat pengangguran terbuka	$\frac{\Sigma \text{Pengangguran}}{\Sigma \text{Angkatan Kerja}} \times 100\%$	%	9,06	8,17	109,82	Sangat Tinggi
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>						<b>78,35</b>	<b>Tinggi</b>

Sumber : BPS Kota Serang, 2023

Berdasarkan tabel di atas meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat melalui 6 indikator kinerja sasaran. Pada tahun 2022 untuk rata-rata capaian kinerja sebesar 78,35% dengan kategori pelayanan **Tinggi**. Indikator kinerja yang mengalami capaian paling tinggi adalah tingkat pengangguran terbuka sesuai dengan target yang direncanakan, sedangkan capaian yang paling rendah adalah Tingkat Inflasi Daerah yang mencapai 7,22% dari target 3,00% dengan capaian realisasi sebesar -40,67%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah Kota Serang dalam meningkatkan laju perekonomian mengalami kenaikan seperti tabel di bawah ini:



**Tabel 3.44**  
**Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat dalam Perubahan RPJMD 2018-2023**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja					Target Kinerja	Kondisi Akhir RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Tingkat inflasi daerah	%	3,78	3,06	1,91	2,23	7,22	3-5	3-5	
2	Indeks daya beli	Point	78,76	79,12	78,65	78,81	79,78	79,98	79,98	
3	PDRB per kapita	RpJuta/jiwa	42,76	45,89	45,17	47,32	50,98	51,67	51,67	
4	Indeks Gini	Poit	0,351	0,342	0,352	0,34	0,354	0,346	0,346	
5	Angka Kemiskinan	%	5,36	5,28	6,06	6,79	5,94	5,76	5,76	
6	Tingkat pengangguran terbuka	%	8,16	8,08	9,26	9,41	8,17	8,96	8,96	

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023

Berdasarkan tabel di bawah rata-rata capaian kinerja untuk 6 indikator di atas adalah sebesar 78,47%. Dalam tahun keempat RPJMD capaian kinerja perekonomian daerah dan daya beli masyarakat mengalami peningkatan kembali di tahun 2022 setelah pada tahun 2020 banyak mengalami penurunan dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD hal ini terjadi karena dampak dari terjadinya wabah Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak langkah dan upaya yang harus dilakukan pemerintah Kota Serang dalam meningkatkan perekonomian daerah dan daya beli masyarakat.

**Tabel 3.45**  
**Capaian Kinerja Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat Tahun 2022 Terhadap Kondisi akhir RPJMD**

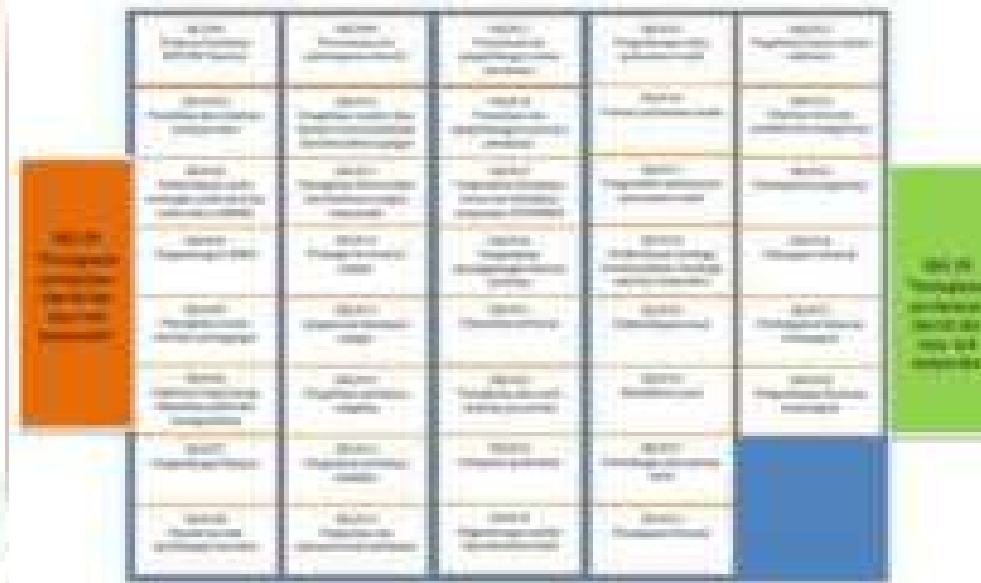
No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	%
1.	Tingkat inflasi daerah	%	3-5	3	7,22	-40,67
2.	Indeks daya beli	Poin	79,98	79,08	79,78	99,75
3.	PDRB per kapita	Rp Juta/Jiwa	51,67	46,99	50,98	103,74
4.	Indeks Gini	Poin	0,346	0,35	0,354	97,69
5.	Angka Kemiskinan	%	5,76	5,86	5,94	96,88



No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	%
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,96	9,16	8,17	108,82
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran</b>						<b>78,47</b>

Sumber : BPS Kota Serang, 2022

Untuk mencapai sasaran meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat, disusunlah proses bisnis yang berisi uraian proses utama, pendukung dan manajemen. Berikut disajikan bagan proses bisnis pada sasaran Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat beserta intervensi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Serang.



**Gambar 3.27 Proses Bisnis Sasaran Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat**

Berdasarkan proses bisnis yang sudah disusun, selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan beserta penanggung jawab. Berikut disajikan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran daerah beserta perangkat daerah pengampu.



**Gambar 3.28 Logical Frame Sasaran Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat**

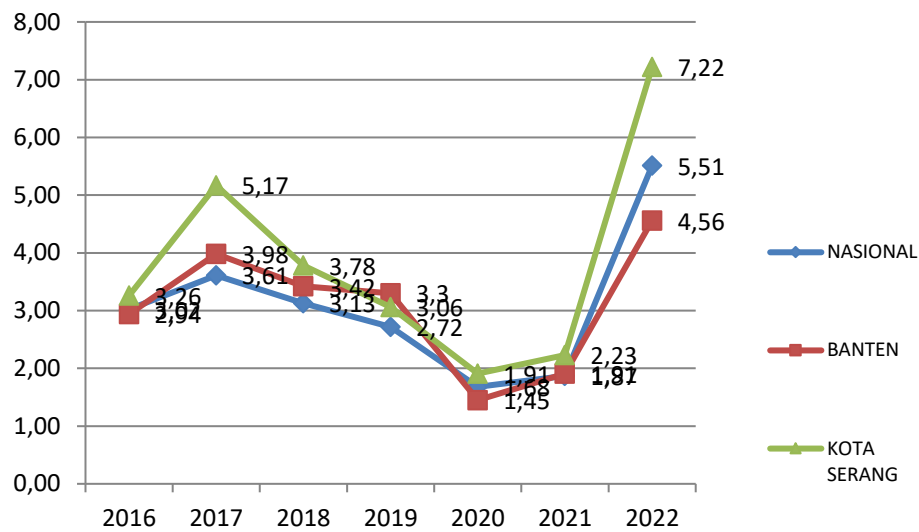
### 1. Tingkat inflasi daerah

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Tingkat inflasi Kota Serang tahun 2022 mencapai 7,22% lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 sebesar 2,23%.

Kota Serang selama periode 2016-2022 mengalami fluktuasi penurunan laju inflasi namun terjadi peningkatan kembali di tahun 2021 dan mengalami lonjakan yang cukup tinggi pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan Provinsi Banten dan Nasional, Angka inflasi Kota Serang berada di atasnya. Fluktuasi tingkat inflasi di Kota Serang dibandingkan nasional dan provinsi Banten terlihat pada grafik berikut:



**Grafik 3.12**  
**Laju Inflasi Kota Serang Terhadap Provinsi Banten dan Nasional**  
**Tahun 2016–2022**



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Penyebab tingginya inflasi 2022 secara nasional adalah adanya rencana penyesuaian subsidi, tingginya harga komoditas bahan pangan atau energi, tingginya inflasi natural yang disebabkan oleh pemulihan permintaan dari konsumen, tingginya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan faktor inflasi yang mempengaruhi di Kota Serang adalah volatile food (bahan makanan pokok yang mempengaruhi harga barang), harga beras dan penggunaan gas elpiji yang pasokannya terhambat. Faktor yang dapat mengendalikan inflasi di Kota Serang adalah ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi yang efektif antara pelaku pasar dan pengusaha.

Tingkat inflasi di suatu daerah akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas daerah. Oleh karena itu, inflasi harus terkendali dengan baik agar tercipta suasana yang kondusif. Pasar murah menjadi langkah terakhir ketika terjadi kenaikan harga yang cukup tinggi dari kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu pula Kota Serang harus bisa menyeimbangkan sebagai kota bukan produsen di bidang pertanian, peternakan dan harus mencukupi kebutuhan komoditas tersebut dengan menjaga ketersediaan kebutuhan barang jadi lainnya agar inflasi terkendali dengan baik.



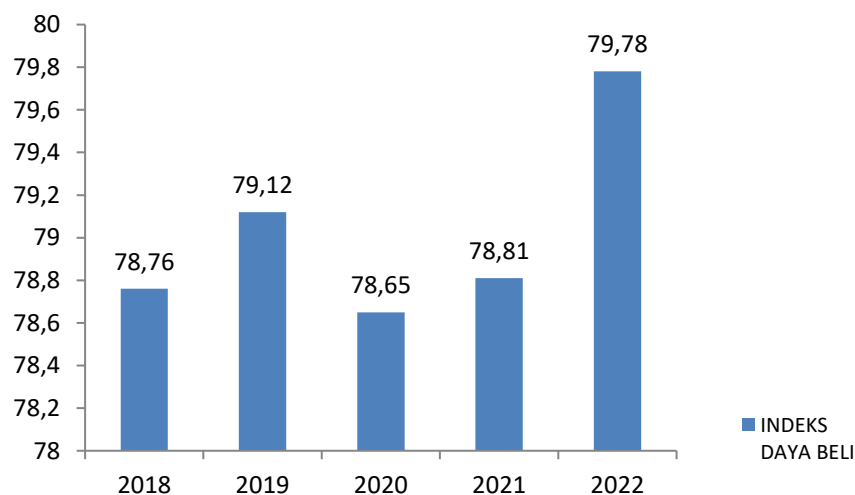
Upaya yang dilakukan oleh Kota Serang dalam mengendalikan inflasi:

- a. Operasi Pasar Murah
- b. Monitoring dan Pengawasan pasar
- c. Gerakan penanaman tanaman cepat panen yang termasuk dalam bahan makanan pokok
- d. Pengalokasian dari anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar 2 % untuk penanganan inflasi di Kota Serang

## 2. Indeks Daya Beli

Indeks Daya Beli merupakan kemampuan masyarakat sebagai konsumen untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat antara lain tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kebutuhan, kebiasaan masyarakat, harga barang dan mode. Indeks Daya Beli Kota Serang 2018 sebagai kondisi awal RPJMD.

**Grafik 3.13**  
**Indeks Daya Beli Kota Serang Tahun 2018–2022**



Sumber : BPS Kota Serang, 2023

Berdasarkan grafik di atas indeks daya beli Kota Serang Tahun 2018 adalah 78,76 poin dan sepanjang tahun 2018-2022 terjadi fluktuasi nilai kenaikan di tahun 2019 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 akibat menurunnya daya beli masyarakat yang terdampak covid-19 dimana

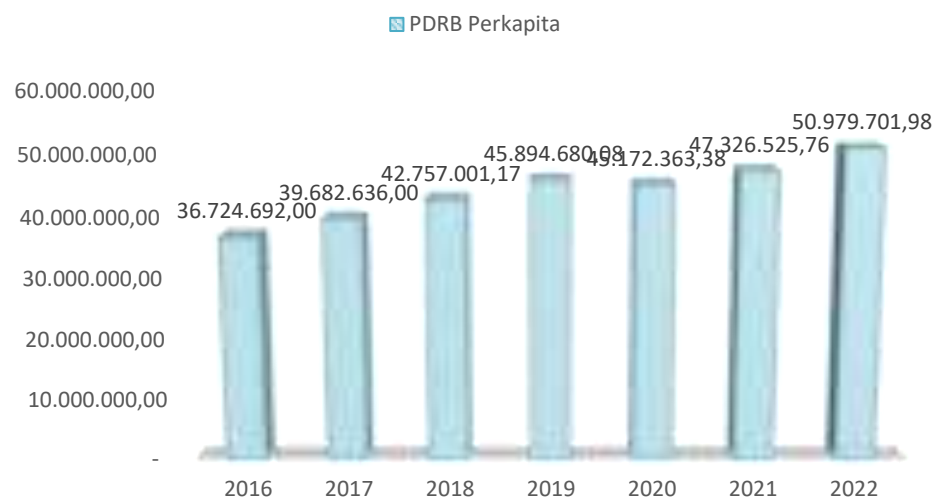


sektor perekonomian di Kota Serang mengalami penurunan yang sangat signifikan khususnya pada tingkat daya beli masyarakat. Adapun untuk tahun 2022 indeks daya beli mencapai 79,78 dari yang ditargetkan sebesar 79,54 atau 100,30 %.

### 3. PDRB Per Kapita

PDRB per Kapita merupakan indikator kesejahteraan yang dihitung dengan cara membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku terhadap jumlah penduduk. Berdasarkan data BPS sepanjang tahun 2016-2022, diketahui bahwa PDRB per kapita Kota Serang mengalami kecenderungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Gambaran trend perkembangan PDRB Per kapita ini dapat dilihat pada grafik berikut ini:

**Grafik 3.14**  
**PDRB PerKapita Kota Serang Tahun 2016–2022**



Sumber : BPS Kota Serang, 2023

Fakta ini menjelaskan kecenderungan meningkatnya kesejahteraan rakyat sebagaimana tercermin dari trend peningkatan nilai PDRB per kapita tersebut yang tercatat naik signifikan sebesar 28,98 persen dari sebesar Rp 47,32 juta per jiwa pada tahun 2021 menjadi Rp 50,98 juta per jiwa pada tahun 2022. Pada Tahun 2020 karena dampak pandemi Covid 19 menyebabkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku terkontraksi sehingga mempengaruhi nilai PDRB perkapita menjadi sebesar Rp 45,17 juta per jiwa.





Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, maka Pemerintah Kota Serang pada tahun 2022 harus bisa mempertahankan dan dapat meningkatkan pendapatan per kapita di tahun yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kota Serang. Pemerataan pendapatan juga menggambarkan bagaimana manfaat terhadap akses pembangunan telah dirasakan oleh warga negara. Namun demikian, penting untuk diperhatikan, bahwa sebagaimana halnya banyak capaian pembangunan dan pemerataan pendapatan juga bukan hanya merupakan hasil dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau negara sendiri.

#### 4. Indeks Gini

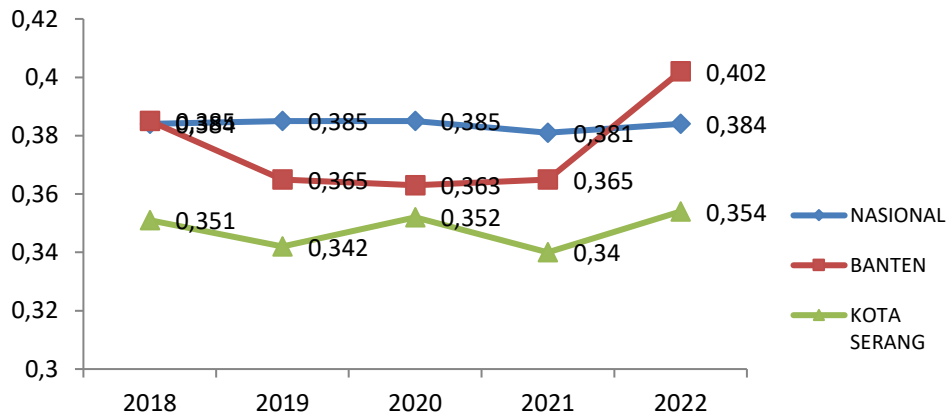
Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebagai data dasar. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Bila Gini Ratio mendekati nol menunjukkan ketimpangan rendah atau tingkat pemerataannya semakin baik. Sebaliknya bila Gini Ratio nya mendekati satu menunjukkan ketimpangan tinggi atau tingkat pemerataannya semakin buruk. Oshima menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi. Untuk itu ditentukan kriteria sebagai berikut :

- a. Ketimpangan taraf rendah, bila  $GR < 0,35$
- b. Ketimpangan taraf sedang, bila  $GR$  antara  $0,35 - 0,5$
- c. Ketimpangan taraf tinggi, bila  $GR > 0,5$

Pertumbuhan realisasi capaian indeks gini Kota Serang terhadap Provinsi Banten dan Nasional dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terlihat pada grafik di bawah ini:



**Grafik 3.15**  
**Indeks Gini Kota Serang Terhadap Provinsi Banten dan Nasional**  
**Tahun 2018–2022**



Sumber : BPS, Tahun 2023

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa Indeks Gini Kota Serang 2018 sebagai kondisi awal RPJMD Kota Serang Tahun 2018–2023 adalah 0,351 poin yang menandakan ketimpangan yang terjadi dalam kategori sedang atau moderat. Adapun untuk tahun 2022 indeks gini mencapai 0,354 atau berada pada kategori ketimpangan wilayah rendah yang artinya ketimpangan terjadi sudah mulai terjadi pemerataan di antara wilayah hal ini di sebabkan karena pembangunan di segala bidang ekonomi, sosial, budaya dan infrastruktur mulai merata di semua wilayah dengan dilaksanakannya program-program kewilayahan baik berupa program yang bersumber dari DAU, DAK maupun APBD pada setiap kecamatan dan seluruh kelurahan.

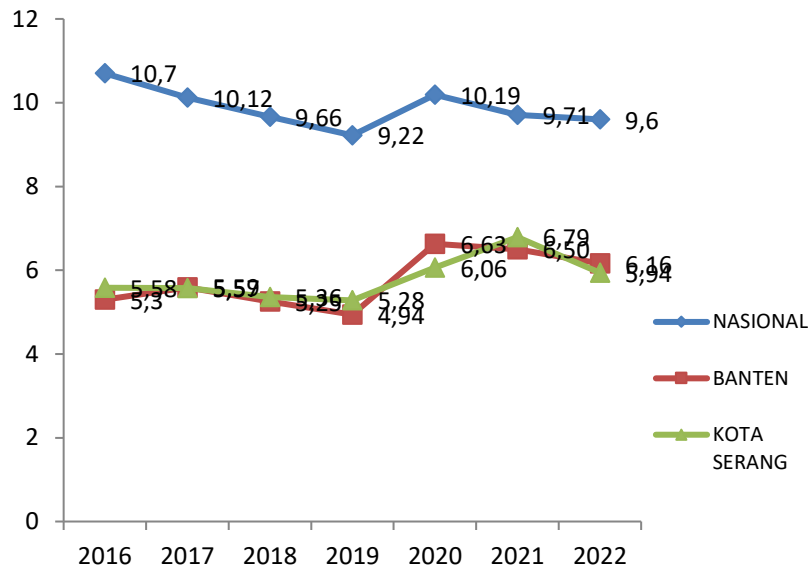
Indeks gini Kota Serang nilainya dibawah Provinsi Banten dan Nasional dengan kategori sedang dimana antar wilayah sudah hampir merata pembangunannya.

## 5. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan di seluruh daerah perkotaan yang harus segera ditanggulangi. Angka kemiskinan yang terus menurun merupakan potret keberhasilan kinerja pemerintah dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat..



**Grafik 3.16**  
**Persentase Penduduk Miskin Kota Serang terhadap Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2016–2022**



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan grafik di atas terlihat fluktuasi pergerakan persentase penduduk miskin dari tahun 2016-2022 yang terjadi pada Kota Serang, Provinsi Banten dan Nasional. Pada tahun 2019 persentase penduduk miskin sudah mengalami penurunan namun kembali melonjak pada tahun 2020 walaupun posisi Kota Serang masih di bawah angka Nasional dan Provinsi Banten namun pada tahun 2022 masa transisi new normal dari wabah covid-19 Kota Serang mengalami penurunan kembali sebesar 5,94% berada di bawah angka Provinsi Banten dan nasional.

Pemerintah Kota Serang dari tahun ke tahun telah melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin dari 5,36% tahun 2018 turun menjadi 5,28% pada tahun 2019, Namun pada tahun 2020 terjadi peningkatan angka kemiskinan mencapai 6,06% dan pada tahun 2021 semakin meningkat menjadi 6,69%. Setelah kenaikan signifikan itu pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 5,94% dan melebihi dari target yang telah ditetapkan di tahun ini.

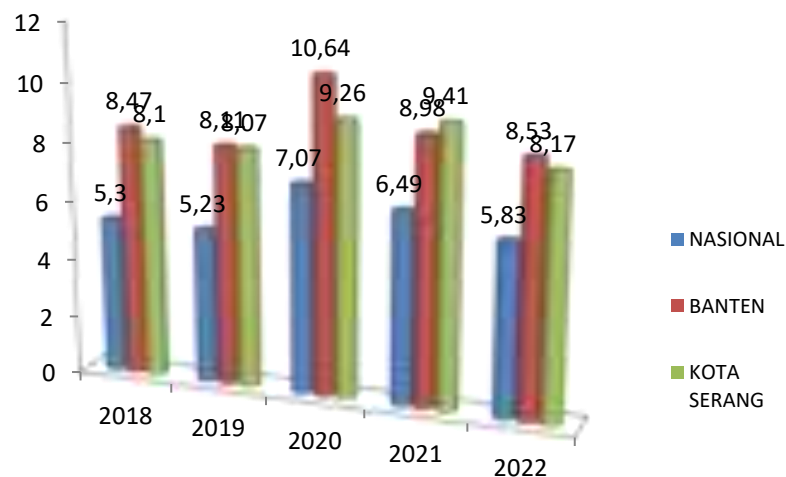


## 6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada Tahun 2022 pelaksanaan program untuk peningkatan ketenaga kerjaan masih relatif rendah seperti bursa kerja, pelatihan tenaga kerja dan lain sebagainya. Namun permasalahan mendasar dibidang ketenagakerjaan adalah masih tingginya angka pengangguran. Hal ini disebabkan antara lain tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja, serta rendahnya kompetensi tenaga kerja dan tingkat pendidikan tenaga kerja, selain itu perkembangan industri kreatif dan wirausahawan muda belum optimal, berpengaruh besar terhadap kondisi ketenaga kerjaan, PHK, perusahaan banyak yang mengalami pailit sehingga Tingkat pengangguran terbuka Kota Serang meningkat dari 9,41% pada Tahun 2021 menjadi sebesar 8,17% di tahun 2022. Hal ini disebabkan karena banyak tenaga kerja yang terdampak pengurangan tenaga kerja dan dirumahkan akibat wabah covid-19 yang melanda perusahaan.

Berdasarkan grafik di bawah ini angka tingkat pengangguran terbuka Kota Serang berada di atas nilai Provinsi Banten dan Nasional pada tahun 2022, mengalami penurunan baik angka nasional atau provinsi Banten.

**Grafik 3.17**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Serang terhadap**  
**Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2018–2022**



Sumber : Badan Pusat Statistik , 2023



Faktor yang menghambat/ kendala meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kota Serang adalah:

- a. Adanya pembangunan Infrastruktur yang tidak merata,
- b. Pusat-pusat perekonomian dan perdagangan yang tidak merata,
- c. Pemberlakuan UMK per wilayah,
- d. Persebaran industri yang tidak merata.
- e. Pertumbuhan ekonomi di Kota Serang masih tergantung pada jasa dan perdagangan serta daya beli masyarakat yang masih rendah
- f. Kebijakan perekonomian masih tergantung dengan pusat seperti factor penyebab inflasi

- g. Banyak Penduduk Kota Serang yang mencari pekerjaan di Luar Kota Serang mengakibatkan rendahnya pendapatan dari sector tenaga kerja

Langkah dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan perekonomian daerah dan daya beli masyarakat antara lain :

- a. Sinkronisasi program-program yang dapat mengentaskan kemiskinan atau dapat memperkecil angka kedalaman kemiskinan
- b. Pemerataan pembangunan infrastruktur,
- c. Sinkronisasi program-program pemerintah Kota Serang yang dapat dilaksanakan di setiap wilayah baik di perkotaan sehingga pemerataan pembangunan akan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
- d. Memonitor pasokan dan distribusi barang khususnya barang dan jasa yang berkontribusi besar terhadap hajat hidup orang banyak
- e. Meningkatkan sector pendapatan dari pajak dan retribusi untuk lebih memaksimalkan pembangunan di seluruh wilayah
- f. Memudahkan perijinan bagi para pengusaha yang ingin berinvestasi di Kota Serang
- g. Mengadakan pasar murah bagi para masyarakat dalam menekan laju inflasi
- h. Memberikan ketrampilan dan keahlian bagi para lulusan sekolah agar bisa berwirausaha



- i. Memberikan bantuan dan subsidi bagi para pedagang, petani dan nelayan serta warga berpenghasilan rendah untuk bisa mendapatkan modal berwirausaha.

## 5. TUJUAN STRATEGIS 5

**“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi”**

Indikator Kinerja Utama ke 5 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke empat yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 yaitu **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik”** dan tujuan **“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi”**. Pencapaian misi ini didukung oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Bappeda, BPKAD, Bapenda, BKPSDM, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kecamatan dan Kesbangpol sebagai Perangkat Daerah utama.



*Mobil Pelayanan Keliling Pembayaran Pajak*



*Pelayanan Adminduk*



*Pelayanan Keliling Pembuatan Dokumen Adminduk*



*Pelayanan Perijinan Satu Pintu oleh DPMPTSP*

**Gambar 3.29 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Mewujudkan Layanan Publik yang Prima**





Pada komponen pengungkit tahun 2022 mengalami perubahan komposisi yang di bagi ke dalam 3 bagian yaitu Pemenuhan, hasil antara area perubahan dan reform yang penjabarannya dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.46**  
**Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Serang Tahun 2020-2022**

No	Komponen Penilai	Bobot	Nilai		
			2020	2021	2022
<b>I</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>				
1.	Pemenuhan	20	11,68	13,76	14,00
2.	Hasil Antara Perubahan	10	5,57	4,66	5,63
3.	Reform	30	8,87	10,89	11,63
<b>Total Komponen Pengungkit (A)</b>		<b>60</b>	<b>26,12</b>	<b>29,31</b>	<b>31,26</b>
<b>II</b>	<b>Komponen Hasil</b>				
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10	6,82	6,87	7,13
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10	8,98	8,02	9,13
3.	Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	10	9,40	6,29	7,84
4.	Kinerja Organisasi	10	6,98	7,20	5,55
<b>Total Komponen Hasil (B)</b>		<b>40</b>	<b>32,18</b>	<b>28,38</b>	<b>29,65</b>
<b>Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)</b>		<b>100</b>	<b>58,30</b>	<b>57,69</b>	<b>60,91</b>
<b>Kategori</b>			<b>CC</b>	<b>CC</b>	<b>B</b>

Sumber : Hasil Penilaian KemenpanRB (Hasil olahan), 2023

**Tabel 3.47**  
**Hasil antara Penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Serang Tahun 2020-2022**

NO	HASIL ANTARA	SKALA	NILAI			SUMBER
			2020	2021	2022	
1	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	51 (Cukup)	28,08	53,91	ANRI
2	Merit System	0-400	138 (Buruk)	148	171,50	KASN
3	Profesionalitas ASN	0-100	70 (Rendah)	39,84	43,28	BKN
4	Maturitas SPIP	0-5	3 (Terdefinisi)	2,00	3,00	BPKP
5	Kapabilitas APIP	0-5	2 (Infrastructure)	3,00	3,00	BPKP
6	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan	0-100	78,35 (Zona Kuning)	63,31	79,24	Ombudsman RI
7	Indeks SPBE	1-5	-	2,97	2,49	Kementrian PANRB
8	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	-	34,29	29,50	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barjas Pemerintah RI





NO	HASIL ANTARA	SKALA	NILAI			SUMBER
			2020	2021	2022	
9	Indeks Pelayanan Publik	0-5	-	2,83	3,49	Kementrian PANRB
10	Reformasi Hukum	0-100	-	-	60,95	Kementrian hukum dan HAM

Sumber : Hasil Penilaian KemenpanRB (Hasil olahan), 2023

Jika dilihat dari tabel di atas pada tahun 2022 mengalami kenaikan pada kualitas pengelolaan arsip, merit system, profesionalitas ASN, Matiritas SPIP, kepatuhan standar pelayanan dan indeks pelayanan public. Sedangkan Indeks SPBE dan Indeks tata Kelola barang dan jasa mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2022 terdapat reformasi hukum dimana Kota Serang sudah meraih kategori Baik dengan nilai 60,95 point. Sehingga secara keseluruhan Pemerintah Kota Serang untuk reformasi birokrasi sudah mengalami peningkatan di berbagai sector. Berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Serang oleh Kemenpan RB, indeks reformasi birokrasi Kota Serang untuk tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.48**  
**Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Serang Tahun 2017-2022**

No	Komponen Penilai	Bobot	Nilai					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Total Komponen Pengungkit (A)	60	28,67	28,88	29,74	26,12	29,31	31,26
	Total Komponen Hasil (B)	40	27,98	27,35	29,40	32,18	28,38	29,65
	<b>Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)</b>	<b>100</b>	<b>56,65</b>	<b>56,23</b>	<b>59,14</b>	<b>58,30</b>	<b>57,69</b>	<b>60,91</b>
	<b>Kategori</b>		<b>CC</b>	<b>CC</b>	<b>CC</b>	<b>CC</b>	<b>CC</b>	<b>B</b>

Sumber : Hasil Penilaian KemenpanRB (Hasil olahan)

Berdasarkan tabel tersebut hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Serang telah berupaya untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pengungkit dan hasil. Namun demikian Pemerintah Kota Serang perlu meningkatkan upaya yang lebih baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.



Trend indeks RB dari tahun 2017 mengalami fluktuasi angka dimana pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 59,14 namun terjadi penurunan kembali di tahun 2020 sebesar 58,30 dan di tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan dengan nilai sebesar 60,91 atau berkategori Baik. Hal ini disebabkan terjadi peningkatan pada komponen pengungkit dan hasil sebesar 2,22 point.

**Tabel 3.49**  
**Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Serang Tahun 2022**

No.	Indikator Kinerja Utama	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja Pelayanan
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai diperoleh dari Evaluasi yang dilakukan oleh Kemenpan RB	Poin	60,5	60,91	99,85	Sangat tinggi

Sumber : Hasil Penilaian KemenpanRB (Hasil olahan), 2021

Berdasarkan target nilai 60,5 pada tahun 2022 tercapai 99,85% dengan realisasi 60,91 point, hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Serang dalam mencapai angka tersebut sangat tinggi dengan kategori indeks RB tersebut B atau baik dan masih banyak yang harus di perbaiki dalam tata kelola pemerintahan agar sesuai dengan tujuan dalam misi walikota terpilih.

**Tabel 3.50**  
**Realisasi dan Target Indeks Reformasi Birokrasi dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja					Target Kinerja	Kondisi Akhir
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	RPJMD	
1	Indeks RB	Poin	56,23	59,14	58,3	57,69	60,91	61,5	61,5	

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023

Target pencapaian nilai Indeks reformasi birokrasi pada akhir tahun masa jabatan walikota terpilih adalah 61,5 point dengan kategori Baik. Berdasarkan tabel di atas masih ada 0,59 point lagi yang harus di capai agar sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini sangat membutuhkan perhatian dan prioritas bagi semua perangkat daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.



Berikut disampaikan penjelasan terkait komponen hasil yang djabarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.51**  
**Komponen Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2022**

No	Komponen Hasil	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber data
1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	BPK
2	Nilai Sakip	0-100	55,33	59,04	Kementrian PANRB
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	80,15	91,30	Kementrian PANRB
4	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	62,88	78,39	Survey Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh KPK
5	Survey Internal Organisasi	0-100	73,71	74,87	SPI Internal oleh KPK

Sumber : Hasil Penilaian Evaluasi Kemenpan RB. 2023

Beberapa upaya yang dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi evaluasi Tahun 2021 adalah :

1. Membuat rencana aksi tingkat Kota dan membuat rencana kerja tingkat perangkat daerah;
2. Menunjuk agen perubahan baik di level pusat maupun di setiap perangkat daerah;
3. Menetapkan peta proses bisnis ini di tingkat Pemerintah Daerah dengan Keputusan Walikota Serang Nomor : 060/Kep.190-huk/2021;
4. Melakukan assessment terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas;
5. Melakukan bimbingan teknis peningkatan pelayanan bagi Sebagian petugas pelayanan dan mengoptimalkan teknologi informasi pada pemberian layanan.

Selanjutnya untuk menindak lanjuti hasil evaluasi penilaian reformasi birokrasi tahun 2022, Pemerintah Kota Serang melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan di antaranya:



**Tabel 3.52**  
**Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3
1	Melakukan penguatan dan penajaman reformasi birokrasi pada tingkat pemerintah daerah hingga ke level OPD	Pembinaan perumusan dan penyusunan nilai-nilai yang dapat ditetapkan sebagai nilai-nilai organisasi dalam melakukan penajaman dan merubah mindset dan <i>culture set</i> para ASN lingkup Pemerintah Kota Serang
		Inventarisasi data nilai-nilai organisasi Perangkat Daerah melalui permintaan surat kedinasan
		Melakukan Monitoring secara acak ke Perangkat Daerah untuk memastikan bahwa nilai-nilai organisasi telah terinternalisasi ke setiap individu di Perangkat Daerah tersebut
2	Program-program yang dituangkan dalam roadmap Reformasi Birokrasi serta rencana kerja pada level OPD diharapkan dapat fokus pada upaya-upaya konkret yang akan dilakukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan publik yang berkualitas	Melakukan pendampingan dalam membuat rencana kerja perangkat daerah agar bisa mengacu pada roadmap reformasi birokrasi Kota Serang
		Melakukan Pendampingan dan monitoring kepada perangkat daerah terkait dengan Pembentukan Kelompok Budaya Kerja (KBK) di tiap-tiap perangkat daerah
3	Menyusun rencana aksi reformasi birokrasi berikut dengan ukuran keberhasilannya untuk dijadikan acuan oleh pusat dan OPD dalam membangun reformasi birokrasi	Rencana aksi sudah tertuang dalam roadmap reformasi birokrasi bab IV yang tertuang dalam Perwal No. 51 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kota Serang Tahun 2020-2023



No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3
4	Memetakan kebijakan yang ada agar dapat mendeteksi kebijakan yang tidak harmonis dan kebijakan yang tumpang tindih antara kebijakan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan OPD untuk selanjutnya disinkronkan atau dicabut	Sinkronisasi Undang undang No. 11 tentang Cipta kerja
5	Menyusun peta proses bisnis secara menyeluruh dan melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis berkala untuk memastikan pencapaian kinerja berjalan secara optimal	Melaksanakan evaluasi penyusunan peta proses bisnis kepada seluruh perangkat daerah
	serta melakukan optimalisasi penerapan e-government yang terintegrasi dengan menyusun perencanaan dan evaluasi secara berkala	Pengembangan Aplikasi E- Government - Aplikasi Layanan RT/RW - Aplikasi Manajemen IOT Lampu Jalan - Aplikasi Sistem Pemetaan - Aplikasi Manajemen Kepegawaian - Aplikasi Tanda Tangan Elektronik  Membuat / Menyusun Dokumen Pendukung SPBE - Dokumen Masteplan Smart City - Dokumen Manajemen Resiko - Dokumen Manajemen Pengetahuan - Dokumen Rencana Induk SPBE/Arsitektur SPBE
6	Meningkatkan Pengelolaan sistem manajemen sumberdaya manusia antara lain dengan menyusun standar kompetensi jabatan melakukan asesment pegawai secara menyeluruh, menyusun HCDP dan pemetaan talenta pegawai sebagai dasar penempatan jabatan yang bersifat kritika/suksesi	Menyusun Perwal Standar Kompetensi Jabatan
		Melakukan Assesment
		Melakukan talent Poll
		Melakukan Assesment
		Melakukan talent Poll
		Menggunakan track record assesment untuk HCDP
		Mengadakan diklat fungsional
		Mengadakan diklat struktural
		Mengadakan diklat fungsional
Mengadakan diklat struktural		
Melakukan integrasi aplikasi kepegawaian dengan simpegnas		



No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3
7	Meningkatkan Kapabilitas APIP untuk menjadi Trusted Advisor and Quality Assurance melalui peningkatan kuantitas dan kapasitas auditor serta secara bertahap merubah budaya dan cara kerja APIP untuk lebih mengawal pencapaian kinerja dan identifikasi resikonya dibandingkan sebatas melakukan reviu, audit dan evaluasi rutin	Menambah SDM APIP pembentukan APIP
		Menambah SDM APIP pengangkatan APIP
		Melakukan perubahan Perwal manajemen resiko
		Melakukan reviu RKPD Tahun 2023
		Melakukan reviu RKPD Perubahan Tahun 2022
		Melakukan Reviu SSH, ASB dan HSPK
8	Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengawasan internal seperti penanganan gratifikasi, WBS, pengelolaan pengaduan masyarakat, benturan kepentingan serta penerapan sistem pengendalian internal pemerintah baik ditingkat pemerintah daerah maupun ditingkat OPD	Melakukan sosialisasi terkait gratifikasi, benturan kepentingan, cyber pungli, whistle Blowing system
		Menyusun kebijakan terkait pengawasan internal
		Monitoring dan Evaluasi terkait pengawasan internal di seluruh perangkat daerah
		Sosialisasi Zona Integritas dan Pendampingannya
9	Meningkatkan kualitas pelayanan publik salah satunya dengan menindaklanjuti hasil penilaian survey kepuasan masyarakat yang dilakukan secara menyeluruh dan mendorong lahirnya inovasi-invasi dalam hal pelayanan agar mampu memberikan kepuasan secara maksimal kepada masyarakat	a. Melakukan rapat Persiapan MPP b. Melaksanakan rapat pembahasan Raperwal Penyelenggaraan MPP c. Melaksanakan Kegiatan Inovasi Manjing ( Melayani Izin Dengan Gratis ) Kepada Masyarakat Untuk memperoleh NIB(Nomor Induk Berusaha) dan SPP - IRT (Sertifikat Pemenuhan Komitmen) d. Melaksanakan Bisnis Meeting dengan Para Pengusaha di kota Serang e. Melaksanakan SKM (survai Kepuasan Masyarakat) Semester Satu di Kota Serang f. Bimtek PTSP untuk Mendukung Penilaian BKPM g. Penyediaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana untuk mendukung Mall Pelayanan Publik (MPP)
		Membuat Link pada setiap OPD pealyanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan





Tujuan daerah tersebut ditunjang dengan sasaran strategis pembangunan Kota Serang sebagai berikut:

**a. Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**



*Mall Pelayanan Publik Kota Serang*



*Kesepakatan Data dalam Penyusunan LKPJ Walikota*

**Gambar 3.30 Upaya Pemerintah Kota Serang Dalam Meningkatkan Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik**

Berdasarkan tabel di bawah ini dari empat indikator tersebut pada tahun 2022 capaiannya kategori **Sangat Tinggi** dengan rata-rata kinerja 97,37%. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan oleh Bappeda Kota Serang dan Hasil Evaluasi AKIP itu merupakan data tahun 2022 sedangkan Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum keluar hasil penilaiannya dari instansi yang bertanggung jawab dalam evaluasi. Nilai indikator LPPD Kota untuk tahun 2020 dan 2021 belum ada nilainya dari Kemendagri.

**Tabel 3.53**  
**Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022**

No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja Pelayanan
1.	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	$\frac{\text{Total nilai per unsur}}{\text{Total unsur yang dinilai}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Poin	79	78,61	99,51	Sangat Tinggi
2	Nilai LPPD Kota	Hasil Evaluasi atas nilai LPPD oleh Kemendagri	Poin	34.550	na	na	-





No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja Pelayanan
3	Hasil Evaluasi AKIP	Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP oleh KemenpanRB	Poin	62	59,04	95,23	Sangat Tinggi
4	Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan	Kategori	WTP	na	na	-
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>						<b>97,37</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Serang (Hasil Olahan, 2022)

Tanda \* : angka Sementara

**Tabel 3.54**  
**Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Perubahan RPJMD 2018-2023**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja					Target Kinerja	Kondisi Akhir RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	72,00	77,80	77,74	77,68	78,61	81,00	81,00	
2	Nilai LPPD Kota	Poin	3.2346	34.365	34.426	34.365 *	34.365 *	34.600	34.600	
3	Hasil Evaluasi AKIP	Poin	52,31	54,64	55,33	58,68	59,04	63,00	63,00	
4	Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP *	WTP	WTP	

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023

Tanda \* : angka Sementara

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun sudah terjadi peningkatan yang signifikan dalam peningkatan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.



**Tabel 3.55**  
**Capaian Kinerja Meningkatkan Kualitas dan Akuntabilitas**  
**Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun**  
**2021 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Tahun 2021	
				Realisasi	%
1.	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	81	77,68	95,90
2.	Nilai LPPD Kota	point	34.600	34.365	99,32
3.	Hasil Evaluasi AKIP	point	63,00	58,68	93,14
4.	Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Kategori	WTP	WTP	100
<b>Rata-rata terhadap RPJMD</b>					<b>96,95</b>

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Serang (Hasil olahan), 2022

Berdasarkan tabel di atas capaian realisasi kinerja tahun 2021 terhadap kondisi akhir RPJMD dari empat komponen indikator kinerja sasaran di atas mencapai rata-rata 96,95%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi capaian sebagian besar sudah bisa tercapai di akhir masa jabatan Walikota terpilih namun untuk hasil evaluasi AKIP masih perlu upaya untuk meningkatkan hasil karena masih dalam kategori cukup memuaskan belum berkategori baik dan masih 17,41% lagi untuk mencapai target yang diharapkan.

**Tabel 3.56**  
**Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas**  
**Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun**  
**2022 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Tahun 2022	
				Realisasi	%
1.	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	81	78,61	97,05
2.	Nilai LPPD Kota	Kategori	34.600	Na	-
3.	Hasil Evaluasi AKIP	Kategori	63,00	59,04	95,23
4.	Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Kategori	WTP	Na	-
<b>Rata-rata terhadap RPJMD</b>					<b>96,14</b>

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Serang (Hasil Olahan), 2021



Capaian kinerja tahun 2022 untuk sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah hanya nilai indeks kepasan masyarakat (IKM) dan hasil evaluasi AKIP yang sudah keluar tahun 2022 dengan mencapai rata-rata nilai 96,14% untuk kedua indikator tersebut dengan kinerja pelayanan *Sangat Tinggi* sedangkan untuk nilai LPPD kota dan Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum bisa dihitung karena hasil penilaian keluar di bulan April Tahun 2023.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah, disusunlah proses bisnis yang berisi uraian proses utama, pendukung dan manajemen. Berikut disajikan bagan proses bisnis pada sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah beserta intervensi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Serang.



**Gambar 3.31 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan proses bisnis yang sudah disusun, selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan beserta penanggung jawab. Berikut disajikan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran daerah beserta perangkat daerah pengampu.



Sumber : Bappeda Kota Serang, 2021

**Gambar 3.32 Logical Frame Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

### 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kota Serang, yang obyeknya dibatasi pada 28 (dua puluh delapan) unit penyelenggara pelayanan publik yaitu: Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) di seluruh wilayah Kota Serang yang berjumlah 16 (enam belas) PKM, RSUD Kota Serang, pelayanan perijinan dan non perijinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pelayanan pajak dan retribusi daerah di Badan Pendapatan Daerah, pelayanan pembuatan Kartu Kuning di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pelayanan Uji Kir (*Keur*) dan Ijin Trayek di Dinas Perhubungan, serta ragam pelayanan di Pusat Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di seluruh kecamatan di Kota Serang yang berjumlah 6 (enam) unit pelayanan.

Berikut ini disajikan perbandingan capaian indeks kepuasan masyarakat berdasarkan unsurnya sebagaimana dijelaskan di atas, secara



grafis dapat dilihat pada grafik IKM Kota Serang berdasarkan unsur berikut ini.

**Tabel 3.57**  
**Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan**

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,000 – 2,5996	20,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,0640	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,000	88,31 – 100	A	Sangat Baik

Sumber : Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017

**Tabel 3.58**  
**Capaian Pengukuran Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022**

No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja Pelayanan
1.	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	$\frac{\text{Total nilai per unsur}}{\text{Total unsur yang dinilai}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Poin	79	78,61	99,51	Sangat Tinggi

Sumber : Bappeda Kota Serang, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 sebesar 99,51% yang diperoleh dari realisasi 78,61 poin dari target 70 point.

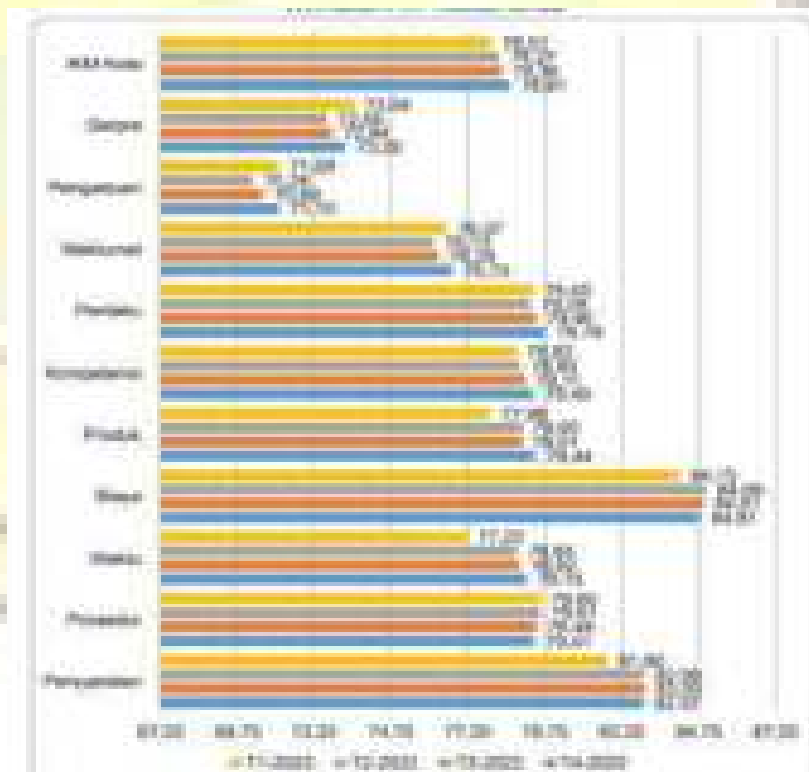
Berdasarkan pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap seluruh unit penyelenggara pelayanan publik yang menjadi obyek survei ini, diperoleh kesimpulan bahwa secara umum Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Serang secara agregat pada triwulan I-IV mengalami trend kenaikan dari sebesar 78,01 pada triwulan I menjadi 78,61 pada triwulan IV. Trend kenaikan ini menjadi indikasi fase *recovery* pelayanan publik di tengah situasi pandemi, meskipun secara kualitatif masih berstatus quo pada kategori mutu pelayanan B. Kenaikan yang tidak signifikan ini teridentifikasi masih berkaitan erat dengan situasi Pandemi yang terjadi



sejak awal tahun 2020-2021 dan hingga kini belum pulih sepenuhnya, sehingga berbagai kebijakan pembatasan sosial atau kegiatan masyarakat masih diberlakukan di sejumlah tempat secara kondisional dan diyakini memiliki dampak langsung yang cukup signifikan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang bersifat langsung, seperti perubahan jam kerja, pengetatan prosedur masuk antrian, pembatasan antrian, pembatasan layanan harian, hingga penutupan layanan yang beberapa kali terjadi karena adanya kasus pada unit layanan terkait

Berikut ini disajikan perbandingan capaian indeks kepuasan masyarakat berdasarkan unsurnya sebagaimana dijelaskan di atas, secara grafis dapat dilihat pada grafik IKM Kota Serang berdasarkan unsur berikut ini.

**Grafik.18**  
**IKM Kota Serang Berdasar Unsur Triwulan I-IV Tahun 2022**



Sumber : Bappeda Kota Serang, 2023

Dari 10 unsur yang dinilai, 7 (tujuh) dari 10 (sepuluh) unsur yang dinilai telah mencapai kualifikasi baik atau memuaskan atau mutu pelayanan B karena berada dalam rentang indeks antara 76,61 hingga 88,30; namun belum ada satu pun unsur yang mencapai kualifikasi A dengan

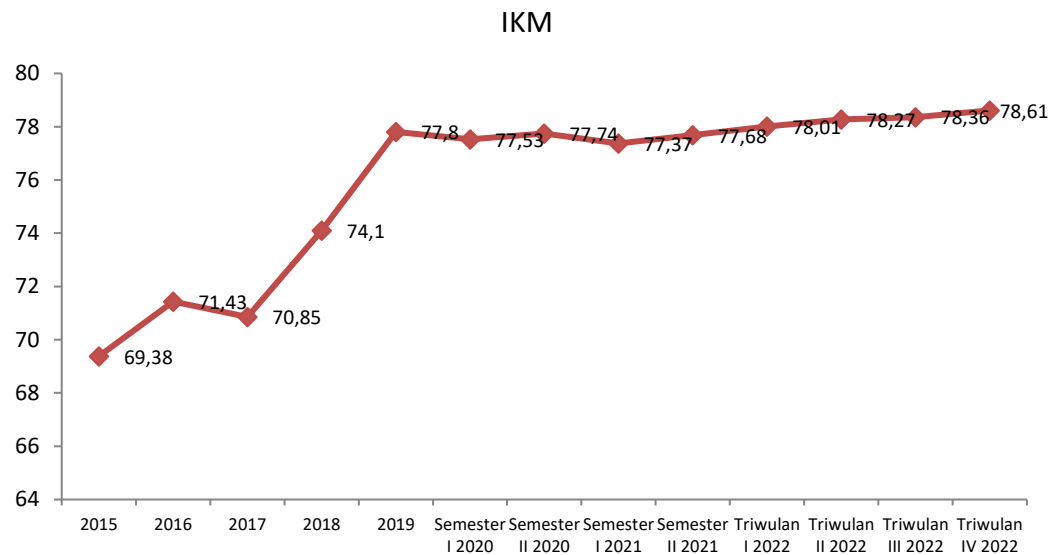




indeks lebih dari 88,30. Meski secara umum telah terkategori baik, namun masih terdapat 3 (tiga) unsur yang memiliki kinerja di bawah indeks agregat kota, dan 2 (dua) unsur di antaranya tercatat masih berkualifikasi C, yaitu unsur pengelolaan pengaduan, serta unsur Sarana dan prasarana pelayanan. Keduanya bahkan tercatat memiliki indeks di bawah IKM Kota Serang sebesar 78,61; sehingga perlu mendapat perhatian serius untuk ditingkatkan kinerjanya.

Tak seperti temuan pada tahun sebelumnya dimana IKM Kota Serang banyak dikontribusi oleh unsur maklumat pelayanan dan pengelolaan pengaduan, pada tahun 2022 IKM Kota secara merata dikontribusi oleh hampir seluruh unsur yang cenderung meningkat meski tak signifikan, baik kenaikan antarunsur maupun pada unsur itu sendiri. Jarak waktu pengambilan data yang relatif berdekatan merupakan faktor yang teridentifikasi menjadi penyebabnya, sehingga data pada masing-masing triwulan cenderung menggambarkan kondisi yang relatif ajeg. Gambaran tentang informasi di atas dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik.19**  
**Capaian IKM Kota Serang Tahun 2015-Triwulan IV 2022**



Sumber : Bappeda Kota Serang Tahun 2023

Grafik di atas menggambarkan dinamika perkembangan capaian indeks kepuasan masyarakat pada level Kota Serang sejak tahun 2015 hingga 2022, yang secara umum menggambarkan trend yang positif, meski





triwulan I-IV 2022 tidak jauh berbeda dengan temuan survei pada periode sebelumnya, mengingat jarak waktu antar survei yang relatif berdekatan. Demikian pula dengan sejumlah trend kenaikan maupun penurunan pada tiap-tiap unit layanan yang tak terlalu signifikan, yang juga diidentifikasi karena faktor waktu pelaksanaan survei yang berdekatan tersebut

Secara umum, sebagaimana temuan pada tahun sebelumnya, diskrepansi capaian IKM yang cukup nyata antarunit pelayanan masih menggambarkan belum terinternalisasinya standar pelayanan publik di masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik di Kota Serang. Demikian pula dengan fluktuasi capaian IKM pada masing-masing unit yang menggambarkan belum well established-nya mutu dan kinerja pelayanan publik di Kota Serang. Demikian pula dalam konteks indikator kompositnya, dimana teridentifikasi bahwa 31,25% indikator kepuasan pelayanan di Kota Serang masih berkinerja di bawah rerata, yaitu IKM Kota Serang sebesar 78,61 yang digunakan sebagai threshold dalam menjustifikasi kinerja kepuasan masyarakat.

Demikian pula dalam konteks mutu pelayanan, 28% indikator masih terkategori C; dan 66% lainnya telah terkategori B, dan baru 6% yang mencapai kategori mutu pelayanan A. Sejak survei tahun 2020, terdapat indikator kepatuhan pada protokol kesehatan di masing-masing unit layanan, meski hasilnya tidak diintegrasikan dalam perhitungan IKM.

Trend recovery IKM pada level kota maupun unit-unit penyelenggara pelayanan publik di tahun 2022 ini, diyakini akan berlanjut seiring dengan mulai terbiasanya masyarakat dengan berbagai aturan pembatasan sosial dalam pelayanan publik, meski implikasi dari situasi pandemi tersebut kemungkinan masih akan terasa dampaknya sehingga kenaikan IKM diprediksi tidak akan begitu signifikan, terutama bila tidak didukung dengan inovasi pelayanan publik yang signifikan. Inovasi dimaksud harus mampu menasar pada aspek-aspek yang terdampak oleh penerapan protokol kesehatan yang secara nyata berdampak pada kapasitas layanan, seperti: jumlah antrian yang menjadi terbatas karena pengaturan jarak, demikian pula dengan ruang tunggu pelayanan yang kapasitasnya dikurangi karena



pengaturan jarak, pengaturan waktu kerja pegawai antara pegawai yang bekerja dari kantor (work from office) dan bekerja dari rumah (work from home), dan lain-lain, sehingga kapasitas dan mutu layanan dapat dinormalisasi. Penyesuaian terhadap persyaratan dan prosedur pelayanan, serta pemanfaatan beragam alat, aplikasi, dan sejenisnya dapat menjadi terobosan guna mewujudkan normalisasi dimaksud.

Berdasarkan tabel di bawah ini teridentifikasi bahwa sebanyak 2 indikator telah mencapai mutu A, sebanyak 21 indikator atau 65,63% indikator kepuasan pelayanan di Kota Serang telah mencapai mutu B, meski masih terdapat sekira 28,13% indikator yang bermutu C. Meski demikian 31,25% indikatornya telah mencapai indeks di atas rerata indeks agregat di tingkat Kota sebesar 71,84% atau sebanyak 23 indikator sedangkan 9 dari 32 indikator yang capaiannya masih di bawah rerata atau 28,13%.

**Tabel 3.59**  
**IKM Kota Serang Berdasar Indikator Komposit**  
**Triwulan I-IV Tahun 2022**

No	Indikator	T1	T2	T3	T4	Kategori	
1	Kemudahan Pengurusan	83,00	87,73	87,98	88,78	B	Di atas rerata
2	Kemudahan Prosedur	80,00	87,18	87,81	87,88	B	Di atas rerata
3	Kemudahan Waktu Buka Pelayanan	80,00	88,78	88,54	88,80	B	Di atas rerata
4	Kemudahan Waktu Menjalat	79,28	84,58	85,23	85,77	B	Di atas rerata
5	Kemudahan Waktu Tutup	78,87	84,58	85,17	85,75	B	Di atas rerata
6	Kewaspadaan Lantai WT Pelayanan	75,13	81,82	82,37	82,82	B	Di atas rerata
7	Kewaspadaan Bayu	87,23	89,41	89,83	89,75	A	Di atas rerata
8	Kebas Pungsi	84,80	88,08	88,28	88,78	A	Di atas rerata
9	Profil Seseorang Harapan	79,09	82,28	82,84	83,48	B	Di atas rerata
10	Angka Komplain	78,88	85,70	87,72	82,34	B	Di atas rerata
11	Kemampuan Pegawai	78,18	83,20	84,21	84,74	B	Di atas rerata
12	Kemampuan Komunitas	78,38	80,81	81,70	82,23	B	Di atas rerata
13	Pengalaman Pegawai	81,37	81,88	82,18	82,88	B	Di atas rerata
14	Kepercayaan Pegawai	78,18	80,28	81,18	81,81	B	Di atas rerata
15	Non Diskriminatif	84,02	83,23	83,88	83,88	B	Di atas rerata
16	Kesantunan	87,21	78,73	80,34	80,88	B	Di atas rerata
17	Keramahan	78,33	78,48	78,08	78,73	B	Di atas rerata
18	Masuknya Pelayanan	78,78	77,83	77,75	78,14	B	Di bawah rerata
19	Integrasi Masuknya Pelayanan	77,21	77,18	78,27	78,18	B	Di atas rerata
20	Kemudahan Sarana Pengadaan	73,11	71,85	72,52	73,85	C	Di bawah rerata
21	Respon Seseorang Harapan	71,37	78,88	74,28	74,88	C	Di bawah rerata
22	Keterampilan Lingsungan	78,87	78,83	78,71	78,84	B	Di atas rerata
23	Kemudahan Ruang Pelayanan	78,82	77,88	78,82	78,78	B	Di atas rerata
24	Keterampilan Tindak Umum	71,82	78,37	77,82	78,88	C	Di bawah rerata
25	Kemudahan APAR	72,88	71,88	71,78	72,82	C	Di bawah rerata
26	Efektifitas Layanan Berbasis	87,88	87,18	87,71	88,80	C	Di bawah rerata
27	Sangat Tak Memihaknya	84,88	82,18	82,17	82,88	B	Di atas rerata
28	Kemudahan	81,38	80,87	81,11	81,51	B	Di atas rerata
29	Sangat Aktifnya	88,18	88,58	88,78	87,78	C	Di bawah rerata
30	Rendah Rendah Mencegah Bencana	72,25	73,88	73,78	74,25	C	Di bawah rerata
31	Kepercayaan Pelayanan Online	88,78	88,28	78,37	77,23	C	Di bawah rerata
32	Pelayanan Protokol Kesehatan	72,88	88,28	88,88	88,72	C	Di bawah rerata

Sumber : Bappeda Kota Serang, 2023



## 2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan Kepala Daerah yang berfungsi sebagai wahana sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah dan Pemerintah dalam kerangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Nilai LPPD diukur dari skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

**Tabel 3.60**  
**Hasil Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**  
**Kota Serang Tahun 2015-2020**

No	Tahun	Skor	Status	Urutan Nasional
1.	2016	2,7345	Tinggi	72
2.	2017	2,9606	Tinggi	70
3.	2018	3,0233	Sangat Tinggi	45
4.	2019	3,2344	Sangat Tinggi	-
5.	2020	3,4365	Sangat Tinggi	-
6.	2021	Na	Na	-
7.	2022	NaN	Na	-

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Serang, 2021

Nilai LPPD Kota Serang pada tahun 2020 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri sebesar 3,4365 dengan kategori Sangat Tinggi, capaian tersebut sesuai target yang ditetapkan yaitu Sangat Tinggi atau capaian kinerja sebesar 99,82%% dengan kategori **Sangat Tinggi**. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yang mencapai nilai sebesar 3,2344. Meningkatnya capaian kinerja nilai LPPD Tahun 2020 dikarenakan penyajian data dukung LPPD yang semakin baik dan lengkap untuk penilaian tahun 2021 dan 2022 hasil evaluasi LPPD Kota



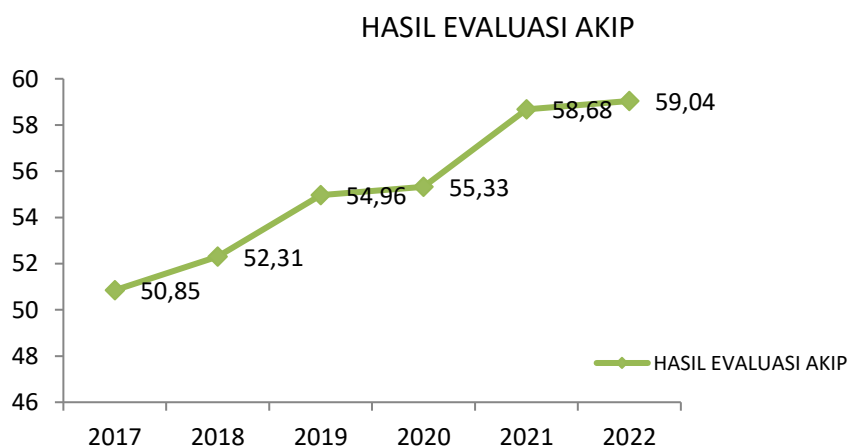
Serang belum dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian nilai LPPD antara lain mendorong OPD untuk memenuhi indikator kinerja kunci dengan akurat dan tepat serta melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, sehingga mudah-mudahan perolehan nilai LPPD Kota Serang Tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 yang akan diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI.

### 3. Hasil Evaluasi AKIP

Dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Serang tahun 2022 adalah 59,04 atau kategori CC belum memenuhi target B yang dicanangkan di tahun 2022. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kerjanya. Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Serang masih belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan lebih lanjut. Atas capaian tersebut maka kinerja akuntabilitas Kota Serang berdasarkan target tahun 2022 baru mencapai 95,23%. Capaian nilai hasil evaluasi AKIP Kota Serang tahun 2017 s.d. 2022 sebagai berikut:

**Grafik 3.21**  
**Capaian Nilai AKIP Kota Serang Tahun 2017 – 2022**



Sumber : Bagian Organisasi dan RB Setda Kota Serang, 2023



Untuk melihat perkembangan capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Serang sejak tahun 2017 meliputi meliputi 5 komponen AKIP sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.61**  
**Hasil Evaluasi AKIP Kota Serang 2017 – 2021**

Komponen	Bobot	2017	2018	Bobot	2019	2020	2021	% Capaian Bobot
Perencanaan Kinerja	35	15,83	16,42	30	17,61	18,20	19,10	63,67
Pengukuran Kinerja	20	12,13	12,16	25	12,80	12,82	13,72	54,88
Pelaporan Kinerja	15	9,24	9,29	15	9,31	9,33	9,86	65,73
Evaluasi Kinerja	10	4,22	4,23	10	4,58	4,58	5,31	53,10
Capaian Kinerja	20	9,44	10,21	20	10,34	10,40	10,69	53,45
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>50,85</b>	<b>52,31</b>	<b>100</b>	<b>54,64</b>	<b>55,33</b>	<b>58,68</b>	<b>58,68</b>
<b>Kategori</b>		<b>CC</b>	<b>CC</b>		<b>CC</b>	<b>CC</b>	<b>CC</b>	

Sumber : Bagian Organisasi dan RB Setda Kota Serang, 2021

Dari tabel di atas diperoleh gambaran bahwa secara umum terdapat peningkatan dari tahun 2017-2021 dari semua komponen penilaian SAKIP. Komponen evaluasi kinerja menempati posisi kinerja terendah sebesar 53,10% dan kinerja tertinggi pada komponen pelaporan kinerja sebesar 65,73%.

Capaian tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,35 point dari capaian tahun 2020 yang sebesar 55,33 dengan kategori CC. Capaian tersebut karena belum maksimalnya komitmen Pimpinan Daerah dan seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Serang, sehingga hasil evaluasi AKIP Kota Serang tahun 2021 belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Tindak lanjut hasil evaluasi Tahun 2021 melakukan upaya sebagaimana berikut:

1. Melakukan perubahan terhadap RPJMD 2018-2023 dengan melakukan beberapa penyesuaian termasuk simplifikasi sasaran





- strategis dan indikator sasaran yang sebagian besar sudah berorientasi pada hasil (*Outcome*);
2. Menyusun *Logical Framework* dalam bentuk cascading kinerja pada level Pemerintah daerah dan perangkat daerah
  3. Memperbaiki system monitoring dan evaluasi kinerja Pemerintah daerah dan perangkat daerah dengan menetapkan rencana aksi secara berkala;
  4. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara internal atas implementasi manajemen kinerja perangkat daerah.

Sebagaimana pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.62**  
**Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2022**

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	21,75
2	Pengukuran Kinerja	30	13,69
3	Pelaporan Kinerja	15	9,90
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,70
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>59,04</b>
<b>Kategori</b>			<b>CC</b>

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Serang tahun 2022 menunjukkan nilai 59,04 dengan predikat “CC”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja cukup baik namun masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya pada unit perangkat kerja.



**Tabel 3.63**  
**Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP**

No	Rekomendasi	Starategi dan Upaya Tindak Lanjut
1	2	3
1	Melakukan Penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja Pada Level Pemerintah Daerah maupun OPD untuk memastikan rumusan tujuan/sasaran strategis telah berorientasi hasil/outcome, sehingga mampu memberikan arah prioritas daerah dengan jelas dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat	Penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 dan Perubahan Renstra PD Tahun 2018-2023 sebagai perencanaan kinerja pada level pemerintah daerah dan OPD
		Menyusun dokumen Rancangan RPD Kota Serang Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Tahun 2024-2026 Perencanaan kinerja pada level pemerintah daerah dan OPD pada
		Melakukan asistensi dan verifikasi kepada semua perangkat daerah terkait penyusunan rumusan tujuan/sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Perubahan
2	Menyempurnakan ketepatan indikator kinerja yang telah disesuaikan dengan hasil penyempurnaan perencanaan kinerja, dengan memenuhi kriteria yang spesifik, terukur, relevan dan cukup dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja daerah sehingga ukuran keberhasilan pencapaian kinerja daerah dapat diyakini	Menyusun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Serang;
		Mendampingi dan mengarahkan penyusunan Indikator Kinerja dan definisi operasional kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022
		Menyusun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Serang pada Rancangan RPD Kota Serang Tahun 2024-2026
		Mendampingi dan mengarahkan penyusunan rancangan Indikator Kinerja dan definisi operasional kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
3	Menyempurnakan perencanaan kinerja pada level OPD, dengan memastikan kinerja OPD telah berorientasi hasil/outcome dan menjabarkan kinerja OPD secara langsung dari level paling tinggi hingga level paling rendah, diikuti dengan perbaikan dokumen perencanaan kinerja OPD, dari level OPD hingga ke level individu, agar dapat dipastikan bahwa kinerja program, kegiatan dan anggaran digunakan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja daerah	Pendampingan/asistensi penyusunan pohon kinerja dan cascading pada level Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan kinerja Tahun 2023
		Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pohon kinerja yang sudah disusun sebelumnya
		Pendampingan/asistensi penyusunan rancangan pohon kinerja dan cascading pada level Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Renstra PD Tahun 2024-2026



No	Rekomendasi	Starategi dan Upaya Tindak Lanjut
1	2	3
		Pendampingan/asistensi Penyempurnaan Perjanjian Kinerja kepada seluruh perangkat daerah
4	Memperbaiki sistem monitoring dan evaluasi kinerja daerah dengan menetapkan rencana aksi berkala yang dijabarkan dari perencanaan kinerja OPD dan dilakukan monev secara berkala/periodikatas target kinerja yang telah ditetapkan. Monitoring dan Evaluasi yang baik diharapkan memberikan informasi-informasi yang mampu mendorong efektivitas dan efisiensi dalam mengawal target pencapaian kinerja daerah	Melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala per triwulan dan tahunan Melakukan Monev laporan pengukuran kinerja setiap triwulan kepada seluruh perangkat daerah
5	Menyusun kerangka logis kinerja dimulai dari kinerja level yang paling tinggi diturunkan secara berjenjang ke level yang terendah dengan memperhatikan kausalitas/akibat antara kinerja yang di atas dengan yang di bawah sehingga terjaga kesesuaian kinerja di setiap level jabatan	Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kerangka logis kinerja dan proses bisnis level pemerintah Kota Serang Pendampingan/asistensi penyusunan kerangka logis kinerja dan proses bisnis level Perangkat Daerah
6	Menyempurnakan laporan kinerja dengan menyajikan informasi dan analisis yang lebih mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja sehingga laporan kinerja diharapkan mampu memberikan umpan balik untuk pengambilan kebijakan pada tahun berikutnya dalam rangka mendorong perbaikan kinerja daerah	Mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh perangkat daerah dalam penyusunan LKJIP Tahun 2021 Mengecek dan mengarahkan seluruh Perangkat daerah dalam membuat dokumen pelaporan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku Membentuk tim Penyusun LKJIP tingkat Kota dan Tim Evaluasi SAKIP
	Mendorong pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas implementasi manajemen kinerja OPD secara menyeluruh dan memberikan rekomendasi yang spesifik ;	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas APIP (evaluator) melalui Diklat Teknis/ Substantif (Lampiran Permenpan RB 88/ 2021 (Hal 12_Sumber Daya))
7	Memastikan bahwa rekomendasi hasil evaluasi internal ditindaklanjuti dan dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan kinerja, manajemen kinerja dan peningkatan OPD secara menyeluruh	Mengusulkan Kebijakan/ Pedoman yang Baku mengenai Kebijakan Evaluasi SAKIP di OPD (Pasal 6/ Permenpan RB 88/ 2021) Melakukan Rekonsiliasi dokumen/ data OPD (Lampiran Permenpan RB 88/ 2021 (Hal 20_Evaluasi Tahun sebelumnya)) Sosialisasi/ Bimbingan Teknis/ FGD tentang Evaluasi SAKIP oleh Manajemen OPD (Pasal 5/ Permenpan RB 88/ 2021)



#### 4. Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Dalam kaitannya dengan target terhadap opini Pemerintah Kota Serang dalam kaitannya dengan audit LKPD Kota Serang Tahun 2021 yang diberikan oleh BPK-RI pada Tahun 2022, menargetkan masih mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dikarenakan Pemerintah Kota Serang masih terus mengupayakan berbagai hal dalam upaya mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada Tahun 2022.

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten Nomor: 22.A/LHP/XVIII.SRG/05/2022 perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Tanggal 22 Mei 2022, maka hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2021 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada Tahun 2022 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Serang masih dalam proses audit BPK.

Pencapaian opini WTP tersebut tidak lepas dari hasil kerjasama semua *stakeholder* dalam penyusunan laporan keuangan di tingkat unit kerja, Perangkat Daerah hingga proses konsolidasi di tingkat Kota Serang oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang.

Pencapaian Target pada tahun 2021 ini merupakan target tahun ketiga dari RPJMD Tahun 2018-2023 yaitu :

**Tabel 3.64**

**Capaian dan Target Indikator Sasaran Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam Perubahan RPJMD 2018-2023**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja					Target Kinerja	Kondisi Akhir RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	Na	WTP	WTP	

Sumber : Inspektorat Kota Serang, 2021



Beberapa faktor Pendorong dalam pencapaian target kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara lain:

1. Komitmen pimpinan di setiap perangkat daerah dalam tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
2. Implementasi SIMRAL dan SIPD sebagai instrumen aplikasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
3. Komitmen Kepala Daerah dalam mendukung penyusunan laporan keuangan daerah dengan menetapkan Peraturan Walikota Serang tanggal 28 Desember 2020 Nomor 57 Tahun 2020 Berita Daerah Nomor 57 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2020 tentang pedoman rekonsiliasi dan transaksi realisasi anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan;
4. Tertib pengelolaan BMD dengan menggunakan aplikasi ATISISBADA dan Pengelolaan Persediaan dengan menggunakan aplikasi SIAP;
5. Dukungan kualitas SDM pengelola keuangan dan asset daerah 32 Perangkat Daerah dan SKPKD di Lingkungan Pemerintah Kota Serang dalam menyediakan data laporan keuangan.

Berikut ini tabel yang menggambarkan faktor penghambat dan Strategi pemecahan masalah.

**Tabel. 3.65**  
**Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah dalam Pencapaian Indikator Kinerja Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)**

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Kurangnya pemahaman dalam menyusun laporan keuangan di lingkup OPD	Menyusun Peraturan Walikota Serang tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah;
2	Kurangnya Diklat bagi peningkatan kapabilitas pengelola keuangan	Mengadakan diklat terkait dengan pengelolaan keuangan bagi SDM di perangkat daerah
3	Terjadinya mutasi dan pergantian personil mengakibatkan kualitas SDM	Pembinaan terhadap Perangkat Daerah dalam penyusunan laporan keuangan untuk meningkatkan



	yang menangani penatausahaan dan pelaporan barang maupun keuangan masih belum memadai	kualitas SDM personil yang terlibat secara langsung dalam proses penatausahaan maupun pelaporan barang dan keuangan, dengan narasumber dari instansi maupun akademisi yang kompeten
4	Belum adanya kebijakan pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dalam pengelolaan keuangan yang tepat waktu dan berkualitas bagi perangkat daerah	Menyusun kebijakan pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dalam pengelolaan keuangan yang tepat waktu dan berkualitas bagi perangkat daerah

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang Tahun 2022 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 atas Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota No. 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, belanja daerah ditargetkan sebesar Rp.1.539.472.622.207,00,- dengan realisasi sebesar Rp.1.453.444.702.816,- yang terdiri dari Belanja Operasi ditargetkan sebesar Rp.1.315.400.505.424,00,- dengan realisasi sebesar Rp.1.253.609.704.388,00,-, atau 95,30% dan Belanja Modal sebesar Rp. 214.797.121.573,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 190.996.539.686,00,- atau 88,92% serta Belanja tidak terduga sebesar Rp. 9.274,995,210,00,- dengan realisasi sebesar 8.838.458.742,00 atau 95,29%.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja Perubahan RPJMD Kota Serang yang diperjanjikan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp.1.539.472.622.207,00,- dengan realisasi terkait pencapaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Kota Serang tahun 2022 adalah sebesar sebesar Rp.1.453.444.702.816,- atau 94,41%, dapat dilihat pada tabel 3.66.





**Tabel 3.66**  
**Komposisi Belanja Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2022**  
**(Anaudited)**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	1.315.400.505.424	1.253.609.704.388	95,30
2.	Belanja Modal	214.797.121.573	190.996.539.686	88,92
3.	Belanja Tak Terduga	9.274.995,210	8.838.458.742	95,29
<b>Jumlah</b>		<b>1.539.472.622.207</b>	<b>1.453.444.702.816</b>	<b>94,41</b>

Sumber : BPKAD Kota Serang, 2023

Analisis efisiensi anggaran dapat dilihat dari penyandingan ketercapaian target indikator sasaran dengan realisasi anggaran pendukungnya. Dari tabel 3.65 berikut analisis efisiensi terhadap sasaran yang sudah mencapai target 100%.

1. Sasaran strategis meningkatnya derajat pendidikan masyarakat memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 99,80%, dan realisasi anggarannya mencapai 96,47%. Hal ini menunjukkan terdapat efisiensi sebesar 3,21%.
2. Sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat memiliki capaian kinerja sebesar 100,29%, dan realisasi anggarannya mencapai 91,28%. Hal ini menunjukkan terdapat efisiensi sebesar 8,98%.
3. Sasaran strategis meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah memiliki capaian kinerja sebesar 99,29% dan realisasi anggarannya mencapai 95,63%. Hal ini menunjukkan terdapat efisiensi sebesar 3,69%.
4. Sasaran strategis Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan indikator jumlah penanganan timbunan sampah memiliki capaian kinerja sebesar 74,29%, dan realisasi anggarannya mencapai 95,84%. Hal ini menunjukkan terdapat adanya tidak efisiensi sebesar -29,00%.
5. Sasaran strategis meningkatnya pengelolaan persampahan dan ruang terbuka hijau (RTH) dengan indikator ketersediaan RTH memiliki capaian kinerja sebesar 86,60%, dan realisasi anggarannya mencapai 55,46%. Hal ini menunjukkan terdapat adanya tidak efisiensi sebesar 35,96%.
6. Sasaran strategis menurunnya resiko bencana dan meningkatnya ketangguhan terhadap bencana memiliki capaian kinerja sebesar 58,00%, dan realisasi anggarannya mencapai 96,54%. Hal ini menunjukkan terdapat adanya kurang efisiensi sebesar -66,45%.





7. Sasaran strategis meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 78,35%, dan realisasi anggarannya mencapai 98,06%. Hal ini menunjukkan terdapat adanya tidak efisiensi sebesar -25,16%.
8. Sasaran strategis meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan public dan penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 97,37%, dan realisasi anggarannya mencapai 98,19%. Hal ini menunjukkan terdapat adanya efisiensi sebesar 3,22%.

Berdasarkan tabel 3.66 tersebut pula dapat dilihat capaian rata-rata kinerja untuk sasaran strategis sebesar 85,73% dengan realisasi anggaran secara keseluruhan sebesar 94,41%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar -10,10% disebabkan karena ada beberapa capaian indikator yang tidak tercapai seperti:

- a. Jumlah penanganan timbunan sampah tidak tercapai secara maksimal hal ini disebabkan karena jumlah timbunan sampah yang ada tidak bisa tertangani secara keseluruhan karena kurangnya armada pengangkut sampah ke tempat pembuangan sampah akhir;
- b. Ketersediaan RTH realisasi kinerjanya tidak tercapai begitu pula dengan realisasi anggarannya hal ini disebabkan pembangunan RTH di Kecamatan Curug tidak terlaksana;
- c. Indeks resiko bencana juga tidak tercapai hal ini disebabkan Kota Serang masih dalam kategori tinggi terhadap terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam;
- d. Tingkat inflasi daerah di kuartal terakhir juga mengakibatkan ketidak efisienan antara realisasi kinerja dengan anggaran yang disebabkan oleh faktor luar seperti distribusi gas elpiji, ketersediaan vootile food dan harga ongkos angkutan umum.

Efisiensi anggaran diperoleh dari sisa anggaran lelang, penyesuaian kebutuhan anggaran aparatur yang bersifat rutin maupun anggaran antisipasi seperti perjalanan dinas, bahan bakar kendaraan serta alat tulis kantor



**Tabel 3.67**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Serang**  
**Per Sasaran Strategis Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Tahun 2022		PAGU (Rp)	Tahun 2022		Tingkat Efisiensi	Status
					Realisasi	%		Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,86	8,90	100,45	159.317.960.865	153.701.157.173	96,47	3,21	Efisiensi
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,92	12,81	99,15					
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,34	68,54	100,29	94.655.191.666	86.405.535.527	91,28	8,98	Efisiensi
3	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah	%	74,83	74,30	99,29	265.935.954.865	254.309.791.369	95,63	3,69	Efisiensi
4	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Penanganan Timbunan Sampah	%	70	55,72	74,29	37.854.655.619	36.279.020.203	95,84	-29,00	Tidak Efisiensi
		Ketersediaan RTH	%	3,5	3,03	86,60	7.327.309.996	4.063.542.620	55,46	35,96	Tidak Efisiensi
5	Menurunnya resiko bencana dan meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	point	110	156,20	58,00	3.839.352.000	3.706.439.400	96,54	-66,45	Tidak Efisiensi
6		Tingkat inflasi daerah	%	3	7,22	-40,67	20.387.535.167	19.992.971.323	98,06	-29,09	Tidak Efisiensi



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG

TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Tahun 2022		PAGU (Rp)	Tahun 2022		Tingkat Efisiensi	Status
					Realisasi	%		Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat	Indeks daya beli	Poin	79,54	79,78	100,30					
		PDRB Per kapita	Juta (Rp)	49,14	50,98	103,74					
		Indeks Gini	Poin	0,348	0,354	101,72					
		Angka Kemiskinan	%	5,86	5,94	98,63					
		Tingkat pengangguran terbuka	%	9,06	8,17	109,82					
7	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	79	78,61	99,51	950.154.662.029	894.986.245.201	94,19	3,22	Efisiensi
		Nilai LPPD Kota	Poin	3,4550	na	-					
		Hasil Evaluasi AKIP	Poin	62	59,04	95,23					
		Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Kategori	WTP	na	-					
						<b>85,75</b>	<b>1.539.472.622.207</b>	<b>1.453.444.702.816</b>	<b>94,41</b>	<b>-10,10</b>	<b>Efisiensi</b>

Sumber : BPKAD Kota Serang, 2023 (anaudited)



### 3.3 PENGHARGAAN KOTA SERANG

- 1 Penghargaan Dwi praja Nugraha dari Ketua Umum Pengurus besar PGRI atas perhatian dan komitmen dalam memuliakan guru dan memajukan Pendidikan Kota Serang
- 2 Penghargaan Kota Peduli HAM dari Kementrian Hukum dan HAM RI
- 3 Penghargaan Kota Terinovatif pada Penganugerahan *Innovation Governemnt Award (IGA)* Tahun 2022 dari Kemendagri RI
- 4 Penghargaan Gubernur Banten atas Dharma Bakti Sumbangan Pikiran dan Karya dalam Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasayarakatan di Provinsi Banten





- 5 Peringkat I atas Capaian Kompetensi dan Peringkat Khusus Kategori *Piloting* SIASN Pelayanan Kenaikan Pangkat dari BKN RI Tahun 2022



- 6 Penghargaan atas inisiatif Pembangunan berbasis *Smart city* Tahun 2022



- 7 Penghargaan Kategori Baik ke -2 dalam Mengelola Keuangan dan asset Daerah Kab/Kota Tingkat Provinsi Banten Tahun 2022



- 8 Penghargaan Ombudsman RI Kota Serang termasuk dalam Zona Hijau dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022



- 9 Komitmen dalam mencapai UHC (*Universal Health Coverage*) BPJS Kesehatan







- 10 Penghargaan Kota Informatif dengan nilai istimewa dari Komisi Informasi Publik Banten



- 11 Penghargaan Nomine terbaik atas Penilaian Inerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah dari Kementerian BKPM pada Anugerah Layanan Inovasi Tahun 2022



- 12 Penghargaan inovasi produk dan Top 3 *Best Financial Support Indonesia Halal Industri Award* 2021 dari Kementerian Perindustrian RI dan Bank BRI



- 13 Opini BPK dengan Predikat WTP sepanjang tahun 2017-2021







- 14 Penghargaan Kota Layak Anak Tingkat Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2021 dan 2022



- 15 Penghargaan Anugerah Parahita Ekparaya kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



- 16 Hasil Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi dengan Prediakt B Tahun 2022 dari Kementerian PANRB RI



- 17 Juara III Lomba Tertib Administrasi dan Dasawisma PKK Tingkat Provinsi Banten





- 18 RSUD Kota Serang Berhasil Lulus akreditasi PAripurna sesuai standar akreditasi Kementerian Kesehatan RI



- 19 Penghargaan dari BKKBN Perwakilan Provinsi Banten pada Pelayanan KB Sejuta Akseptor dengan Capaian Tertinggi





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Serang Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Pemerintah Kota Serang Tahun 2022. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah dalam memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Serang Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Serang telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap Capaian kinerja (*performance results*) Pemerintah Kota Serang Tahun 2022 menggambarkan bahwa capaian kinerja Pemerintah Kota Serang selama tahun 2022 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan dalam RPJMD 2018-2023 dan telah memenuhi 5 tujuan strategis dan 7 (tujuh) sasaran strategis sebagaimana yang telah ditargetkan.

Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Pemerintah Kota Serang dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 5 indikator kinerja tujuan dan 17 (enam belas) indikator kinerja sasaran. capaian indikator kinerja tujuan Pemerintah Kota Serang pada tahun 2022 ada 16 indikator mencapai sesuai dengan target yang ditetapkan dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** yaitu indeks pembangunan manusia, indeks kualitas layanan infrastruktur, indeks kualitas lingkungan hidup dan Indeks Reformasi Birokrasi sesuai dengan target yang ditetapkan sedangkan 3 indikator dengan kategori **Tinggi** yaitu ketersediaan RTH, LPE dan tingkat pengangguran terbuka, 1 indikator dengan capaian kinerja dengan kategori kinerja **Sedang** yaitu capaian penanganan sampah, kategori **rendah** yaitu indikator indeks resiko bencana yaitu laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi dengan kategori **Sangat rendah**.



Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja Perubahan RPJMD Kota Serang yang diperjanjikan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp.1.539.472.622.207,00,- dengan realisasi terkait pencapaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Kota Serang tahun 2022 adalah sebesar sebesar Rp.1.453.444.702.816,- atau 94,41%,

Selain itu dalam rangka memperkuat akuntabilitas kinerja Kota Serang, upaya yang akan dilaksanakan dalam perbaikan terhadap sasaran yang tidak berhasil mencapai target adalah :

- a. Memperkuat komitmen pimpinan;
- b. Melakukan koordinasi dan sinergitas lintas sektoral dalam mewujudkan target kinerja yang harus di laksanakan secara bersamaan;
- c. Membuat aplikasi terkait dengan implementasi SAKIP khususnya pengukuran kinerja agar bisa di monitoring dan dievaluasi secara bulanan;
- d. Membuat peraturan terkait reward dan punishment dalam rangka pencapaian kinerja;
- e. Penguatan soliditas tim fasilitasi SAKIP;
- f. Berkoordinasi secara intens dengan Tim Kemenpan RB; serta
- g. Penguatan kapasitas dan kesungguhan kepala OPD dalam merealisasikan indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023, dan khususnya untuk tahun 2022 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kota Serang Perubahan Tahun 2022 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Kota Serang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Serang.

Serang, 27 Maret 2023

WALIKOTA SERANG



**H. SYAFRUDIN. S.Sos.,M.Si.**





Lampiran:

**RENCANA DAN REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN KOTA SERANG  
TAHUN ANGGARAN 2022**

No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	TAHUN 2022		KETERANGAN	PROGRAM	PAGU (Rp)		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		PENANGGUNG JAWAB	
						Realisasi	%			SEBELUM	SESUDAH	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	72,81	72,98	100,23				188.634.201.083	253.973.152.531	3.565.953.919	1,89	87.468.241.558	46,37	115.898.890.735	61,44	240.106.692.700	94,54		
	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,86	8,9	100,45				133.878.441.042	159.317.960.865	994.993.200	0,74	64.273.183.905	48,01	75.364.110.181	56,29	153.701.157.173	96,47		
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,92	12,81	99,15															
		Program Pengelolaan Pendidikan								108.129.475.757	132.170.583.983,00	192.750.000	0,18	55.763.024.776	51,57	59.550.542.712	55,07	127.331.812.991,00	96,34	DINDIKBUD	
		Program Pengembangan Kurikulum								75.000.000	75.000.000,00	-	-	-	-	56.600.000	75,47	56.600.000,00	75,47	DINDIKBUD	
		Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan								6.603.720.050	7.029.337.050,00	59.611.600	0,90	1.440.232.024	21,81	3.475.234.374	52,63	6.657.157.824,00	94,71	DINDIKBUD	
		Program Pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan								1.892.206.000	1.589.995.750,00	4.000.000	0,21	262.782.205	13,89	1.481.284.745	78,28	1.528.179.335,00	96,11	DISPORAPAR	
	Program Pengembangan								11.293.660.900	12.106.677.400,00	257.582.000	2,28	5.323.457.000	47,14	8.209.767.250	72,69	11.859.339.723,00	97,96	DISPORAPAR		





No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	TAHUN 2022		KETERANGAN	PROGRAM	PAGU (Rp)		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		PENANGGUNG JAWAB	
						Realisasi	%			SEBELUM	SESUDAH	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%		
									Kapasitas Keolahragaan												
									Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	175.000.000	175.000.000,00	-	-	-	-	-	-	175.000.000,00	100,00	DISPORAPAR	
									Program Pembinaan Perpustakaan	3.804.378.335	3.801.366.682,00	247.352.800	6,50	806.918.500	21,21	1.090.492.500	28,66	3.724.925.500,00	97,99	DPK	
									Program Pengembangan Kebudayaan	1.405.000.000	1.870.000.000,00	222.096.800	15,81	448.361.400	31,91	1.045.188.600	74,39	1.868.141.800,00	99,90	DINDIKBUD	
									Program Pembinaan Sejarah	350.000.000	350.000.000,00	2.560.000	0,73	157.580.000	45,02	305.000.000	87,14	350.000.000,00	100,00	DINDIKBUD	
									Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	150.000.000	150.000.000,00	9.040.000	6,03	70.828.000	47,22	150.000.000	100,00	150.000.000,00	100,00	DINDIKBUD	
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup	Tahun	68,34	68,54	100,29			<b>54.755.760.041</b>	<b>94.655.191.666</b>	<b>2.570.960.719</b>	<b>4,70</b>	<b>23.195.057.653</b>	<b>42,36</b>	<b>40.534.780.554</b>	<b>74,03</b>	<b>86.405.535.527</b>	<b>91,28</b>		
									Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	52.470.945.791	83.446.365.916,00	2.460.439.719	4,69	21.381.972.792	40,75	35.257.690.457	67,19	77.001.296.935,00	92,28	DINAS KESEHATAN	
									Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	218.820.000	2.280.490.000,00	2.000.000	0,91	513.236.800	234,55	1.289.664.030	589,37	2.231.422.082,00	97,85	DINAS KESEHATAN	



No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	TAHUN 2022		KETERANGAN	PROGRAM	PAGU (Rp)		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		PENANGGUNG JAWAB
						Realisasi	%			SEBELUM	SESUDAH	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
									Program Peningkatan Ketersediaan Farmasi Kesehatan Makanan dan Minuman	236.000.000	464.542.000,00	9.000.000	3,81	64.773.000	27,45	248.668.633	105,37	443.598.633,00	95,49	DINAS KESEHATAN
									Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	255.418.750	441.645.250,00	25.256.000	9,89	92.297.500	36,14	303.111.500	118,67	434.690.250,00	98,43	DINAS KESEHATAN
									Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	512.875.500	706.875.500,00	5.457.500	1,06	275.227.500	53,66	405.425.500	79,05	683.139.300,00	96,64	DP3AKB
									Program Perlindungan Perempuan	137.000.000	291.295.000,00	3.400.000	2,48	50.065.000	36,54	150.854.931	110,11	247.537.836,00	84,98	DP3AKB
									Program Pemenuhan Hak Anak	330.000.000	330.000.000,00	57.407.500	17,40	111.887.500	33,91	218.351.900	66,17	323.841.400,00	98,13	DP3AKB
									Program Perlindungan Khusus Anak	292.000.000	604.355.000,00	2.000.000	0,68	178.552.400	61,15	321.224.180	110,01	535.818.930,00	88,66	DP3AKB
									Program Pengendalian Penduduk	81.000.000	181.110.000,00	-	-	91.520.000	112,99	149.360.000	184,40	175.110.000,00	96,69	DP3AKB
									Program Pembinaan Keluarga Berencana	120.775.000	1.733.268.000,00	-	-	402.155.161	332,98	1.173.669.421	971,78	1.661.067.260,00	95,83	DP3AKB
									Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	100.925.000	4.175.245.000,00	6.000.000	5,95	33.370.000	33,06	1.016.760.002	1.007,44	2.668.012.901,00	63,90	DP3AKB



No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	TAHUN 2022		KETERANGAN	PROGRAM	PAGU (Rp)		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		PENANGGUNG JAWAB
						Realisasi	%			SEBELUM	SESUDAH	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
2	Terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah	Poin	66	62,77	95,11			234.561.781.593,00	265.935.954.865,00	25.744.297.678,00	10,98	74.399.904.528,00	31,72	129.774.530.695,00	55,33	254.309.791.369,00	95,63	
	Meningkatnya ketertarikan dan kualitas infrastruktur wilayah		Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah	%	74,83	74,3	99,29			234.561.781.593,00	265.935.954.865,00	25.744.297.678,00	10,98	74.399.904.528,00	31,72	129.774.530.695,00	55,33	254.309.791.369,00	95,63	
									Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	3.765.900.000,00	5.866.256.384,00	600.640.000	15,95	2.087.140.000	55,42	3.044.558.645	80,85	5.855.016.289,00	99,81	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
									Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air Minum	2.282.723.122,00	5.465.783.622,00	-	-	224.890.000	9,85	2.115.424.550	92,67	5.340.940.500,00	97,72	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
									Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air Limbah	925.455.650,00	4.756.007.650,00	-	-	158.140.000	17,09	1.123.875.750	121,44	4.612.261.300,00	96,98	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
									Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	14.875.000,00	19.902.034.484,00	2.492.125.150	16,75	9.269.364.057	62,32	12.042.945.211	80,96	19.744.908.584,00	99,21	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	TAHUN 2022		KETERANGAN	PROGRAM	PAGU (Rp)		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		PENANGGUNG JAWAB
						Realisasi	%			SEBELUM	SESUDAH	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
									Program Penataan Bangunan Gedung	48.068.716.550,00	44.113.600.899,00	267.714.000	0,56	3.599.099.384	7,49	11.352.933.666	23,62	40.654.006.048,00	92,16	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
									Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	20.463.287.000,00	19.148.489.500,00	-	-	167.435.000	0,82	4.361.521.600	21,31	18.140.378.500,00	94,74	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
									Program Penyelenggaraan Jalan	62.395.532.044,00	83.338.770.571,00	6.985.376.100	11,20	29.787.517.748	47,74	45.842.243.693	73,47	79.344.292.864,00	95,21	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
									Program Pengembangan Jasa Kontruksi	348.480.000,00	309.473.000,00	-	-	13.395.000	3,84	68.060.000	19,53	284.635.000,00	91,97	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
									Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.266.849.320,00	1.172.794.100,00	16.000.000	1,26	130.442.500	10,30	Rp 200.040.450	15,79	1.071.079.850,00	91,33	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
									Program Pengembangan Perumahan	2.405.000.000,00	1.346.170.000,00	104.076.981	4,33	247.321.067	10,28	725.907.575	30,18	1.342.469.135,00	99,73	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
									Program Kawasan Permukiman	10.663.933.733,00	13.789.029.583,00	70.810.000	0,66	3.431.079.000	32,17	7.922.884.175	74,30	13.449.400.038,00	97,54	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	TAHUN 2022		KETERANGAN	PROGRAM	PAGU (Rp)		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		PENANGGUNG JAWAB
						Realisasi	%			SEBELUM	SESUDAH	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
									Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	10.434.395.010,00	11.207.825.810,00	4.107.885.300	39,37	6.167.491.300	59,11	6.387.880.700	61,22	10.838.920.373,00	96,71	
									Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	27.611.736.658,00	32.855.865.758,00	6.580.577.000	23,83	8.918.669.000	32,30	19.890.705.000	72,04	31.824.813.968,00	96,86	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
									Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	237.831.000,00	187.831.000,00	-	-	14.990.000	6,30	111.500.000	46,88	170.124.000,00	90,57	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
									Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	389.964.000,00	336.204.000,00	32.825.000	8,42	142.215.000	36,47	187.275.000	48,02	304.375.000,00	90,53	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
									Program Pengelolaan Tanah Kosong	597.391.000,00	457.143.000,00	-	-	329.005.000	55,07	345.920.000	57,91	361.980.000,00	79,18	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
									Program Penatagunaan Tanah	1.077.650.000,00	918.250.000,00	-	-	833.339.000	77,33	887.774.000	82,38	912.003.500,00	99,32	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
									Program Aplikasi Informatika	6.765.462.500	5.431.607.000,00	2.602.010.116	38,46	3.378.273.241	49,93	4.359.548.402	64,44	5.362.252.973,00	98,72	DISKOMINFO
									Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan	19.895.574.006	15.241.918.504,00	1.872.858.031	9,41	5.488.698.231	27,59	8.792.132.278	44,19	14.605.033.447,00	95,82	DINAS PERHUBUNGAN



No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	TAHUN 2022		KETERANGAN	PROGRAM	PAGU (Rp)		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		PENANGGUNG JAWAB
						Realisasi	%			SEBELUM	SESUDAH	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
									Angkutan Jalan (LLAJ)											
									Program Pengelolaan Pelayaran	90.900.000	90.900.000,00	11.400.000	12,54	11.400.000	12,54	11.400.000	12,54	90.900.000,00	100,00	DINAS PERHUBUNGAN
3	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	50,45	54,37	107,77			41.410.660.009,00	49.021.317.615,00	5.043.505.308,00	12,18	14.865.228.878,00	35,90	26.759.927.144,00	64,62	44.049.002.223,00	89,86	
	Meningkatnya Pengelolaan Sampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Jumlah Penanganan Timbunan Sampah	%	75	55,72	74,29			30.275.750.760	37.854.655.619	4.534.176.308	14,98	12.066.503.958	39,86	22.260.728.374	73,53	36.279.020.203	95,84	
									Program Perencanaan Lingkungan Hidup	412.349.750	396.251.750,00	-	-	-	-	255.159.000	61,88	396.251.750,00	100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
									Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1.525.431.655	1.477.580.781,00	21.600.000	1,42	492.325.000	32,27	1.123.027.000	73,62	1.455.599.000,00	98,51	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
									Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya	224.631.416	143.650.462,00	-	-	2.470.000	1,10	87.360.000	38,89	138.662.000,00	96,53	DINAS LINGKUNGAN HIDUP





No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	TAHUN 2022		KETERANGAN	PROGRAM	PAGU (Rp)		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		PENANGGUNG JAWAB
						Realisasi	%			SEBELUM	SESUDAH	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
									dan Beracun (Limbah B3)											
									Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	94.000.000	97.281.000,00	-	-	15.130.000	16,10	69.690.000	74,14	95.590.000,00	98,26	
									Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	89.126.141	74.126.141,00	-	-	19.415.000	21,78	44.905.000	50,38	73.879.500,00	99,67	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
									Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	90.000.000	88.860.000,00	-	-	31.010.000	34,46	58.460.000	64,96	87.200.000,00	98,13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
									Program Pengelolaan Persampahan	27.840.217,98	35.576.905,485,00	4.512.576.308	16,21	11.506.153.958	41,33	20.622.127.374	74,07	34.031.837.953,00	95,66	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Ketersediaan RTH	%	3,5	3,03	86,60			7.252.909.996	7.327.309.996	24.614.000	0,34	1.299.662.920	17,92	2.220.226.270	30,61	4.063.542.620	55,46	
									Pengendalian Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHAYATI)	7.252.909.996	7.327.309.996,00	24.614.000	0,34	1.299.662.920	17,92	2.220.226.270	30,61	4.063.542.620,00	55,46	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Menurunnya resiko bencana dan mening	Indeks Resiko Bencana	point	110	156,2	58,00		3.881.999.253,00	3.839.352.000,00	484.715.000,00	12,49	1.499.062.000,00	38,62	2.278.972.500,00	58,71	3.706.439.400,00	96,54	



No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	TAHUN 2022		KETERANGAN	PROGRAM	PAGU (Rp)		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		PENANGGUNG JAWAB
						Realisasi	%			SEBELUM	SESUDAH	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
		katnya ketanggahan terhadap bencana																		
									Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Non Kebakaran	2.330.304.000,00	2.395.335.000,00	296.410.000	12,72	1.050.727.000	45,09	1.550.299.000	66,53	2.362.030.900,00	98,61	SATPOL PP
									Program Penanggulangan Bencana	1.551.695.253,00	1.444.017.000,00	188.305.000	12,14	448.335.000	28,89	728.673.500	46,96	1.344.408.500,00	93,10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3	Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,25	4,71	89,71			20.214.644.694	20.387.535.167	1.302.323.620	6,44	5.220.252.498	25,82	10.484.101.393	51,86	19.992.971.323	98,06	
	Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat		Tingkat inflasi daerah	%	3	7,22	-40,67													
			Indeks daya beli	Poin	79,54	79,78	100,30													
			PDRB Per kapita	Juta (Rp)	49,14	50,98	103,74			20.214.644.694	20.387.535.167	1.302.323.620	6,44	5.220.252.498	25,82	10.484.101.393	51,86	19.992.971.323	98,06	
			Indeks Gini	Poin	0,348	0,354	98,28													
			Angka Kemiskinan	%	5,86	5,94	98,63													



No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	TAHUN 2022		KETERANGAN	PROGRAM	PAGU (Rp)		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		PENANGGUNG JAWAB
						Realisasi	%			SEBELUM	SESUDAH	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
			Tingkat pengangguran terbuka	%	9,06	8,17	109,82													
									Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	61.940.000	61.940.000,00	-	-	5.000.000	8,07	45.650.000	73,70	61.840.000,00	99,84	DINKOPUKMI NDAG
									Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	397.971.735	548.531.735,00	20.550.000	5,16	28.420.000	7,14	426.845.736	107,26	547.676.735,00	99,84	DINKOPUKMI NDAG
									Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	71.145.000	71.145.000,00	34.562.500	48,58	34.562.500	48,58	71.145.000	100,00	70.345.000,00	98,88	
									Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	152.520.000	352.920.000,00	4.000.000	2,62	10.000.000	6,56	224.505.000	147,20	344.479.000,00	97,61	DINKOPUKMI NDAG
									Program Pengembangan UMKM	221.415.000	221.415.000,00	-	-	66.560.000	30,06	77.027.000	34,79	215.342.000,00	97,26	DINKOPUKMI NDAG
									Program Perizinan Pendaftaran Perusahaan	19.083.000	19.083.000,00	-	-	-	-	5.800.000	30,39	18.150.000,00	95,11	
									Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.639.275.823	1.018.929.950,00	114.000.000	6,95	310.657.000	18,95	636.563.000	38,83	994.736.000,00	97,63	DINKOPUKMI NDAG
									Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	284.579.280	556.577.530,00	6.290.000	2,21	32.108.500	11,28	62.027.900	21,80	529.096.690,00	95,06	DINKOPUKMI NDAG



No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	TAHUN 2022		KETERANGAN	PROGRAM	PAGU (Rp)		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		PENANGGUNG JAWAB
						Realisasi	%			SEBELUM	SESUDAH	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
									Program Pengembangan Ekspor	1.158.176.650	1.079.427.250,00	-	-	-	-	985.971.650	85,13	1.056.149.250,00	97,84	DINKOPUKMI NDAG
									Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	224.013.000	224.013.000,00	16.800.000	7,50	43.210.000	19,29	109.281.700	48,78	223.798.000,00	99,90	DINKOPUKMI NDAG
									Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	255.465.000	223.945.000,00	-	-	5.000.000	1,96	48.801.000	19,10	213.597.000,00	95,38	DINKOPUKMI NDAG
									Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	60.000.000	49.670.000,00	3.320.000	5,53	11.960.000	19,93	43.915.000	73,19	49.670.000,00	100,00	DKP3
									Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	299.102.500	1.430.582.500,00	10.775.000	3,60	131.859.000	44,08	245.279.000	82,00	1.412.460.701,00	98,73	DKP3
									Program Penanganan Kerawanan Pangan	100.000.000	100.000.000,00	-	-	13.695.000	13,70	70.904.000	70,90	98.750.000,00	98,75	DKP3
									Program Pengawasan Keamanan Pangan	63.647.500	57.887.500,00	4.500.000	7,07	8.500.000	13,35	11.500.000	18,07	57.687.500,00	99,65	DKP3
									Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	109.706.750	564.476.750,00	6.110.000	5,57	70.156.750	63,95	101.456.750	92,48	530.476.750,00	93,98	DKP3



No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	TAHUN 2022		KETERANGAN	PROGRAM	PAGU (Rp)		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		PENANGGUNG JAWAB
						Realisasi	%			SEBELUM	SESUDAH	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
									Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	98.593.250	96.943.250,00	60.673.000	61,54	64.718.000	65,64	96.863.000	98,25	91.863.000	94,76	DKP3
									Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	139.750.000	84.750.000,00	2.500.000	1,79	22.125.000	15,83	25.480.000	18,23	84.352.500	99,53	DKP3
									Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	619.780.000	837.481.000,00	9.350.000	1,51	360.839.350	58,22	406.379.350	65,57	827.189.850	98,77	DKP3
									Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	125.620.000	235.231.200,00	-	-	62.225.000	49,53	97.260.000	77,42	125.620.000	53,40	DKP3
									Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	181.500.000	150.658.484,00	27.200.000	14,99	73.310.000	40,39	110.675.000	60,98	148.186.000	98,36	DKP3
									Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	13.088.388	14.560.400,00	-	-	-	-	-	-	14.560.400	100,00	
									Program Penyuluhan Pertanian	391.200.000	336.333.640,00	28.244.790	7,22	145.926.193	37,30	245.116.193	62,66	336.028.943	99,91	DKP3
									Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	923.448.000	780.351.000,00	10.000.000	1,08	159.693.000	17,29	206.639.000	22,38	767.576.000	98,36	DISPORAPAR
									Program Pemasaran Pariwisata	637.493.000	491.876.000,00	8.000.000	1,25	20.000.000	3,14	199.674.000	31,32	470.607.500	95,68	DISPORAPAR



No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	TAHUN 2022		KETERANGAN	PROGRAM	PAGU (Rp)		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		PENANGGUNG JAWAB
						Realisasi	%			SEBELUM	SESUDAH	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
									Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1.961.782.560	715.399.500,00	-	-	265.016.000	13,51	322.852.000	16,46	704.592.500,00	98,49	DISPORAPAR
									Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan ekonomi Kreatif	153.267.940	617.307.940,00	-	-	20.980.000	13,69	20.980.000	13,69	594.969.440,00	96,38	DISPORAPAR
									Program Pengembangan iklim Penanam Modal	179.542.250	151.138.500,00	2.000.000	1,11	80.188.000	44,66	148.023.000	82,44	151.023.000,00	99,92	DPMPPTSP
									Program Promosi Penanaman Modal	289.572.222	219.586.222,00	60.706.580	20,96	81.597.830	28,18	81.597.830	28,18	219.571.830,00	99,99	DPMPPTSP
									Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	152.205.000	545.599.000,00	53.919.000	35,43	183.005.000	120,24	471.038.000	309,48	543.805.000,00	99,67	DPMPPTSP
									Program Pemberdaya Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.249.746.712	1.374.746.712,00	27.016.500	2,16	164.913.000	13,20	758.116.500	60,66	1.365.708.500,00	99,34	DP3AKB
									Program Pemberdayaan Sosial	188.935.000,00	188.935.000,00	25.640.000	13,57	31.570.000	16,71	167.035.000	88,41	188.935.000,00	100,00	DINAS SOSIAL
									Program Rehabilitasi Sosial	1.591.388.400,00	1.591.388.400,00	321.386.250	20,20	656.516.875	41,25	1.107.682.250	69,60	1.589.491.200,00	99,88	DINAS SOSIAL





No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	TAHUN 2022		KETERANGAN	PROGRAM	PAGU (Rp)		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		PENANGGUNG JAWAB
						Realisasi	%			SEBELUM	SESUDAH	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
									Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	4.626.365.000,00	3.585.549.500,00	326.222.500	7,05	1.397.432.500	30,21	1.628.947.500	35,21	3.576.065.500,00	99,74	DINAS SOSIAL
									Program Penanganan Bencana	360.480.000,00	360.480.000,00	19.628.000	5,44	260.355.000	72,22	330.325.000	91,63	347.880.000,00	96,50	DINAS SOSIAL
									Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	45.000.000,00	45.000.000,00	8.600.000	19,11	20.600.000	45,78	32.600.000	72,44	45.000.000,00	100,00	DINAS SOSIAL
									Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	559.772.750,00	556.490.250,00	4.900.000	0,88	121.090.000	21,63	383.909.250	68,58	555.490.250,00	99,82	DISNAKERTRANS
									Program Penempatan Tenaga Kerja	286.826.984,00	553.993.934,00	13.510.000	4,71	42.376.000	14,77	234.103.284	81,62	553.442.784,00	99,90	DISNAKERTRANS
									Program Hubungan Industrial	172.096.000,00	134.541.000,00	2.000.000	1,16	75.948.500	44,13	107.616.000	62,53	132.241.000,00	98,29	DISNAKERTRANS
									Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	149.150.000,00	138.650.000,00	69.919.500	46,88	138.138.500	92,62	134.516.500	90,19	134.516.500,00	97,02	DISNAKERTRANS
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi		Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	Poin	61	60,91	99,85			978.972.308.976	950.154.662.029	136.474.774.803	13,94	389.705.083.275	39,81	601.578.289.923	61,45	894.986.245.201	94,19	



No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	TAHUN 2022		KETERANGAN	PROGRAM	PAGU (Rp)		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		PENANGGUNG JAWAB
						Realisasi	%			SEBELUM	SESUDAH	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
		Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	79	78,61	99,51			978.972.308.976	950.154.662.029	136.474.774.803	13,94	389.705.083.275	39,81	601.578.289.923	61,45	894.986.245.201	94,19	
			Nilai LPPD Kota	Poin	34,550	34,365	99,46													
			Hasil Evaluasi AKIP	Poin	62	59,04	95,23													
			Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Kategori	WTP	WTP	100													
									Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	11.890.536.235	11.935.440.225,00	2.686.585.190	22,59	6.365.483.976	53,53	9.762.026.309	82,10	11.530.208.403,00	96,60	SEKRETARIAT DAERAH
									Program Perekonomian dan Pembangunan	3.168.680.608	3.121.579.661,00	539.707.700	17,03	1.174.532.400	37,07	2.091.960.997	66,02	3.086.372.117,00	98,87	SEKRETARIAT DAERAH
									Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	829.569.990.183,00	801.266.441.552,00	123.039.666.543	14,83	340.823.614.192	41,08	518.598.560.753	62,51	750.695.778.768,00	93,69	SEMUA OPD



No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	TAHUN 2022		KETERANGAN	PROGRAM	PAGU (Rp)		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		PENANGGUNG JAWAB
						Realisasi	%			SEBELUM	SESUDAH	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
									Program Informasi dan Komunikasi Publik	8.135.307.679	8.057.916.679,00	144.250.000	1,77	549.004.000	6,75	951.326.429	11,69	7.704.286.229,00	95,61	DISKOMINFO
									Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	350.646.750	317.437.750,00	6.210.000	1,77	15.170.000	4,33	143.413.000	40,90	316.795.750,00	99,80	DISKOMINFO
									Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	112.728.750	80.151.187,00	-	-	-	-	-	-	79.753.200,00	99,50	DISKOMINFO
									Program Pendaftaran Penduduk	578.000.000	578.000.000,00	74.720.000	12,93	274.313.000	47,46	389.008.000	67,30	566.695.000,00	98,04	DISDUKCAPIL
									Program Pencatatan Sipil	455.184.750	458.184.750,00	26.000.000	5,71	151.860.000	33,36	329.930.000	72,48	453.184.750,00	98,91	DISDUKCAPIL
									Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	720.132.250	723.132.250,00	26.000.000	3,61	286.669.250	39,81	471.883.000	65,53	710.547.750,00	98,26	DISDUKCAPIL
									Program Pengelolaan Profil Kependudukan	123.322.500	123.322.500,00	-	-	55.216.000	44,77	55.216.000	44,77	123.322.500,00	100,00	
									Program Pelayanan Penanaman Modal	273.999.960	263.215.960,00	32.410.000	11,83	101.290.000	36,97	149.300.000	54,49	262.316.210,00	99,66	DPMPPTSP
									Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	344.938.559	315.560.500,00	65.672.000	19,04	131.712.000	38,18	230.971.000	66,96	314.971.500,00	99,81	DPMPPTSP



No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	TAHUN 2022		KETERANGAN	PROGRAM	PAGU (Rp)		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		PENANGGUNG JAWAB
						Realisasi	%			SEBELUM	SESUDAH	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
									Program Pengelolaan Arsip	504.378.500	446.695.700,00	76.800.000	15,23	117.020.000	23,20	294.135.000	58,32	440.344.500,00	98,58	DPK
									Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	264.816.000	258.016.000,00	-	-	-	-	-	-	218.731.000,00	84,77	DPK
									Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	41.593.079.677	42.218.175.494,00	4.556.508.600	10,95	14.920.623.250	35,87	19.396.862.289	46,63	40.148.523.654,00	95,10	SEKRETARIAT DPRD
									Program Kepegawaian Daerah	2.455.115.500	2.455.765.500,00	90.751.000	3,70	435.442.000	17,74	877.322.790	35,73	2.231.501.890,00	90,87	BKPSDM
									Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	3.058.507.000	3.058.507.000,00	966.920.000	31,61	1.495.645.000	48,90	2.386.332.000	78,02	3.042.877.000,00	99,49	BKPSDM
									Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.391.345.000	1.777.036.250,00	1.210.000	0,09	515.430.000	37,05	827.765.000	59,49	1.574.758.000,00	88,62	INSPEKTORAT
									Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.094.329.000	1.084.433.000,00	30.570.000	2,79	104.897.196	9,59	273.354.696	24,98	1.000.992.726,00	92,31	INSPEKTORAT
									Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.600.000.000	1.938.273.400,00	243.196.500	15,20	779.249.500	48,70	1.196.154.590	74,76	1.921.490.250,00	99,13	BAPPEDA
									Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	4.074.421.450	3.777.356.500,00	28.250.000	0,69	455.964.700	11,19	1.541.023.850	37,82	3.600.538.500,00	95,32	BAPPEDA



No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	TAHUN 2022		KETERANGAN	PROGRAM	PAGU (Rp)		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		PENANGGUNG JAWAB	
						Realisasi	%			SEBELUM	SESUDAH	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%		
									Pembangunan Daerah												
									Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.195.421.618	1.077.435.922,00	-	-	122.119.350	10,22	316.204.850	26,45	1.036.640.014,00	96,21	BAPPEDA	
									Program Pengelolaan Keuangan Daerah	7.012.399.850	7.195.000.350,00	944.465.100	13,47	2.259.414.490	32,22	4.676.815.700	66,69	7.120.222.700,00	98,96	BPKAD	
									Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.411.687.658	3.108.451.658,00	231.044.000	6,77	888.129.010	26,03	1.590.454.540	46,62	3.019.116.140,00	97,13	BPKAD	
									Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.432.010.066	7.802.569.908,00	514.531.750	6,92	2.481.543.064	33,39	3.618.872.064	48,69	7.472.675.336,00	95,77	BAPENDA	
									Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.903.696.000,00	4.911.946.000,00	731.310.000	14,91	2.373.307.574	48,40	3.481.944.734	71,01	4.873.691.670,00	99,22	SATPOL PP	
									Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.188.490.074	1.101.830.074	143.750.000	12,10	669.082.100	56,30	835.251.800	70,28	1.075.388.650,00	97,60	KECAMATAN	
									Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	36.902.936.619	35.276.529.099	816.226.420	2,21	9.860.743.411	26,72	23.102.803.508	62,60	34.981.866.939,00	99,16	KECAMATAN	
									Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	18.810.000	18.810.000	1.588.000	8,44	2.010.000	10,69	2.152.000	11,44	17.650.000,00	93,83	KECAMATAN	
									Program Penyelenggaraan Urusan	1.698.390.216	1.710.440.636	414.322.000	24,39	708.704.000	41,73	1.074.720.500	63,28	1.672.599.531,00	97,79	KECAMATAN	



No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	TAHUN 2022		KETERANGAN	PROGRAM	PAGU (Rp)		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		PENANGGUNG JAWAB	
						Realisasi	%			SEBELUM	SESUDAH	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%		
									Pemerintahan Umum												
									Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	550.000.000	550.000.000,00	-	-	-	-	325.350.000	59,15	546.850.000,00	99,43	KESBANGPOL	
									Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1.501.458.524	1.501.458.524,00	-	-	869.595.812	57,92	1.496.458.524	99,67	1.501.458.524,00	100,00	KESBANGPOL	
									Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, sosial dan Budaya	83.500.000	83.500.000,00	-	-	-	-	83.500.000	100,00	83.500.000,00	100,00	KESBANGPOL	
									Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik sosial	1.314.048.000	1.562.048.000,00	42.110.000	3,20	717.298.000	54,59	1.007.216.000	76,65	1.560.596.000,00	99,91	KESBANGPOL	
						87,20			<b>JUMLAH</b>	<b>1.463.793.596.355</b>	<b>1.539.472.622.207</b>	<b>172.130.855.328</b>	<b>11,76</b>	<b>571.658.710.737</b>	<b>39,05</b>	<b>884.495.739.890</b>	<b>60,42</b>	<b>1.453.444.702.816</b>	<b>94,41</b>	<b>0</b>	





## LAMPIRAN-LAMPIRAN



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : H. SYAFRUDIN, S.Sos., M.Si**

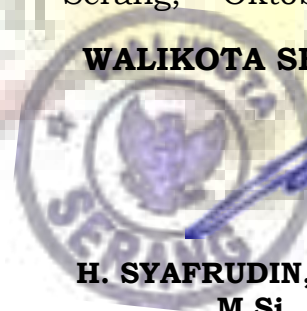
**Jabatan : WALIKOTA SERANG**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Serang, Oktober 2022

**WALIKOTA SERANG**



**H. SYAFRUDIN, S.Sos.,  
M.Si**



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2022

### MISI 1 : MENGUATKAN PERADABAN YANG BERBASIS NILAI- NILAI KEMANUSIAAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	<b>Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	<b>Poin</b>	<b>72,81</b>
	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,86
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,92
	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,34

### MISI 2 : MENINGKATKAN SARANA PRASARANA DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
3.	<b>Terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah</b>	<b>Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah</b>	<b>Poin</b>	<b>66,00</b>
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah	%	74,83
4.	<b>Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan</b>	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>	<b>Poin</b>	<b>50,45</b>
	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Penanganan Timbunan Sampah	%	75
		Ketersediaan RTH	%	3,5
	Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana	Indeks Resiko Bencana	Point	110

**MISI 3 : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING**

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
2.	Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan local daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,25
	Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat	Tingkat inflasi daerah	%	3
		Indeks daya beli	Poin	79,54
		PDRB Per kapita	Juta (Rp)	49,14
		Indeks gini	Poin	0,348
		Angka Kemiskinan	%	5,86
		Tingkat pengangguran terbuka	%	9,06

**MISI 4 : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
2.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	Poin	61,00
	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	79,00
		Nilai LPPD Kota	Point	34.550
		Hasil Evaluasi AKIP	Point	62
		Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Kategori	WTP



**Penjabaran dalam Program yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 atas Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022**

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pengelolaan Pendidikan	132.170.583.983
2	Program Pengembangan Kurikulum	75.000.000
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7.029.337.050
4	Program Pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan	1.589.995.750
5	Program Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	12.106.677.400
6	Program Pembinaan Perpustakaan	175.000.000
7	Program Pengembangan Kebudayaan	3.801.366.682
8	Program Pembinaan Sejarah	1.870.000.000
9	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	350.000.000
10	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	83.446.365.916
11	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	2.280.490.000
12	Program Peningkatan Ketersediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	464.542.000
13	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	441.645.250
14	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	706.875.500
15	Program Perlindungan Perempuan	291.295.000
16	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	330.000.000
17	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	604.355.000
18	Program Pemenuhan Hak Anak	181.110.000
19	Program Perlindungan Khusus Anak	1.733.268.000
20	Program Pengendalian Penduduk	4.175.245.000
21	Program Pembinaan Keluarga Berencana	83.446.365.916
22	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.280.490.000
23	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	5.866.256.384
24	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air Minum	5.465.783.622
25	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air Limbah	4.756.007.650
26	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	19.902.034.484
27	Program Penataan Bangunan Gedung	44.113.600.899
28	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	19.148.489.500
29	Program Penyelenggaraan Jalan	83.338.770.571



NO	PROGRAM	ANGGARAN
30	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	309.473.000
31	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.172.794.100
32	Program Pengembangan Perumahan	1.346.170.000
33	Program Kawasan Permukiman	13.789.029.583
34	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	11.207.825.810
35	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	32.855.865.758
36	Program Redistribusi Tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	187.831.000
37	Program Pengelolaan Tanah Kosong	336.204.000
38	Program Penatagunaan Tanah	457.143.000
39	Program Aplikasi Informatika	918.250.000
40	Program Pengendalian Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	5.431.607.000
41	Program Pengelolaan Pelayaran	15.241.918.504
42	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	396.251.750
43	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1.477.580.781
44	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	143.650.462
45	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	97.281.000
46	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	74.126.141
47	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	88.860.000
48	Program Pengelolaan Persampahan	35.576.905.485
49	Pengendalian Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHAYATI)	7.327.309.996
50	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Non Kebakaran	2.395.335.000
51	Program Penanggulangan Bencana	1.444.017.000
52	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	61.940.000
53	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	548.531.735
54	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	71.145.000
55	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	352.920.000
56	Program Pengembangan UMKM	221.415.000
57	Program Perizinan Pendaftaran Perusahaan	19.083.000
58	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.018.929.950





NO	PROGRAM	ANGGARAN
59	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	556.577.530
60	Program Pengembangan Ekspor	1.079.427.250
61	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	224.013.000
62	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	223.945.000
63	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	49.670.000
64	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.430.582.500
65	Program Penanganan Kerawanan Pangan	100.000.000
66	Program Pengawasan Keamanan Pangan	57.887.500
67	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	564.476.750
68	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	96.943.250
69	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	84.750.000
70	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	837.481.000
71	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	235.231.220
72	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	150.658.484
73	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	14.560.400
74	Program Penyuluhan Pertanian	336.333.640
75	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Parawisata	780.351.000
76	Program Pemasaran Pariwisata	491.876.000
77	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	715.399.500
78	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan ekonomi Kreatif	617.307.940
79	Program Pengembangan iklim Penanam Modal	151.138.500
80	Program Promosi Penanaman Modal	219.586.222
81	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	545.599.000
82	Program Pemberdaya Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.374.746.712
83	Program Pemberdayaan Sosial	188.935.000
84	Program Rehabilitasi Sosial	1.591.388.400
85	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	3.585.549.500
86	Program Penanganan Bencana	360.480.000
87	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	45.000.000
88	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	556.490.250

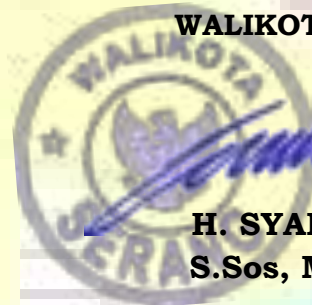


NO	PROGRAM	ANGGARAN
89	Program Penempatan Tenaga Kerja	553.993.934
90	Program Hubungan Industrial	134.541.000
91	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	138.650.000
92	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	11.935.440.225
93	Program Perekonomian dan Pembangunan	3.121.579.661
94	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	801.266.441.552
95	Program Informasi dan Komunikasi Publik	8.057.916.679
96	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	317.437.750
97	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	80.151.187
98	Program Pendaftaran Penduduk	578.000.000
99	Program Pencatatan Sipil	458.184.750
100	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	723.132.250
101	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	123.322.500
103	Program Pelayanan Penanaman Modal	263.215.960
104	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	315.560.500
105	Program Pengelolaan Arsip	446.695.700
106	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	258.016.000
107	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	42.218.175.494
108	Program Kepegawaian Daerah	2.455.765.500
109	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	3.058.507.000
110	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.777.036.250
111	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.084.433.000
112	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.938.273.400
113	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.777.356.500
114	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.077.435.922
115	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	7.195.000.350
116	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.108.451.658
117	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.802.569.908
118	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.911.946.000
119	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.101.830.074
120	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	35.276.529.099
121	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	18.810.000



NO	PROGRAM	ANGGARAN
122	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.710.440.636
123	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	550.000.000
124	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengemabangan Etika serta Budaya Politik	1.501.458.524
125	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, sosial dan Budaya	83.500.000
126	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik sosial	1.562.048.000
<b>JUMLAH</b>		<b>1.539.472.622.207</b>

WALIKOTA SERANG,



*[Signature]*  
**H. SYAFRUDIN,**  
**S.Sos, M.Si**



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SERANG**